



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

**STRATEGI PELAYANAN SP2D YANG CEPAT, AKURAT,
TERPADU UNTUK MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH**

SimPel SPaDU

SISTEM PELAYANAN SP2D CEPAT, AKURAT dan TERPADU



Ir. Lanosin, S.T., M.T., M.M.
Mentor / Bupati OKU Timur



Dr. Ir. Bambang Budhianto
Coach

**IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
PKN TK.II ANGKATAN XXI LAN RI TAHUN 2025**



PROPER
PROYEK PERUBAHAN

AGUSTIAN PAHRIMALE





LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

**STRATEGI PELAYANAN SP2D YANG CEPAT, AKURAT, TERPADU UNTUK
MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN DAERAH**

Oleh : Agustian Pahrimala, S.H., M.H.

NDH : 8

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

Angkatan XXI

**BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN
BEKERJASAMA DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXI
TAHUN 2025

Nama Peserta : Agustian Pahrimale, S.H., M.H.
NIP : 19730815 199903 1 008
NDH / Angkatan : 08 / XXI
Jabatan : Kepala Badan
Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur
Judul Proyek : Strategi Pelayanan SP2D Yang Cepat, Akurat, Terpadu untuk
Perubahan : Menunjang Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Keuangan
Daerah

Telah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan untuk mengikuti Seminar Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXI yang akan dilaksanakan pada hari , tanggal bulan Oktober 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Oktober 2025

Mentor,

Coach,

Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M

Dr. Ir. Bambang Budhianto
NIP. 196105261985031002

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXI
TAHUN 2025

Nama Peserta : Agustian Pahrimale, S.H., M.H.
NIP : 19730815 199903 1 008
NDH / Angkatan : 08 / XXI
Jabatan : Kepala Badan
Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur
Judul Proyek : Strategi Pelayanan SP2D Yang Cepat, Akurat, Terpadu untuk
Perubahan : Menunjang Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Keuangan
Daerah

Telah diseminarkan dan disempurkan berdasarkan masukan dari Penguji, Coach, dan penguatan dari Mentor pada hari , tanggal bulan Oktober 2025.

Palembang, 2025

Mentor,

Coach,

Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M

Dr. Ir. Bambang Budhianto
NIP. 196105261985031002

Penguji,

Dr. Giri Saptoaji, SS, MA.
NIP. 197103121996031001

EXECUTIVE SUMMARY

Proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama ini identik dengan birokrasi yang panjang, sistem manual, dan minim transparansi. Dampaknya bukan hanya keterlambatan pencairan dana, tetapi juga terganggunya pelaksanaan program pembangunan serta menurunnya kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

Menjawab tantangan tersebut, lahirlah inovasi Strategi Pelayanan SP2D Yang Cepat, Akurat, Terpadu untuk Menunjang Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Keuangan Daerah (SimPel SPaDu) sebuah terobosan digital yang mentransformasi pelayanan keuangan daerah dari sistem manual menjadi layanan elektronik terpadu. Inovasi ini mengintegrasikan seluruh tahapan SP2D mulai dari pengajuan, verifikasi, validasi, hingga penerbitan dalam satu sistem digital yang dapat diakses secara real-time oleh OPD, perbankan, dan mitra kerja.

Melalui penerapan SimPel SPaDu, BPKAD berhasil memangkas waktu penerbitan SP2D dari rata-rata 2–5 hari kerja menjadi maksimal 2 hari kerja, meningkatkan akurasi data keuangan, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Transformasi ini sekaligus menandai langkah besar menuju layanan keuangan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi hasil.

Dari sisi ekonomi, proyek perubahan ini menghasilkan nilai tambah signifikan:

1. Serapan anggaran meningkat dan silpa menurun, mempercepat perputaran dana publik hingga dua trilyun rupiah setiap tahun.
2. Efisiensi biaya administrasi melalui digitalisasi proses dan pengurangan kerja manual.
3. Percepatan peredaran uang di masyarakat, mendorong aktivitas ekonomi lokal dan pertumbuhan sektor produktif.
4. Peningkatan kepercayaan stakeholder, dengan tingkat kepuasan OPD mencapai lebih dari 83.93%.

Keberlanjutan inovasi dijamin melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan fitur lanjutan berbasis data analitik dan keamanan digital. SimPel SPaDu kini menjadi model replikasi nasional bagi tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Proyek perubahan ini bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan lompatan budaya kerja menuju birokrasi yang adaptif, cepat, dan melayani. Dengan SimPel SPaDu, BPKAD OKU Timur menegaskan diri sebagai pelopor transformasi digital keuangan daerah, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pemerintahan digital Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan pelaksanaan proyek perubahan dengan judul "Strategi Pelayanan SP2D yang Cepat, Akurat, Terpadu untuk Menunjang Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Keuangan Daerah" dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025.

Proyek perubahan ini merupakan wujud komitmen BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam mengembangkan inovasi yang dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas. Melalui transformasi digital dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan proses pengelolaan keuangan daerah akan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Penyusunan

Pelaksanaan Proyek Perubahan ini secara prosedural dan substansial tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan masukan pemikiran dari berbagai pihak sebagaimana tercermin melalui dokumen terlampir. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang terhormat ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M sebagai Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang sekaligus juga selaku mentor, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025;
2. Prof. Dr. H.M. Edwar Juliartha, S.Sos., MM. selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran, yang telah menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025;
3. Bapak Dr. Ir. Bambang Budhianto, selaku *coach* yang dengan sabar telah banyak memberikan masukan konstruktif dan saran untuk penyelesaian pelaksanaan Proyek Perubahan ini;
4. Para Widyaiswara serta fasilitator yang telah memberikan ilmu selama pelatihan ini;

5. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh tim kerja BPKAD, OPD, Bank Sumsel Babel dan mitra kerja yang saling mendukung selama proses ini;
6. Rekan-rekan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025 yang saling memberikan dorongan serta motivasi selama pelatihan maupun pelaksanaan Proyek Perubahan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan dan keberlanjutan inovasi ke depan. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pelayanan publik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan dapat menjadi referensi bagi daerah lain.

Martapura, Oktober 2025

Penyusun,

Agustian Pahrimala, S.H., M.H.
NDH: 8

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Proyek Perubahan.....	5
C. Manfaat Proyek Perubahan.....	7
1. Nilai Ekonomis	7
2. Penerima Manfaat.....	8
3. Ruang Lingkup Proyek Perubahan	9
BAB II RENCANA PROYEK PERUBAHAN.....	12
A. Analisa Masalah	12
B. Strategi Penyelesaian Masalah	17
1. Terobosan Inovasi	19
2. Tahapan Proyek Perubahan	21
C. Strategi Marketing	25
1. Analisis Stakeholder	25
2. Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi	29
3. Strategi Marketing Mix 4P plus Customer (4P+1C)	32
D. Mata Pelatihan Pilihan Pendukung Proyek Perubahan	34
1. Komunikasi Organisasi	34

2.	Manajemen Pemerintahan	35
3.	Statistik Dan Metode Penelitian	37
E.	Strategi Pengembangan Kompetensi	38
F.	Penilaian Dan Pengembangan Potensi Diri	39
1.	Penilaian Potensi	39
2.	Pengembangan Potensi Diri	40
 BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN		42
A.	Capaian Hasil Perubahan Terhadap Rencana Proyek Perubahan	42
1.	Keterkaitan Capaian dengan Asta Cita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	42
2.	Gambaran Singkat Simple SPaDu	43
3.	Pelaksanaan Tahapan Jangka Pendek	49
B.	Manfaat Proyek Perubahan	71
C.	Pelaksanaan Kepemimpinan Strategis	75
D.	Pelaksanaan Strategi Marketing dan Diseminasi	78
1.	Implementasi Analisis Stakeholder	78
2.	Implementasi Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi	80
3.	Implementasi Strategi Marketing (Marketing Mix 4P+1C)	81
E.	Keberlanjutan Proyek Perubahan	84
F.	Pemberdayaan Organisasi Pembelajar : Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi (Bankom) Sumberdaya Manusia Dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan	88
G.	Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan	96
1.	Komunikasi Organisasi	96
2.	Manajemen Pemerintahan	98
3.	Statistik dan Metode Penelitian	99
4.	Integrasi Keterkaitan Ketiga Pelatihan terhadap Keberhasilan Proyek Perubahan	101
H.	Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri	104
1.	Nilai Sikap Perilaku Saat Penyusunan RPP	104
2.	Nilai Sikap Perilaku Setelah Pengembangan Potensi diri	105

3. Perbandingan Nilai Sikap Perilaku Sebelum dan Sesudah Pengembangan Potensi Diri.....	108
BAB IV PENUTUP.....	109
A. Leason Learnt.....	109
B. Kesimpulan.....	109
C. Rekomendasi.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Waktu Penerbitan SP2D Tahun 2020-2024	4
Tabel 2.1 Tabel Uji Kelayakan Isu – Metode APKL	12
Tabel 2.2 Penilaian Prioritas Isu dengan Kriteria USG	14
Tabel 2.3 Analisis SWOT	16
Tabel 2.4 Tahapan Kegiatan Jangka Pendek.....	20
Tabel 2.5 Tahapan Kegiatan Jangka Menengah	22
Tabel 2.6 Tahapan Kegiatan Jangka Panjang	23
Tabel 2.7 Identifikasi <i>Stakeholders</i>	24
Tabel 2.8 Klasifikasi <i>Stakeholders</i>	25
Tabel 2.9 Struktur Organisasi Proyek.....	30
Tabel 2.10 Program Pengembangan Kompetensi.....	37
Tabel 2.11 Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Monitor	39
Tabel 2.12 Rencana Pengembangan Potensi Diri.....	39
Tabel 3.1 Inisiasi Program dan Pembentukan Tim	51
Tabel 3.2 Pengumpulan Data dan Pemetaan Masalah.....	54
Tabel 3.3 Desain Awal Solusi dan Penyusunan SOP Baru	59
Tabel 3.4 Review dan Finalisasi Desain	61
Tabel 3.5 Pengembangan Prototipe Layanan	64
Tabel 3.6 Pelatihan Awal dan Uji Coba Terbatas.....	66
Tabel 3.7 Keberlanjutan Tahapan Jangka Menengah	84
Tabel 3.8 Keberlanjutan Tahapan Jangka Panjang	89
Tabel 3.10 Hasil Pengembangan Potensi Diri	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Fishbone.....	15
Gambar 2.2 Diagram <i>Stakeholders</i>	26
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Aksi Perubahan.....	30
Gambar 3.1 Tampilan Halaman Depan	42
Gambar 3.2 Tampilan Durasi Proses	44
Gambar 3.3 Tampilan Akun Resepsionis.....	46
Gambar 3.5 Tampilan Akun Perbendaharaan Verifikasi.....	47
Gambar 3.6 Tampilan Akun Perbendaharaan SP2D.....	47
Gambar 3.7 Tampilan Akun OPD.....	48
Gambar 3.8 Eviden Sosialisasi awal proyek perubahan.....	51
Gambar 3.9 Eviden Pembentukan Tim Pelaksana Proyek	52
Gambar 3.10 Eviden Penyusunan rencana kerja	53
Gambar 3.11 Eviden Identifikasi hambatan alur SP2D.....	55
Gambar 3.12 Eviden Mengukur rata-rata waktu penerbitan SP2D	56
Gambar 3.13 Eviden Wawancara stakeholder (OPD, Bank, internal).....	57
Gambar 3.14 Eviden Analisis data hasil minggu 2.....	59
Gambar 3.15 Eviden Penyusunan draft desain solusi & SOP baru	60
Gambar 3.16 Eviden FGD lintas pihak validasi desain.....	61
Gambar 3.17 Eviden Penyempurnaan desain aplikasi.....	62
Gambar 3.18 Eviden Pembuatan prototipe aplikasi SP2D	64
Gambar 3.19 Eviden Simulasi internal alur baru	65
Gambar 3.20 Eviden Pelatihan singkat petugas BPKAD & OPD.....	67
Gambar 3.21 Eviden Uji coba pada 3–5 OPD terpilih	68
Gambar 3.22 Eviden Monitoring respon & kendala teknis	69
Gambar 3.23 Peta Stakeholder Awal (Saat Rancangan)	79
Gambar 3.24 Peta Stakeholder pada Pelaksanaan Proyek Perubahan.....	79
Gambar 3.25 Eviden Promosi.....	83
Gambar 3.26 Pernyataan Komitmen Keberlanjutan.....	87
Gambar 3.27 Dukungan Anggaran	88
Gambar 3.28 Eviden Komunikasi & koordinasi lintas instansi	90
Gambar 3.29 Eviden Pemahaman & pengoperasian aplikasi.....	92
Gambar 3.30 Eviden Kecepatan & akurasi penerbitan SP2D	93
Gambar 3.31 Eviden Budaya kerja digital & kolaboratif.....	94
Gambar 3.32 Eviden Penerimaan perubahan (mengurangi resistensi).....	95
Gambar 3.33 Eviden Sumber Pelatihan Komunikasi Organisasi	96
Gambar 3.34 Eviden Sumber Pelatihan Manajemen Pemerintahan.....	98
Gambar 3.35 Eviden Sumber Pelatihan Statistik dan Metode Penelitian.....	99
Gambar 3.36 Rekap Nilai Sikap Perilaku Saat Penyusunan RPP	104
Gambar 3.37 Rekap Nilai Sikap Perilaku Setelah Pengembangan Potensi Diri	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Kesiapan Menjadi Mentor	102
Lampiran 2 Form Persetujuan Mentor	103
Lampiran 3 Hasil Assesment Potensi Diri saat Rancangan Proyek Perubahan.....	104
Lampiran 4 Hasil Assesment Potensi Diri dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan.....	105
Lampiran 5 Pernyataan Komitmen Keberlanjutan Proyek Perubahan	106
Lampiran 6 Form Persetujuan Coach Pada Pemilihan Mata Pelatihan Pilihan Dalam Mendukung Aktualisasi Kepemimpinan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025.....	107
Lampiran 7 Kartu Kendali Proses Coaching	121
Lampiran 8 Kartu Kendali Proses Mentoring.....	123
Lampiran 9 Dokumentasi Pelaksanaan.....	124
Lampiran 10 Buku Panduan	109
Lampiran 11 Biodata Diri	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Melaksanakan Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tersebut, berada di bawah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Berdasarkan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, BPKAD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tugas pokok tersebut dijabarkan dalam beberapa fungsi strategis, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran, kas daerah, akuntansi, pelaporan keuangan, dan aset daerah.
2. Pelaksanaan dan pengendalian anggaran termasuk penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas umum daerah, serta pelaksanaan belanja daerah.
3. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), termasuk penerbitan dokumen keuangan resmi seperti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
4. Pengelolaan aset/barang milik daerah, termasuk pencatatan, pelaporan, dan optimalisasi pemanfaatan aset.

5. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai pimpinan perangkat daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah agar berjalan efektif dan efisien, serta memastikan seluruh pelayanan keuangan publik termasuk pencairan anggaran melalui SP2D dapat dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis situasi, dihadapkan pada lima isu strategis utama yang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah yaitu : Pertama, pemenuhan rasio *mandatory spending* sesuai ketentuan regulasi menjadi tantangan tersendiri. Kewajiban alokasi belanja minimal pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan seringkali harus diimbangi dengan kebutuhan pembiayaan program prioritas lainnya. Kondisi ini menuntut perencanaan anggaran yang adaptif dan berbasis analisis kebutuhan yang komprehensif.

Kedua, Pengelolaan aset daerah di Kabupaten OKU Timur hingga kini belum sepenuhnya efektif dan efisien. Permasalahan utama terletak pada pendataan yang belum lengkap seperti terdapat tanah yang belum bersertifikat sebanyak 556 persil dari 1.559 persil, pemeliharaan yang kurang optimal, serta pemanfaatan aset yang belum maksimal. Keterbatasan sistem informasi, lemahnya koordinasi antar unit kerja, dan minimnya monitoring menyebabkan banyak aset belum memberi kontribusi optimal. kondisi ini menimbulkan risiko inefisiensi serta berkurangnya nilai ekonomi aset.

Ketiga, lambatnya proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) menjadi hambatan nyata dalam percepatan realisasi anggaran. Kompleksitas alur verifikasi dokumen, keterbatasan integrasi sistem informasi keuangan, serta koordinasi yang belum optimal antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Organisasi Perangkat Daerah dan pihak perbankan menjadi faktor

penghambat. Keterlambatan ini berdampak langsung pada pelaksanaan program pembangunan dan memperlambat perputaran ekonomi daerah.

Keempat, masih terdapat ketidaksinkronan dokumen perencanaan dan penganggaran antara Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Perbedaan substansi atau data antara dokumen perencanaan (seperti RKPD dan Renja dengan dokumen penganggaran (APBD dan DPA) mengindikasikan adanya kesenjangan koordinasi. Kondisi ini mengakibatkan perlunya koreksi berulang yang memakan waktu dan memperlambat proses administrasi keuangan.

Kelima, inventarisasi aset daerah belum sepenuhnya riil, basis data aset yang tidak diperbarui secara berkala menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan catatan administrasi. Dampaknya, keakuratan laporan keuangan menurun, potensi temuan audit meningkat, dan kebijakan pemanfaatan aset menjadi kurang tepat sasaran.

Kelima isu strategis tersebut saling terkait dan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, sehingga memerlukan penanganan terpadu dan inovatif agar dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Salah satu titik krusial dalam alur pengelolaan keuangan daerah adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen resmi Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan dana APBD ke rekening penerima sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh OPD (Bendahara Pengeluaran). Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam penerbitan SP2D memiliki efek langsung terhadap kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa penerbitan SP2D di Kabupaten OKU Timur masih memerlukan perbaikan signifikan. Proses verifikasi yang memakan waktu, perbedaan persepsi antara pihak terkait, serta keterbatasan teknologi informasi menjadi faktor penghambat utama. Akibatnya, terjadi keterlambatan realisasi anggaran, tertundanya pembayaran kepada pihak ketiga, dan berkurangnya kecepatan sirkulasi uang di daerah. Hal ini pada akhirnya berdampak terhadap perlambatan perputaran ekonomi daerah dan mengurangi efektivitas

stimulus fiskal daerah. Tabel Realiasi waktu penerbitan SP2D dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Realisasi Waktu Penerbitan SP2D Tahun 2020-2024

No.	Waktu	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	< 2 Hari	1057	1106	1124	1869	1961
2.	2 s.d 5 Hari	4532	4256	5346	5358	5450
3.	> 5 Hari	1265	902	1886	1912	1981
Jumlah SP2D		6854	6264	8356	9139	9392

Sumber: BPKAD Ogan Komering Ulu Timur

Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi.
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, yang mengharuskan pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan mutu layanan publik.
3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik, yang mengatur prinsip kecepatan, ketepatan, keterjangkauan, dan keterbukaan informasi.

Oleh karena itu, dilaksanakan inovasi Strategi Pelayanan SP2D yang Cepat, Akurat, Terpadu untuk Menunjang Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, memperkuat koordinasi antar unit kerja, serta menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk mempercepat proses penerbitan SP2D dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi stakeholder multihelix yang melibatkan pemerintah daerah, sektor perbankan, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Sinergi multihelix ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi Kabupaten OKU Timur melalui percepatan perputaran keuangan daerah, optimalisasi stimulus fiskal, serta peningkatan efektivitas pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Lebih jauh, arah inovasi ini sejalan dengan semangat *Asta Cita Presiden Republik Indonesia*, khususnya **Asta Cita ke-4** tentang Pemerintahan Efektif, Bersih, dan Melayani, **Asta Cita ke-6** tentang Transformasi Digital dan Ekonomi Berbasis Inovasi, serta **Asta Cita ke-8** yang menegaskan pentingnya Pemerintahan Daerah yang Kuat dan Sinergis. Melalui penerapan SimPel SPaDu, Pemerintah Kabupaten OKU Timur membangun model tata kelola keuangan daerah yang modern, efisien, dan terintegrasi mencerminkan birokrasi adaptif yang berorientasi pada hasil serta mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan transparan.

Selain mendukung Asta Cita, inovasi ini juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama **Tujuan 8 (Decent Work and Economic Growth)**, melalui percepatan realisasi belanja daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, **Tujuan 9 (Industry, Innovation and Infrastructure)**, dengan penguatan infrastruktur digital pelayanan publik di bidang keuangan daerah, **Tujuan 16 (Peace, Justice and Strong Institutions)**, melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data; serta **Tujuan 17 (Partnerships for the Goals)**, dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dengan demikian, implementasi proyek perubahan SimPel SPaDu bukan hanya transformasi digital dalam bidang keuangan daerah, tetapi juga bagian dari gerakan nasional menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkelanjutan sesuai visi besar **Asta Cita dan Agenda SDGs 2030**.

B. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN

Tujuan proyek perubahan ini adalah mewujudkan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang cepat, tepat, dan akurat melalui penguatan Strategilintas sektor dengan pendekatan kolaborasi multihelix. Inisiatif ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ketahanan ekonomi daerah.

Untuk menjamin keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan, tujuan proyek perubahan ini dirumuskan dalam tiga jangka waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan Jangka Pendek (2 Bulan)

- 1) Mewujudkan sistem pelayanan SP2D yang terintegrasi antara BPKAD, OPD (Bendahara Pengeluaran), bank daerah, dan mitra kerja melalui satu pintu layanan digital.
- 2) Menyediakan dashboard monitoring status SP2D yang dapat diakses oleh seluruh OPD (Bendahara Pengeluaran) secara *real-time*.
- 3) Mempercepat waktu penerbitan SP2D sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan (dari rata-rata 2 - 5 hari kerja berhasil dipercepat menjadi maksimal 2 hari kerja).
- 4) Meningkatkan koordinasi lintas pihak melalui SOP dan protokol komunikasi yang jelas.

b. Tujuan Jangka Menengah (6 bulan – 1 tahun)

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem digital untuk otomatisasi proses verifikasi dan persetujuan SP2D.
- 2) Meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan OPD (Bendahara Pengeluaran) dan BPKAD melalui pelatihan berkelanjutan.
- 3) Menyediakan laporan kinerja layanan SP2D yang transparan, dapat diakses publik, dan terhubung dengan sistem pelaporan keuangan daerah.
- 4) Mengintegrasikan layanan SP2D dengan sistem informasi keuangan daerah dan sistem perbankan.

c. Tujuan Jangka Panjang (1 – 2 tahun)

- 1) Menjadikan layanan SP2D Cepat, Akurat, Terpadu sebagai model pelayanan keuangan daerah yang dapat direplikasi oleh daerah lain.
- 2) Memastikan sistem dan mekanisme kerja yang sudah terbentuk menjadi bagian dari tata kelola permanen BPKAD.
- 3) Mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result-based*).

- 4) Memperkuat kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap kinerja keuangan daerah melalui peningkatan peringkat MCP (*Monitoring Center for Prevention*) KPK dan indeks reformasi birokrasi.

C. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

1. Nilai Ekonomis

Percepatan penerbitan SP2D memiliki implikasi langsung terhadap kinerja fiskal daerah, efektivitas pembangunan, serta daya dorong ekonomi lokal. Dengan volume APBD Kabupaten OKU Timur yang mencapai ± Rp2 Triliun per tahun, optimalisasi aliran dana melalui SP2D menjadi sangat penting untuk menjamin keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan publik.

Adapun nilai ekonomis yang dapat diidentifikasi antara lain:

1) **Optimalisasi Serapan Anggaran**

Dengan percepatan penerbitan SP2D, realisasi anggaran dapat berjalan lebih lancar sesuai dengan tahapan dan target waktu yang ditetapkan. Hal ini mengurangi risiko terjadinya silpa (sisa lebih perhitungan anggaran), sekaligus meningkatkan efektivitas belanja daerah. Jika serapan anggaran meningkat hanya 5% lebih cepat, maka setara dengan Rp100 Miliar belanja publik yang lebih cepat menggerakkan roda ekonomi.

2) **Efisiensi Biaya Administrasi**

Digitalisasi dan percepatan layanan SP2D akan memangkas biaya operasional baik di tingkat OPD maupun BPKAD. Pengurangan biaya kertas, transportasi, serta waktu kerja ASN yang sebelumnya digunakan untuk proses manual dapat dialihkan ke kegiatan produktif lainnya. Estimasi efisiensi bisa mencapai ratusan juta rupiah per tahun.

3) **Dampak Multiplikasi Ekonomi (*Multiplier Effect*)**

Pencairan dana pembangunan yang lebih cepat akan mempercepat peredaran uang di masyarakat, khususnya melalui belanja barang/jasa dan belanja modal. Misalnya, percepatan belanja modal senilai Rp500 Miliar dapat memicu peningkatan aktivitas ekonomi sektor konstruksi, perdagangan, dan jasa, yang berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

4) **Peningkatan Kepercayaan Stakeholder**

OPD, pihak ketiga (penyedia barang/jasa), hingga lembaga keuangan akan merasakan kepastian dan kepuasan terhadap sistem keuangan daerah yang lebih cepat dan transparan. Hal ini dapat menurunkan risiko biaya tambahan seperti bunga pinjaman akibat keterlambatan pembayaran, sehingga memberi nilai penghematan finansial yang signifikan.

5) **Kontribusi terhadap Stabilitas Fiskal dan Investasi**

Percepatan realisasi belanja daerah memberikan sinyal positif bagi dunia usaha dan investor lokal. Kepastian arus kas pemerintah akan mendorong iklim usaha yang lebih kondusif, sekaligus menjaga stabilitas fiskal daerah.

Dengan demikian, percepatan penerbitan SP2D tidak hanya dipandang sebagai perbaikan layanan administrasi, melainkan juga sebagai instrumen strategis penggerak ekonomi daerah. Nilai ekonomis yang dihasilkan mencakup efisiensi biaya, optimalisasi serapan anggaran, percepatan peredaran uang di masyarakat, hingga peningkatan kepercayaan stakeholder terhadap tata kelola keuangan daerah.

2. **Penerima Manfaat**

Pelaksanaan proyek perubahan percepatan layanan SP2D memberikan manfaat strategis, baik secara langsung bagi pemerintah daerah maupun secara tidak langsung bagi masyarakat luas. Manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh BPKAD sebagai pelaksana layanan, tetapi juga oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, mitra perbankan, serta pihak-pihak terkait yang menjadi bagian dari ekosistem pengelolaan keuangan daerah.

1) **Penerima Manfaat Internal**

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): Meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi beban administratif, dan memastikan kualitas data yang akurat.
- b. Organisasi Perangkat Daerah: Memperoleh kepastian waktu pencairan anggaran, kemudahan pemantauan status SP2D, dan dukungan dalam pelaksanaan program tepat waktu.

- c. Pemerintah Daerah: Memperoleh pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi, sehingga mendukung pencapaian target kinerja daerah.

2) Penerima Manfaat Eksternal

- a. Mitra Perbankan: Memperoleh proses transaksi keuangan yang lebih cepat, aman, dan terdokumentasi secara sistematis.
- b. Penyedia Barang/Jasa dan Pelaku Usaha Lokal: Mendapat kepastian pembayaran lebih cepat, yang berdampak pada kelancaran arus kas usaha.
- c. Masyarakat Umum: Mendapat manfaat tidak langsung berupa percepatan realisasi program pembangunan, perbaikan layanan publik, dan peningkatan perputaran ekonomi lokal.

D. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN

Perubahan yang diusulkan melalui inovasi pelayanan SP2D mencakup cakupan kerja yang menyeluruh, melibatkan dimensi proses, sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan kolaborasi antar-stakeholder. Ruang lingkup ini disusun untuk memastikan bahwa percepatan dan transparansi penerbitan SP2D dapat tercapai secara berkelanjutan serta berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas keuangan daerah.

a. Lingkup Proses

Untuk lingkup proses dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperbaiki alur kerja penerbitan SP2D mulai dari pengajuan dokumen oleh OPD (Bendahara Pengeluaran), verifikasi oleh BPKAD, hingga pencairan dana di Bank Sumsel Babel.
2. Menyederhanakan birokrasi dan menghapus proses yang berulang (redundancy).
3. Menetapkan *Service Level Agreement* (SLA) yang jelas untuk setiap tahapan, sehingga waktu penerbitan SP2D dapat terukur dan dipantau.

Waktu pengerjaan Minggu ke-1 hingga Minggu ke-4 (Jangka Pendek - bulan pertama implementasi).

Lokasi: Kantor BPKAD Kabupaten OKU Timur dan Kantor Pusat Layanan Bank Sumsel Babel Martapura.

b. Lingkup Sistem dan Teknologi

Untuk lingkup sistem dan teknologi dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengubah sistem pencatatan internal menjadi platform digital terpadu yang dapat diakses oleh seluruh OPD, BPKAD, dan mitra kerja terkait.
2. Mengimplementasikan *dashboard* monitoring SP2D secara *real-time* sehingga OPD dapat memantau status pencairan tanpa menunggu laporan manual.
3. Mengintegrasikan sistem BPKAD dengan sistem perbankan (Bank Sumsel Babel) untuk mempercepat proses pencairan dana.

Waktu pengerjaan: Minggu ke-2 hingga Minggu ke-8 (Jangka Pendek- bulan pertama–kedua).

Lokasi: Kantor BPKAD OKU Timur, Server Room, dan sistem *online* yang terhubung ke Bank Sumsel Babel.

c. Lingkup Sumber Daya Manusia

Untuk lingkup Sumber Daya Manusia dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai BPKAD, OPD (Bendahara Pengeluaran), dan pihak bank dalam penggunaan aplikasi pelayanan SP2D.
2. Membentuk tim Strategilintas instansi untuk pengelolaan dan evaluasi sistem secara berkala.
3. Menyusun SOP baru yang selaras dengan pemanfaatan teknologi digital.

Waktu pengerjaan: Minggu ke-24 hingga Minggu ke-48 (Jangka Menengah).

Lokasi: Ruang Pelatihan BPKAD OKU Timur, Aula Pemerintah Daerah, dan ruang rapat koordinasi Bank Sumsel Babel.

d. Lingkup Kolaborasi dan Tata Kelola

Untuk lingkup Kolaborasi dan Tata Kelola dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antar-stakeholder melalui mekanisme rapat koordinasi rutin, *feedback loop*, dan kanal komunikasi resmi.
2. Menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) untuk mengukur keberhasilan Strategiantar pihak.
3. Memenuhi prinsip *good governance* melalui penerapan asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Waktu pengerjaan: Berjalan mulai tahun pertama dan dilakukan secara berkelanjutan (Jangka Panjang).

Lokasi: Kantor BPKAD OKU Timur, ruang rapat koordinasi OPD , dan pertemuan daring (*online meeting platform*).

e. Lingkup Regulasi dan Kepatuhan

Untuk lingkup Regulasi dan Kepatuhan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyesuaikan prosedur sesuai peraturan yang berlaku, seperti:
 - Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Menyusun kebijakan internal BPKAD terkait percepatan layanan SP2D berbasis digital.

Waktu pengerjaan: Berjalan mulai tahun pertama dan kedua (Jangka Panjang).

Lokasi: Kantor BPKAD OKU Timur dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah OKU Timur.

BAB II

RENCANA PROYEK PERUBAHAN

A. ANALISA MASALAH

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten OKU Timur memandang perlu melakukan identifikasi dan analisis mendalam terhadap berbagai permasalahan strategis yang dihadapi. Langkah ini menjadi krusial mengingat setiap permasalahan yang tidak segera diatasi berpotensi menghambat efektivitas pelayanan publik, memperlambat pencapaian target pembangunan daerah, serta menurunkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil identifikasi awal, terdapat lima isu strategis utama yang menjadi prioritas penanganan, yaitu:

1. Pemenuhan rasio mandatory spending yang harus disesuaikan dengan ketentuan regulasi agar alokasi anggaran dapat memenuhi kewajiban belanja minimal sesuai amanat undang-undang.
2. Pengelolaan aset daerah yang belum efektif dan efisien, yang berdampak pada optimalisasi pemanfaatan aset untuk mendukung pendapatan daerah dan pelayanan publik.
3. Lambatnya proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang mengakibatkan keterlambatan realisasi anggaran dan pelaksanaan program.
4. Ketidaksinkronan dokumen perencanaan dan penganggaran antara Organisasi Perangkat Daerah dan BPKAD, sehingga mempengaruhi konsistensi pelaksanaan APBD.
5. Inventarisasi aset yang belum riil, yang menghambat penyajian data aset secara akurat dan berdampak pada proses perencanaan, penganggaran, maupun pengawasan.

Kelima isu ini selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak) untuk memetakan tingkat urgensi,

kompleksitas, serta potensi dampaknya terhadap masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pendekatan ini, setiap isu akan dievaluasi berdasarkan tingkat keterkinian (aktualitas), urgensi penyelesaian (problematic), dampak terhadap masyarakat luas (kekhayalan), dan kelayakan untuk segera ditindaklanjuti (layak).

Analisis ini diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan langkah-langkah perubahan yang terukur, terarah, dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja BPKAD serta pelayanan publik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Hasil uji dengan metode APKL dapat dilihat didalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabel Uji Kelayakan Isu – Metode APKL

No	Isu Strategis	Aktual (A)	Problematic (P)	Kekhayalan (K)	Layak Waktu (L)	Keterangan
1	Pemenuhan rasio mandatory spending	✓	✓	✓	✓	Isu sangat aktual karena terkait amanat UU, mempengaruhi alokasi anggaran daerah
2	Pengelolaan aset yang tidak efektif & efisien	✓	✓	✓	✓	Pengaruh besar pada PAD & optimalisasi aset daerah, butuh waktu menengah
3	Lambat proses penerbitan SP2D	✓	✓	✓	✓	Sangat berdampak pada layanan publik & cashflow OPD bisa ditangani cepat
4	Dokumen perencanaan & penganggaran tidak sinkron	✓	✓	✗	✗	Menghambat efektivitas APBD, butuh sinkronisasi lintas OPD
5	Inventarisasi aset tidak riil	✓	✗	✓	✗	Data aset tidak akurat memengaruhi laporan keuangan & kebijakan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode APKL (Aktual, Problematic, Kelayakan, dan Layak Waktu), dapat disimpulkan bahwa tidak semua isu strategis memiliki tingkat kelayakan penanganan yang sama. Penilaian ini membantu menentukan prioritas penyelesaian berdasarkan urgensi, dampak, serta kemudahan implementasi.

Isu lambatnya proses penerbitan SP2D memperoleh tanda kelayakan penuh pada seluruh aspek analisis, yang menunjukkan bahwa permasalahan ini sangat layak untuk segera ditangani. Selain bersifat aktual dan problematik, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat melalui perbaikan prosedur dan optimalisasi sistem yang sudah tersedia.

Isu pemenuhan rasio mandatory spending juga dinilai layak untuk diintervensi, meskipun memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah. Faktor kelayakannya cukup tinggi karena merupakan kewajiban hukum dan berdampak signifikan terhadap alokasi anggaran prioritas.

Selanjutnya, pengelolaan aset daerah yang tidak efektif dan efisien masuk kategori layak dengan catatan. Isu ini memiliki tingkat urgensi tinggi dan berpotensi meningkatkan PAD, namun memerlukan waktu relatif lebih lama untuk ditangani karena melibatkan proses evaluasi, inventarisasi, dan restrukturisasi pemanfaatan aset.

Sementara itu, ketidaksinkronan dokumen perencanaan dan penganggaran dinilai kurang layak untuk penanganan segera dibandingkan isu di atas, karena meskipun aktual dan problematik, kelayakan waktu dan teknisnya masih rendah tanpa adanya pembaruan sistem dan regulasi pendukung. Terakhir, inventarisasi aset yang belum mutakhir mendapat penilaian kelayakan yang lebih rendah. Isu ini tetap penting, namun tidak masuk prioritas penanganan jangka pendek karena urgensinya tidak setinggi isu lainnya, meskipun pembaruan data aset tetap menjadi kebutuhan strategis jangka menengah.

Berdasarkan hasil analisis isu dengan teknik APKL di atas, ketiga isu yang memenuhi kriteria kelayakan sehingga dapat dilakukan perangkingan prioritas melalui teknik USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Metode USG adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan urutan prioritas isu dengan teknik scoring, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. *Urgency (U)*, seberapa mendesak isu tersebut untuk di bahas, kaitannya dengan waktu yang tersedia. Semakin mendesak suatu masalah untuk diselesaikan semakin tinggi urgensinya.

- b. *Seriousness* (S), seberapa serius isu tersebut untuk dibahas apabila tidak ditangani kaitannya terhadap organisasi seperti dampaknya terhadap akuntabilitas, efektifitas, dan sumber dana.
- c. *Growth* (G), kemungkinan berkembangnya isu tersebut dikaitkan dengan penyebab yang semakin memburuk apabila dibiarkan.

Pengujian isu dengan menggunakan Metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) seperti yang terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Penilaian Prioritas Isu dengan Kriteria USG

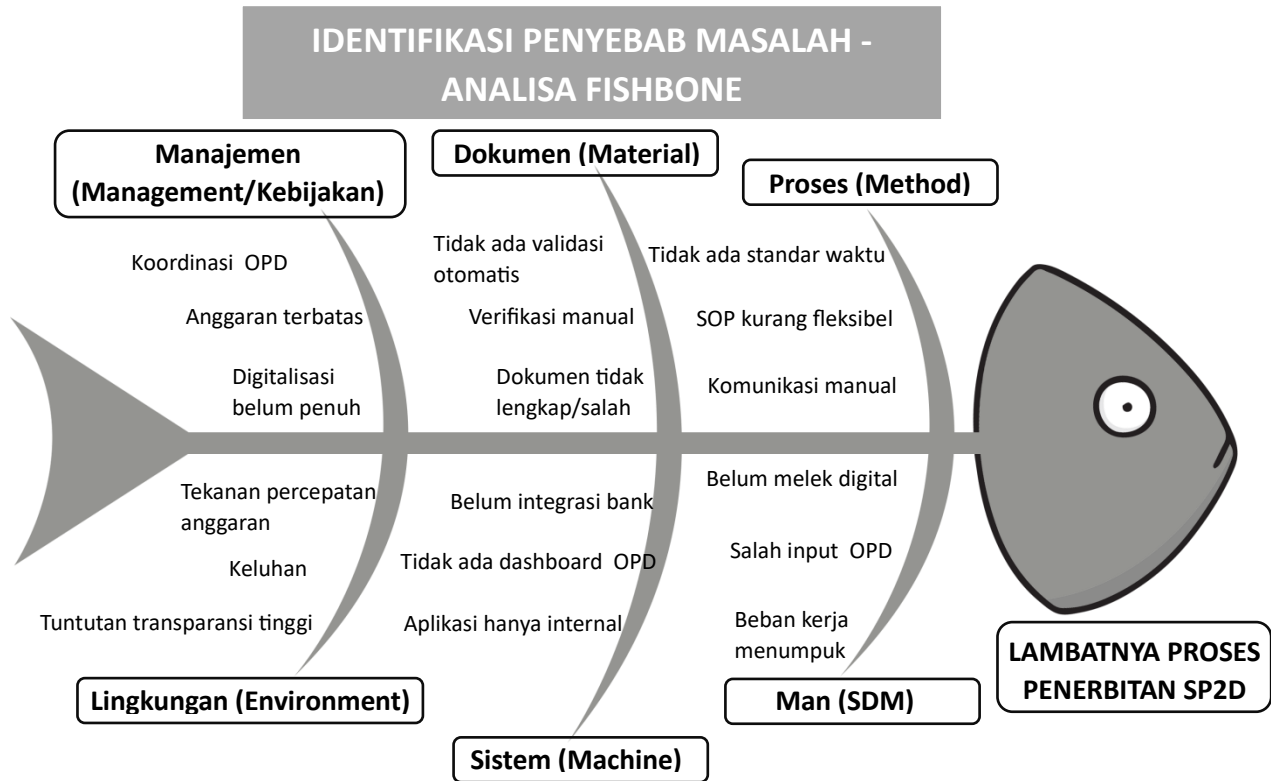
No	Isu	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Skor Total (U+S+G)	Keterangan Singkat
1	Pemenuhan rasio mandatory spending	3	4	3	10	Mendesak karena kewajiban regulasi, dampak pada ketaatan APBD, namun butuh koordinasi lintas sektor.
2	Pengelolaan aset yang tidak efektif dan efisien	3	4	4	11	Dampak ke neraca daerah besar, potensi kerugian aset tinggi, masalah terus membesar jika tak diatasi.
3	Lambatnya proses penerbitan SP2D	4	5	4	13	Urgensi tinggi karena berpengaruh langsung ke pelayanan, serapan anggaran, dan kepuasan OPD.

Skala Penilaian:

- *Urgency (U)*: 1 = tidak mendesak, 5 = sangat mendesak
- *Seriousness (S)*: 1 = dampak kecil, 5 = dampak sangat besar
- *Growth (G)*: 1 = tidak berkembang/membesar, 5 = membesar cepat jika tidak diatasi

Berdasarkan hasil analisis USG, isu *lambatnya proses penerbitan SP2D* memperoleh skor tertinggi yaitu 13 poin. Isu ini dinilai paling mendesak karena berimplikasi langsung terhadap kelancaran pencairan anggaran, berdampak besar pada kinerja serapan APBD, dan memengaruhi kepuasan OPD serta masyarakat penerima manfaat program. Selain itu, potensi pertumbuhan masalah cukup signifikan apabila tidak segera diintervensi, terutama di periode penyerapan anggaran yang padat.

Selanjutnya, *project leader* melakukan langkah untuk menetapkan “penyebab” masalah lambatnya proses penerbitan SP2D berimplikasi langsung terhadap kelancaran pencairan anggaran, berdampak besar pada kinerja serapan APBD, dan memengaruhi kepuasan OPD serta masyarakat penerima manfaat program. berdasarkan management tools dengan menggunakan Metode Analisis Fishbone, sebagai berikut:



Gambar 2.1. Diagram Fishbone

Lambatnya penerbitan SP2D bukan hanya masalah teknis, tetapi kombinasi dari SDM yang belum adaptif, proses manual, sistem terbatas, dokumen tidak standar, tekanan lingkungan eksternal, serta kebijakan manajemen yang belum maksimal.

Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan adalah transformasi digital terintegrasi melalui SimPel SPaDu, disertai penguatan SDM, SOP, dan kolaborasi lintas unit.

B. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah dilakukan pada organisasi, maka dirancang solusi yang diharapkan dapat menciptakan kondisi ideal untuk mengatasi lambatnya lambatnya proses penerbitan SP2D. Dengan kondisi ideal tersebut, diperlukan suatu strategi komprehensif yang melibatkan seluruh stakeholder. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi yang lebih luas untuk dapat memetakan lingkungan secara akurat dan cermat. Melalui analisa pemetaan masalah yang telah dilakukan menggunakan pohon masalah, maka *project leader* memilih pendekatan Analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*), hasil analisa SWOT adalah seperti dibawah ini:

Tabel 2.3 Analisis SWOT

	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM berpengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah dan penerbitan SP2D. 2. Regulasi dan SOP jelas sehingga alur kerja sudah terstandar. 3. Jejaring kerja sama dengan OPD, bank daerah, dan pihak ketiga sudah terbangun. 4. Dukungan pimpinan untuk inovasi pelayanan dan percepatan proses. 5. Tersedia sistem aplikasi internal untuk pencatatan SP2D. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi SP2D hanya berfungsi sebagai alat pencatatan internal, belum menjadi sistem layanan digital publik. 2. Tidak ada dashboard layanan SP2D yang bisa diakses OPD secara mandiri. 3. Rata-rata waktu tunggu konfirmasi status SP2D masih 2-5hari kerja. 4. Proses komunikasi masih manual (telepon, WA, tatap muka) sehingga terjadi bottleneck informasi. 5. Belum ada integrasi sistem antara BPKAD, bank, dan OPD .
EKSTERNAL		
Opportunity (Peluang)	Strategi SO (Strength – Opportunity)	Strategi WO (Weakness – Opportunity)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk percepatan digitalisasi layanan keuangan daerah. 2. Adanya kebijakan SP2D Online atau sistem transaksi non-tunai. 3. Peluang kolaborasi dengan bank daerah dan pihak ketiga untuk integrasi sistem. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan SDM berpengalaman dan SOP yang sudah ada untuk mengimplementasikan SP2D Online secara penuh. 2. Memanfaatkan sistem aplikasi internal yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi dashboard publik yang terintegrasi dengan OPD dan bank. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dashboard SP2D yang dapat diakses mandiri oleh OPD (Bendahara Pengeluaran) memanfaatkan dukungan program digitalisasi pemerintah. 2. Membangun integrasi sistem antara BPKAD, bank, dan OPD untuk mengurangi bottleneck informasi. 3. Mengajukan program pelatihan dan penguatan kapasitas pegawai dalam penggunaan aplikasi terintegrasi.

4. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin tinggi.	3. Menggunakan dukungan kebijakan digitalisasi layanan keuangan untuk mempercepat alur persetujuan dan pencairan dana.	
Threat (Ancaman)	Strategi ST (Strength – Threat)	Strategi WT (Weakness – Threat)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko keterlambatan penyerapan anggaran yang berdampak pada kinerja daerah. 2. Potensi keluhan publik/ OPD jika informasi SP2D lambat diterima. 3. Perubahan kebijakan pusat terkait tata kelola keuangan daerah yang bisa memengaruhi SOP. 4. Ancaman keamanan data dan risiko kesalahan input jika sistem digital tidak dilengkapi keamanan memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan hubungan kerja yang baik dengan OPD dan bank untuk mengantisipasi perubahan kebijakan pusat. 2. Meningkatkan keamanan data SP2D dengan dukungan SDM dan sistem yang sudah ada. 3. Menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) waktu penerbitan SP2D guna mengurangi risiko keluhan publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi ketergantungan pada komunikasi manual dengan membuat sistem layanan monitoring berbasis aplikasi. 2. Melakukan backup dan proteksi data SP2D secara berkala untuk meminimalkan risiko keamanan. 3. Menyusun SOP baru yang fleksibel untuk mengantisipasi perubahan kebijakan pusat terkait tata kelola keuangan daerah.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, permasalahan lambatnya penerbitan SP2D dapat diatasi dengan menyusun strategi yang terarah melalui pendekatan kombinasi antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Pertama, melalui strategi SO (Strength–Opportunity), percepatan penerbitan SP2D dapat dicapai dengan memanfaatkan kekuatan yang sudah dimiliki, seperti sumber daya manusia yang berpengalaman serta adanya SOP yang jelas. Hal ini dapat dioptimalkan dengan mengembangkan sistem aplikasi internal menjadi dashboard SP2D online yang terintegrasi dengan bank. Dukungan pemerintah pusat terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan juga menjadi peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat layanan.

Kedua, pada strategi WO (Weakness–Opportunity), kelemahan internal seperti masih adanya proses manual dan komunikasi yang belum optimal dapat diatasi dengan memanfaatkan peluang penguatan digitalisasi. Langkah yang dapat dilakukan yaitu menyediakan pelatihan SDM, mengembangkan sistem layanan monitoring berbasis aplikasi, serta membangun integrasi sistem BPKAD, bank, dan

OPD. Upaya ini akan mengurangi ketergantungan pada cara kerja manual serta mempercepat proses verifikasi.

Ketiga, melalui strategi ST (Strength–Threats), kekuatan internal yang dimiliki dapat digunakan untuk mengurangi risiko ancaman eksternal, seperti keterlambatan penyerapan anggaran dan perubahan regulasi. Hal ini dapat diwujudkan dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penerbitan SP2D, memperkuat keamanan data, serta menjaga hubungan kerja sama yang harmonis dengan OPD maupun pihak bank.

Keempat, pada strategi WT (Weakness–Threats), kelemahan internal yang ada perlu diminimalisir agar tidak semakin diperburuk oleh ancaman eksternal. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menyusun SOP yang lebih fleksibel, melakukan backup data secara berkala, serta membangun sistem layanan monitoring berbasis aplikasi agar proses lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan kebijakan.

Secara keseluruhan, strategi prioritas yang paling penting untuk segera dilakukan adalah digitalisasi penuh sistem penerbitan SP2D melalui dashboard online yang terintegrasi dengan bank dan OPD disertai peningkatan kapasitas SDM serta penetapan standar waktu layanan. Dengan langkah tersebut, permasalahan lambatnya penerbitan SP2D dapat diatasi, pelayanan publik menjadi lebih cepat dan transparan, serta akuntabilitas keuangan daerah dapat terjaga.

1. Terobosan Inovasi

Selama ini, proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih menghadapi kendala keterlambatan, yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan program/kegiatan OPD, keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga, serta menimbulkan keluhan dari pengguna layanan. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya sistem integrasi antar pihak, sehingga OPD tidak dapat memantau status SP2D secara langsung dan masih mengandalkan komunikasi manual melalui telepon, WhatsApp, atau datang langsung.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diciptakanlah terobosan inovasi “**Strategi Pelayanan SP2D yang Cepat, Akurat, Terpadu untuk Menunjang Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah**” yang secara ringkas disebut “**SimPel SPaDu**” (Sistem Pelayanan SP2D Cepat, Akurat dan Terpadu).

Inovasi ini merupakan platform digital berbasis dekstop yang mengintegrasikan seluruh proses penerbitan SP2D antara BPKAD, OPD, Bank, dan mitra kerja secara *real-time*. Layanan ini tidak hanya mempersingkat waktu proses, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan pengguna layanan.

SimPel SPaDu dilengkapi dengan beberapa fitur kunci:

- 1) *Tracking SP2D Real-Time* – Memungkinkan OPD dan pihak terkait memantau status SP2D dari awal pengajuan hingga pencairan dana.
- 2) *e-Submission & Validasi Otomatis Dokumen* – Mengurangi kesalahan administrasi dengan validasi kelengkapan dan format dokumen sebelum masuk proses.
- 3) *Workflow Persetujuan Singkat (SP2D One Flow)* – Menyederhanakan tahapan persetujuan agar tidak redundan, serta mengadopsi *parallel process* untuk pekerjaan yang bisa berjalan bersamaan.
- 4) *Dashboard Publik & Display Layanan* – Menyajikan status SP2D dan SLA waktu proses secara terbuka di ruang pelayanan BPKAD dan situs resmi.
- 5) *SP2D Smart Class* – Pelatihan dan sertifikasi bagi operator OPD dan BPKAD untuk memastikan kompetensi dan keseragaman pemahaman prosedur.

Sebagai langkah formal dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan inovasi ini, BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur akan menerbitkan ***Surat Keputusan (SK) Bupati OKU Timur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penggunaan dan pengelolaan SimPel SPaDu.*** SK ini akan menjadi payung hukum yang mengatur seluruh mekanisme, hak dan kewajiban pengguna layanan, serta prosedur operasional mulai dari pengajuan SP2D, validasi dokumen, persetujuan, hingga pencairan dana. Dengan adanya SK dan SOP resmi ini, implementasi SimPel SPaDu berjalan lebih tertib, terstruktur, dan memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga meningkatkan kepatuhan, akuntabilitas, serta kepercayaan seluruh stakeholder terhadap layanan SP2D yang terpadu.

Melalui strategi tersebut, proses penerbitan SP2D diharapkan dapat dipercepat dari rata-rata 2-5hari menjadi maksimal 2 hari kerja, keluhan dari OPD dapat ditekan hingga 80%, serta serapan anggaran daerah meningkat signifikan. Lebih dari itu, strategi ini akan menciptakan budaya kerja yang lebih transparan, kolaboratif, dan

berbasis teknologi di BPKAD Ogan Komering Ulu Timur, sejalan dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional.

2. Tahapan Proyek Perubahan

Setiap tahapan kegiatan memiliki arti penting karena mewakili kemajuan signifikan menuju pencapaian tujuan akhir. Tahapan kegiatan membantu dalam memantau kemajuan, menetapkan tanggung jawab, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam perubahan memiliki pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil. Tahapan kegiatan juga berfungsi sebagai penanda untuk merayakan pencapaian dan memotivasi tim untuk terus maju menuju tujuan akhir. Dengan mengidentifikasi dan merencanakan milestones dengan cermat, sebuah organisasi atau proyek dapat mengelola perubahan dengan lebih efektif dan efisien.

Tahapan kegiatan dari aksi perubahan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yakni tahapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Adapun tahapan-tahapan tersebut tertuang pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Tahapan Kegiatan Jangka Pendek

Minggu	Tahapan Strategis	Kegiatan Utama	Sub Kegiatan	Output yang Diharapkan	Pelaksana
A. Jangka Pendek (0-2 Bulan)					
1	Inisiasi Program & Pembentukan Tim	1) Sosialisasi awal proyek perubahan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan konsep proyek Presentasi ke pimpinan daerah Penyampaian tujuan & manfaat 	Nota persetujuan awal & dukungan pimpinan	Kepala BPKAD
		2) Pembentukan Tim Pelaksana Proyek	<ul style="list-style-type: none"> Penunjukan tim inti Pembagian peran & tanggung jawab Penyusunan SK Tim 	SK Tim Pelaksana Proyek	Kepala BPKAD
		3) Penyusunan rencana kerja	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun TOR kegiatan Menetapkan jadwal 2 bulan Menentukan indikator keberhasilan 	Rencana kerja proyek perubahan	Tim Perumus

2	Pengumpulan Data & Pemetaan Masalah	1. Identifikasi hambatan alur SP2D	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi proses berjalan • Catat kendala administrasi & teknis 	Dokumen peta alur kerja & baseline kinerja SP2D	Tim Analisis
		2. Mengukur rata-rata waktu penerbitan SP2D	<ul style="list-style-type: none"> • Rekap data penerbitan 1 tahun terakhir • Hitung rata-rata waktu proses 	Data baseline kinerja SP2D	Tim Evaluasi
		3. Wawancara stakeholder (OPD, Bank, internal)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan instrumen wawancara • Pelaksanaan wawancara • Analisis hasil wawancara 	Laporan hasil wawancara stakeholder	Tim Surveyor
3	Desain Awal Solusi & SOP Baru	1. Analisis data hasil minggu 2	<ul style="list-style-type: none"> • Mengolah hasil wawancara & observasi • Identifikasi bottleneck utama • Menyusun alternatif solusi 	Dokumen analisis masalah & rekomendasi awal	Tim Analisis
		2. Penyusunan draft desain solusi & SOP baru	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan alur kerja baru • Draft fitur aplikasi sederhana • Draft SOP percepatan SP2D 	Draft awal desain sistem & SOP	Tim Perumus
4	Review & Finalisasi Desain	1. FGD lintas pihak validasi desain	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan FGD • Diskusi & masukan • Dokumentasi hasil 	Dokumen SOP final & blueprint layanan	Tim Perumus, OPD, Bank
		2. Penyempurnaan desain aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi draft fitur • Konsultasi teknis dengan pengembang • Finalisasi desain fitur 	Desain aplikasi final siap dibuat prototipe	Tim IT BPKAD
5-6	Pengembangan Prototipe Layanan	1. Pembuatan prototipe aplikasi SP2D	<ul style="list-style-type: none"> • Desain database & dashboard • Integrasi tracking SP2D 	Prototipe layanan SP2D	Tim IT BPKAD
		2. Simulasi internal alur baru	<ul style="list-style-type: none"> • Uji simulasi internal • Identifikasi error teknis • Penyempurnaan modul pelaporan 	Laporan simulasi internal & daftar perbaikan	Tim IT & Monitoring
7-8	Pelatihan Awal & Uji Coba Terbatas	1. Pelatihan singkat petugas BPKAD & OPD	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan modul pelatihan • Pelaksanaan pelatihan • Evaluasi pelatihan 	Laporan pelatihan awal	Tim Trainer BPKAD

		2. Uji coba pada 3-5 OPD terpilih	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan OPD pilot project • Implementasi sistem terbatas • Evaluasi hasil uji coba 	Laporan uji coba awal & perbaikan fitur	Tim Uji Coba
		3. Monitoring respon & kendala teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Checklist monitoring • Pendampingan teknis • Penyusunan laporan hasil monitoring 	Laporan monitoring implementasi awal	Tim Monitoring & IT Support

Tabel 2.5 Tahapan Kegiatan Jangka Menengah

Minggu	Tahapan Strategis	Kegiatan Utama	Output yang Diharapkan	Pelaksana
B. Jangka Menengah (6 Bulan – 1 Tahun)				
1-8	Evaluasi & Perbaikan Awal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil uji coba sistem SP2D cepat. 2. Identifikasi kendala teknis & non-teknis. 3. Perbaikan sistem berdasarkan masukan pengguna. 	Sistem SP2D cepat diperbaiki sesuai feedback pengguna dan lebih stabil.	BPKAD (Bidang Perbendaharaan & Bidang Akuntansi), Tim IT, Vendor Aplikasi
9-16	Implementasi Penuh di BPKAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem di seluruh unit terkait di BPKAD. 2. Penyesuaian SOP mendukung proses digital. 3. Penetapan standar waktu layanan. 	SOP baru yang mendukung layanan SP2D cepat diterapkan penuh di internal BPKAD.	BPKAD, Bagian Organisasi, Tim IT
17-24	Integrasi Lintas Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi sistem dengan Bank Sumsel Babel dan pihak ketiga. 2. Uji sinkronisasi data dan keamanan. 3. Penyiapan backup sistem. 	Sistem terintegrasi dengan pihak eksternal dan berjalan aman, sinkron, serta andal.	BPKAD, Bank Sumsel Babel, Pihak Ketiga (Vendor IT), Dinas Kominfo
25-32	Sosialisasi & Pelatihan OPD (Bendahara Pengeluaran)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan penggunaan dashboard SP2D untuk seluruh OPD 	Seluruh OPD mampu mengakses dan memantau SP2D secara mandiri melalui dashboard.	BPKAD, Seluruh OPD, Bagian Organisasi, Dinas Kominfo

		2. Simulasi alur layanan dari pengajuan hingga pencairan.		
33–40	Monitoring & Penyesuaian Fitur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan performa layanan. 2. Pengumpulan feedback dari OPD dan bank. 3. Penyesuaian fitur dan tampilan dashboard. 	Dashboard SP2D memiliki tampilan dan fitur yang lebih user-friendly dan responsif.	BPKAD, Bank Sumsel Babel, OPD Percontohan, Tim IT
41–52	Optimalisasi & Ekspansi Fitur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi performa sistem. 2. Penambahan fitur seperti notifikasi otomatis dan laporan mingguan. 3. Persiapan tahap pengembangan selanjutnya. 	Layanan SP2D cepat, akurat, dan terpadu dengan fitur tambahan yang mempercepat pengambilan keputusan.	BPKAD, Dinas Kominfo, Vendor Aplikasi, Tim IT

Tabel 2.6 Tahapan Kegiatan Jangka Panjang

Minggu	Tahapan Strategis	Kegiatan Utama	Output yang Diharapkan	Pelaksana
C. Jangka Panjang (1 - 2 Tahun)				
53–60	Evaluasi Menyeluruh Implementasi Sistem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan audit kinerja sistem SP2D cepat. 2. Mengukur dampak terhadap waktu penerbitan dan kepuasan OPD. 3. Menyusun rekomendasi pengembangan lanjutan. 	Laporan evaluasi lengkap dan rekomendasi pengembangan.	BPKAD, Inspektorat Daerah, OPD terkait, Bank Sumsel Babel, Tim IT
61–72	Penguatan Integrasi Layanan Antar Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi penuh dengan sistem bank daerah dan mitra kerja. 2. Penyesuaian SOP bersama lintas instansi. 3. Penguatan kanal komunikasi digital. 	Sistem terintegrasi antar pihak secara penuh.	BPKAD, Bank Sumsel Babel, Dinas Kominfo, Seluruh OPD, Vendor IT

73–84	Pengembangan Fitur Lanjutan & Keamanan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan fitur analitik real-time serapan anggaran. 2. Peningkatan sistem keamanan & enkripsi data. 3. Pelatihan keamanan informasi untuk pengguna. 	Fitur lanjutan aktif dan keamanan data terjamin.	BPKAD, Dinas Kominfo, Tim IT, Vendor Aplikasi, Seluruh OPD
85–96	Replikasi & Ekspansi Layanan ke Level Lebih Luas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replikasi model ke kabupaten/kota lain (benchmarking). 2. Penyusunan panduan best practice. 3. Presentasi hasil ke forum nasional. 	Model SP2D cepat menjadi best practice nasional.	BPKAD, Pemprov Sumsel, Kementerian Dalam Negeri, LAN RI, Kabupaten/Kota lain

C. RENCANA STRATEGI MARKETING

1. Analisis *Stakeholder*

Dalam merencanakan strategi marketing untuk proyek perubahan ini, keterlibatan stakeholders, baik internal maupun eksternal, sangatlah penting untuk memastikan kesuksesan dan pencapaian tujuan yang diinginkan. Kolaborasi antara berbagai stakeholders ini akan memperkuat upaya marketing, memperluas jangkauan promosi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proyek perubahan ini, sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan optimal.

Adapun mengenai peran, hubungan, kepentingan, pengaruh dan strategi pengelolaan dari masing-masing *stakeholders* dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.7 Identifikasi *Stakeholders*

Stakeholder	Peran / Keterlibatan	Pengaruh	Kepentingan	Strategi Pengelolaan
BPKAD	Pengelola utama proses penerbitan SP2D	Tinggi	Tinggi	Optimalisasi SDM, peningkatan layanan dan SOP
OPD (Bendahara Pengeluaran)	Pengusul dan penerima dana melalui SP2D	Tinggi	Tinggi	Koordinasi pengajuan dan pelaporan yang jelas
Mitra Utama Internal	Unit atau bagian internal yang mendukung proses utama SP2D	Tinggi	Tinggi	Koordinasi internal, sinkronisasi proses dan data

Mitra Kerja (Penyedia Barang/Jasa)	Penyedia barang dan jasa untuk kebutuhan OPD dan Pemda	Rendah	Tinggi	Komunikasi kontraktual, monitoring kualitas dan waktu
Bank Sumsel Babel Cabang Martapura (Teller Bank)	Penyalur dana setelah SP2D diterbitkan	Tinggi	Rendah	Integrasi sistem dan komunikasi dengan BPKAD
Dinas Kominfo	Penyedia dan pengelola infrastruktur TI	Tinggi	Rendah	Support teknis dan pemeliharaan sistem
Inspektorat / Pengawas Internal	Pengawas kepatuhan prosedur dan penggunaan dana	Tinggi	Rendah	Audit berkala dan rekomendasi perbaikan
BPK / BPKP	Mengawasi tata kelola dan akuntabilitas proses SP2D	Tinggi	Rendah	Kolaborasi evaluasi dan pengawasan, tindak lanjut rekomendasi
Bupati dan Pemerintah Daerah	Penentu kebijakan dan dukungan anggaran	Tinggi	Tinggi	Dukungan kebijakan dan monitoring implementasi
Coach	Fasilitator pengembangan kemampuan SDM dan peningkatan kinerja	Tinggi	Rendah	Pelatihan, coaching individual/kelompok, monitoring perkembangan
Tim Kerja	Pelaksana teknis kolaborasi dan koordinasi percepatan SP2D	Tinggi	Tinggi	Rapat koordinasi rutin, pembagian tugas jelas, evaluasi hasil
Masyarakat	Mendapatkan dampak positif dari percepatan proses pencairan dana pemerintah	Rendah	Tinggi	Sosialisasi dan pelaporan kinerja secara terbuka
Media Lokal	Penyebar informasi dan pengawas publik	Rendah	Rendah	Komunikasi terbuka dan pemberitaan positif

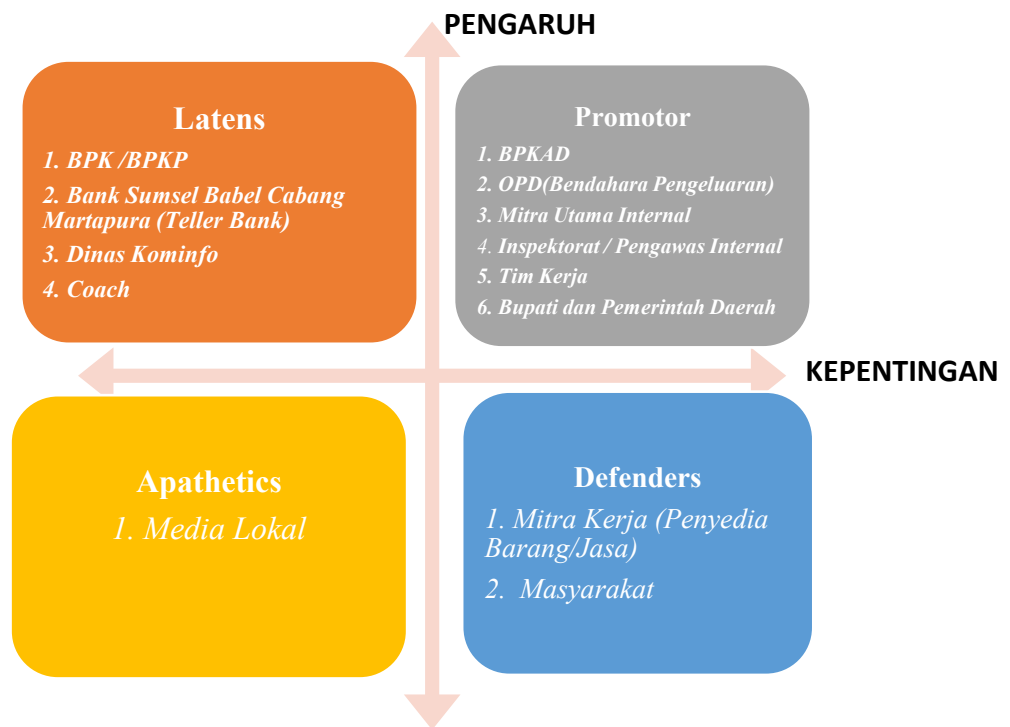
Selain perlu mengetahui peran, kepentingan, pengaruh dan strategi pengelolaan maka perlu mengelompokkan *stakeholder* berdasarkan tingkat pengaruh, kepentingan dan klasifikasi. Pengelompokan stakeholder dimaksud dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.8 Klasifikasi Stakeholders

No	Stakeholder	Pengaruh	Kepentingan	Klasifikasi
1	BPKAD	Tinggi	Tinggi	Promotor
2	OPD (Bendahara Pengeluaran)	Tinggi	Tinggi	Promotor

3	Mitra Utama Internal	Tinggi	Tinggi	Promotor
4	Mitra Kerja (Penyedia Barang/Jasa)	Rendah	Tinggi	Defenders
5	BPK /BPKP	Tinggi	Rendah	Latens
6	Bank Sumsel Babel Cabang Martapura (Teller Bank)	Tinggi	Rendah	Latens
7	Dinas Kominfo	Tinggi	Rendah	Latens
8	Inspektorat / Pengawas Internal	Tinggi	Rendah	Promotor
9	Bupati dan Pemerintah Daerah	Tinggi	Tinggi	Promotor
10	Coach	Tinggi	Rendah	Latens
11	Tim Kerja	Tinggi	Tinggi	Promotor
12	Masyarakat	Rendah	Tinggi	Defenders
13	Media Lokal	Rendah	Rendah	Apathetics

Untuk pengklasifikasian stakeholders melalui diagram, maka dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.2. Diagram Stakeholders

Setelah dilakukan identifikasi terhadap para stakeholder ini, diketahui bahwa belum semua stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang diinginkan oleh *Project Leader* dalam mewujudkan keberhasilannya. Oleh

karenanya perlu dirancang strategi marketing dalam mengomunikasikan proyek perubahan ini kepada semua stakeholder.

Peran stakeholder dalam keberhasilan proyek perubahan sangatlah penting sehingga strategi komunikasi kepada stakeholder harus dilakukan dengan baik. Hasil pemetaan stakeholder terdapat 4 kategorisasi stakeholder yaitu promotor, laten, defender dan apethetis yang perlu dipersiapkan strategi komunikasinya. Adapun strategi komunikasi yang dilakukan yaitu :

1) Strategi komunikasi stakeholder pada kategori promotor

Para stakeholder dalam kelompok ini akan dikelola secara intensif (*manage closely*) karena mereka memegang peranan krusial dalam kesuksesan proyek perubahan. Stakeholder yang termasuk dalam kategori ini biasanya adalah stakeholder internal. Strategi komunikasi yang diterapkan meliputi penyelenggaraan rapat mingguan untuk memberikan pembaruan tentang kemajuan proyek, menggunakan kesempatan rapat rutin reformasi birokrasi untuk sosialisasi, serta memanfaatkan pertemuan non-formal seperti waktu istirahat atau setelah jam kerja untuk menyampaikan informasi terkait proyek. Selain itu, membangun hubungan interpersonal yang baik dengan menyediakan data yang dibutuhkan oleh stakeholder juga penting untuk menciptakan hubungan timbal balik.

2) Strategi komunikasi stakeholder pada kategori laten

Stakeholder dalam kategori ini akan menerima informasi dan advokasi tentang bagaimana proyek perubahan bisa bermanfaat bagi mereka. Kontak yang dilakukan harus menunjukkan dampak positif proyek terhadap isu yang mereka pedulikan (*keep satisfied*). Komunikasi dilakukan melalui FGD atau pertemuan untuk mensosialisasikan keuntungan dari proyek perubahan, memberikan contoh konkret pemanfaatan data yang mendukung peningkatan Pengembangan Inovasi Daerah. dan kapasitas SDM di instansi mereka, serta melakukan pendekatan personal kepada pemimpin stakeholder.

3) Strategi komunikasi stakeholder pada kategori defender

Stakeholder ini akan terus dijaga hubungannya dengan diberikan informasi terkini tentang perkembangan proyek perubahan (*keep informed*). Strategi komunikasi melibatkan penyampaian ide-ide perubahan melalui publikasi jurnal ilmiah yang dapat diakses oleh stakeholder dan berbagi materi terkait proyek perubahan melalui email dan platform media lainnya.

4) Strategi komunikasi stakeholder pada kategori apathetic

Untuk kelompok ini, meskipun tidak membutuhkan strategi khusus, mereka tetap bisa dilibatkan sesekali dengan memberikan informasi dan melakukan monitoring (monitor). Komunikasi dilakukan dengan mensosialisasikan ide-ide proyek perubahan dan aktivitas yang terkait melalui media sosial, serta terus memantau respons mereka terhadap inisiatif yang diusulkan.

2. Pemanfaatan Sumberdaya Organisasi

Keberhasilan suatu inovasi dalam pelayanan publik, termasuk proyek SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat, Akurat dan Terpadu), sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya organisasi secara optimal. Sumber daya organisasi mencakup SDM, teknologi, informasi, anggaran, dan jaringan kerja sama antar unit, yang bila dikelola secara sinergis dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan.

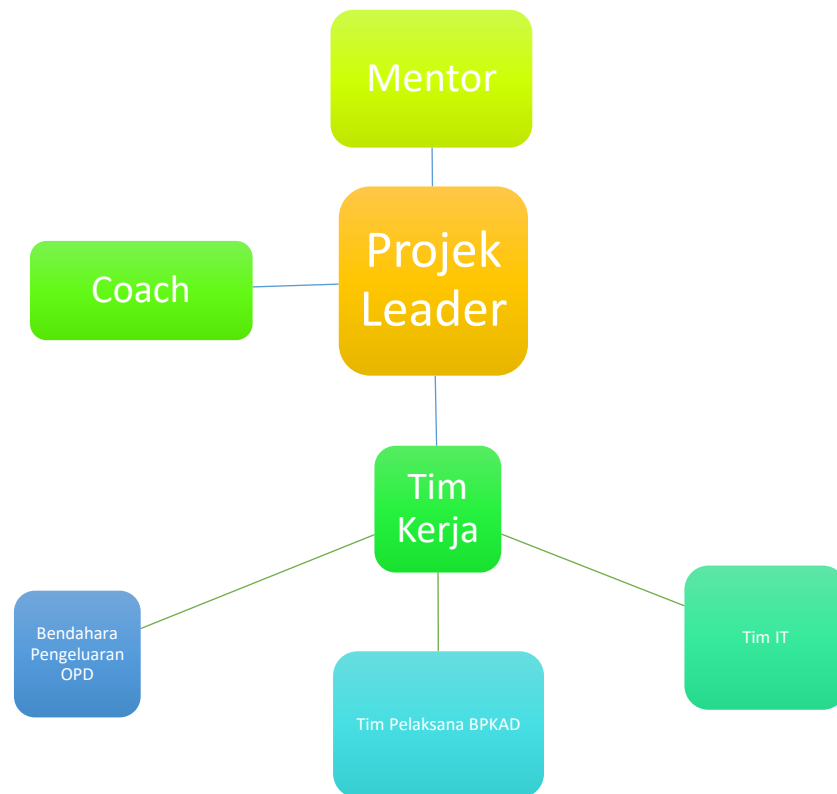
Di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sumber daya organisasi yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan secara terpadu, sehingga proses penerbitan SP2D masih berjalan lambat, bergantung pada komunikasi manual, dan kurang transparan. Inovasi SimPel SPaDu hadir untuk mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya organisasi:

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) – Memaksimalkan kompetensi pegawai melalui pelatihan, sertifikasi, dan pemanfaatan kemampuan teknis untuk operasional sistem.
- 2) Teknologi dan Sistem Informasi – Membangun platform digital terintegrasi yang memungkinkan pemantauan real-time dan validasi otomatis dokumen.

- 3) Anggaran dan Sarana Prasarana – Mengoptimalkan alokasi anggaran dan fasilitas yang sudah tersedia untuk mendukung kelancaran proses SP2D.
- 4) Jaringan Kerja Sama Antar Unit – Menjalin koordinasi lintas OPD (Bendahara Pengeluaran), BPKAD, Bank, dan mitra kerja untuk mempercepat proses dan meningkatkan akuntabilitas.

Dengan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, inovasi ini tidak hanya mempercepat proses pencairan dana, tetapi juga membangun budaya kerja yang kolaboratif, transparan, dan berbasis teknologi. Hal ini selaras dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendukung arah kebijakan reformasi birokrasi nasional.

Pengelolaan sumber daya merupakan aspek penting dalam proyek perubahan. Dengan adanya pengelolaan sumber daya ini, diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan rencana pemanfaatan sumber daya organisasi yang terdiri dari: Mentor, *Coach*, *Stakeholders* Eksternal, dan Tim Kerja yang terdiri dari Bendahara Pengeluaran OPD, Tim Pelaksana BPKAD dan Tim IT. *Project leader* berkonsultasi dengan mentor untuk mendapatkan masukan terkait pelaksanaan aksi perubahan. Dengan hasil bimbingan dengan *Coach* terhadap penyusunan kelanjutan aksi perubahan, maka *project leader* akan berkoordinasi dan memberi arahan kepada tim kerja/efektif serta berkoordinasi dengan *stakeholders* yang secara struktur dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.3. Struktur Organisasi Aksi Perubahan

Pemanfaatan sumber daya organisasi merupakan aspek krusial dalam memastikan keberhasilan proyek perubahan *SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat, Akurat dan Terpadu)*. Keberhasilan inovasi ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada struktur organisasi yang jelas, perencanaan yang matang, pengendalian yang efektif, manajemen komunikasi yang terbuka, serta pengelolaan risiko dan evaluasi secara konsisten. Untuk mencapai perubahan yang diinginkan, penting untuk mengelola proyek perubahan ini terorganisir dengan baik. Untuk itu, diperlukan pembagian tugas yang lebih spesifik dan terperinci. Struktur pengorganisasian proyek ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9 Struktur Organisasi Proyek

Jabatan	Peran dan Tanggung Jawab
Sponsor Proyek	Bupati / Kepala Daerah sebagai pemberi dukungan dan otorisasi strategis proyek.

Steering Committee	Tim pengarah yang terdiri dari pimpinan BPKAD, OPD (Bendahara Pengeluaran) terkait, Inspektorat, dan Dinas Kominfo, bertugas memberikan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis.
Project Manager	Kepala BPKAD atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab operasional pelaksanaan proyek, memastikan pelaksanaan sesuai rencana dan target.
Tim Kerja / Tim Efektif	Pelaksana teknis yang bertugas menjalankan aktivitas proyek sehari-hari, meliputi pengembangan sistem, pelatihan, koordinasi antar unit, dan monitoring progres.
Mentor dan Coach	Pendamping yang memberikan bimbingan teknis, coaching SDM, dan evaluasi proses perubahan.
Pengawas Internal	Inspektorat dan BPK / BPKP yang melakukan pengawasan, audit, dan evaluasi kepatuhan proses.

3. Strategi Marketing Mix 4P plus Customer (4P+1C)

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pencairan dana pemerintah daerah, BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melaksanakan rancangan proyek perubahan yang berfokus pada sinergi pelayanan SP2D yang cepat, akurat dan terpadu. Untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek ini, strategi marketing dengan pendekatan *Marketing Mix 4P plus Customer (4P+1C)* diterapkan secara menyeluruh.

a. *Product (Produk)*

Produk utama yang direncanakan adalah “SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat, Akurat, dan Terpadu)”, sebuah layanan digital untuk memantau status SP2D secara real-time, dengan SOP terstandarisasi dan tim kerja yang efektif.

Saat ini sistem masih dalam tahap perencanaan dan membutuhkan dukungan berbagai pihak, antara lain:

- Pimpinan daerah untuk dukungan kebijakan,
- Dinas Kominfo untuk dukungan dalam pengembangan teknologi,
- OPD (Bendahara Pengeluaran), pengusul untuk kepatuhan dokumen,
- Bank penyalur untuk integrasi layanan,
- Inspektorat untuk pengawasan akuntabilitas.

Dengan dukungan tersebut, *SimPel SPaDu* akan menjadi solusi terpadu yang meningkatkan **efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas** pengelolaan keuangan daerah.

b. Price (Harga / Biaya)

Pelaksanaan rancangan proyek ini menggunakan alokasi anggaran pemerintah daerah sehingga tidak membebani OPD (Bendahara Pengeluaran) maupun masyarakat secara langsung. Selain itu, dengan adanya proses yang lebih efisien dan cepat, proyek ini diharapkan mengurangi biaya operasional dan potensi kerugian akibat keterlambatan pencairan dana. Dengan kata lain, proyek ini menawarkan nilai tambah berupa efisiensi waktu dan sumber daya yang signifikan.

c. Place (Tempat / Distribusi)

Rancangan strategi pelayanan SP2D yang cepat, akurat, dan terpadu akan dilakukan di lingkungan BPKAD dan OPD (Bendahara Pengeluaran) terkait, dengan dukungan platform digital internal yang dirancang dapat diakses secara luas oleh stakeholder.

Penyampaian informasi mengenai proyek dan perkembangan pelaksanaannya direncanakan melalui berbagai saluran komunikasi resmi, seperti rapat koordinasi, workshop, serta media komunikasi digital (email dan website resmi pemerintah daerah).

Melalui strategi ini diharapkan ke depan tersedia akses informasi yang mudah, transparan, dan merata bagi seluruh stakeholder.

d. Promotion (Promosi / Komunikasi)

Kegiatan promosi rancangan proyek perubahan direncanakan difokuskan pada lingkup OPD (Bendahara Pengeluaran) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Timur untuk membangun kesadaran dan dukungan internal. Sosialisasi akan dilakukan melalui forum rapat koordinasi, workshop, dan pelatihan teknis bagi operator keuangan OPD (Bendahara Pengeluaran).

Selain itu, penyebaran informasi juga direncanakan menggunakan brosur internal, materi presentasi, dan grup komunikasi resmi antar- OPD (Bendahara Pengeluaran), sehingga memudahkan pertukaran informasi. Website resmi BPKAD serta kanal komunikasi digital OPD (Bendahara Pengeluaran) dapat dimanfaatkan untuk memperkuat transparansi dan membuka ruang umpan balik dari pengguna.

Dengan pendekatan ini, diharapkan OPD (Bendahara Pengeluaran) sebagai pengguna utama dapat memahami, mendukung, dan ikut berperan aktif dalam keberhasilan rancangan proyek *SimPel SPaDu*.

e. *Customer* (Pelanggan / Stakeholder)

Pelanggan utama rancangan proyek ini OPD (Bendahara Pengeluaran) sebagai pengusul dan penerima dana, BPKAD sebagai pengelola utama, mitra kerja internal, serta stakeholder pendukung lainnya seperti pemerintah daerah, inspektorat, dan masyarakat. Kebutuhan mereka adalah proses pencairan dana yang cepat, transparan, dan mudah dipantau. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang dilakukan mengutamakan pelatihan penggunaan sistem, penyediaan akses mudah, serta keterlibatan aktif melalui forum diskusi dan monitoring progres. Dengan cara ini, stakeholder merasa didukung, dilibatkan, dan memiliki rasa kepemilikan atas keberhasilan proyek.

Melalui penerapan strategi *marketing mix 4P plus customer* ini, proyek perubahan “SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat, Akurat dan Terpadu)” diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan keuangan pemerintah daerah, memperkuat kolaborasi antarunit, dan membangun kepercayaan seluruh stakeholder serta masyarakat. Keberhasilan proyek ini juga akan menjadi pondasi bagi pengembangan inovasi pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.

D. MATA PELATIHAN PILIHAN PENDUKUNG PROYEK PERUBAHAN

1. Komunikasi Organisasi

Pelatihan Komunikasi Organisasi dirancang sebagai salah satu pendukung utama keberhasilan proyek perubahan “SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat, Akurat dan Terpadu)” di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi efektif antar unit kerja dan seluruh stakeholder terkait, sehingga memperkuat kolaborasi dan memperlancar koordinasi dalam pelaksanaan proyek.

Peserta pelatihan terdiri dari Tim Kerja Proyek, Koordinator OPD (Bendahara Pengeluaran), Mitra Utama Internal, staf komunikasi, serta pihak

lain yang terlibat langsung dalam proses koordinasi dan implementasi percepatan SP2D. Dengan durasi selama dua hari, pelatihan akan menggunakan metode workshop interaktif, role play, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi situasi komunikasi nyata yang relevan.

Materi utama yang disampaikan meliputi prinsip komunikasi efektif dalam organisasi, teknik komunikasi interpersonal dan lintas unit, strategi komunikasi dalam menghadapi perubahan organisasi, manajemen konflik dan negosiasi, serta pemanfaatan media komunikasi internal seperti email, grup chat, dan rapat daring. Peserta juga akan dilatih untuk menyusun pesan yang jelas dan memberikan feedback konstruktif yang dapat meningkatkan proses kerja bersama.

Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta mampu melakukan komunikasi yang terbuka, jelas, dan konstruktif sehingga tercipta budaya komunikasi yang mendukung kolaborasi serta penyelesaian masalah secara efektif. Selain itu, keterampilan dalam menyampaikan pesan perubahan dan menerima masukan juga akan meningkat, sehingga menjadi modal penting dalam menjalankan proyek perubahan dengan sukses.

Pelatihan akan difasilitasi oleh praktisi komunikasi organisasi berpengalaman, mentor proyek, atau trainer yang memiliki kompetensi dalam bidang komunikasi dan manajemen perubahan. Evaluasi efektivitas pelatihan dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi praktik role play, serta pengumpulan feedback peserta.

Dengan adanya pelatihan komunikasi organisasi ini, BPKAD Ogan Komerling Ulu Timur berharap dapat memperkuat Strategiantar unit dan stakeholder, sehingga “SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat, Akurat dan Terpadu)” dapat terwujud secara optimal dengan dukungan komunikasi yang efektif dan profesional.

2. Manajemen Pemerintahan

Pelatihan Manajemen Pemerintahan dirancang sebagai salah satu pendukung strategis dalam keberhasilan proyek perubahan Strategipelayanan SP2D yang cepat, akurat dan terpadu di BPKAD Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta

mengenai prinsip-prinsip dan praktik manajemen pemerintahan yang efektif, yang sangat penting dalam menjalankan perubahan organisasi dan peningkatan pelayanan publik.

Peserta pelatihan terdiri dari pejabat dan staf BPKAD, OPD (Bendahara Pengeluaran) terkait, Tim Kerja, serta pengambil keputusan lainnya yang berperan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan durasi selama tiga hari, pelatihan menggunakan metode seminar, studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, serta simulasi pengambilan keputusan untuk memberikan pengalaman belajar yang komprehensif dan aplikatif.

Materi utama yang disampaikan mencakup konsep dasar dan prinsip manajemen pemerintahan yang baik, peran dan fungsi birokrasi dalam pelayanan publik, manajemen proyek dan perubahan dalam konteks pemerintahan, tata kelola yang transparan dan akuntabel, pengambilan keputusan, kepemimpinan di sektor publik, serta strategi pengelolaan sumber daya dan peningkatan kinerja organisasi.

Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta mampu mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan proyek “SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat, Akurat dan Terpadu)”, serta meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan dan kepemimpinan yang efektif di lingkungan pemerintah daerah. Peningkatan kompetensi ini diharapkan dapat mendorong perubahan yang lebih terstruktur, transparan, dan berorientasi hasil.

Pelatihan difasilitasi oleh praktisi manajemen pemerintahan, akademisi, dan pelatih yang berpengalaman di sektor publik. Evaluasi efektivitas pelatihan dilakukan melalui pre-test dan post-test, diskusi reflektif, serta evaluasi penerapan hasil pelatihan di tempat kerja peserta.

Dengan pelatihan manajemen pemerintahan ini, BPKAD Ogan Komering Ulu Timur berharap memperkuat fondasi kepemimpinan dan tata kelola dalam mendukung percepatan pencairan dana serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan akuntabel.

3. Statistik Dan Metode Penelitian

Pelatihan Statistik dan Metode Penelitian disusun sebagai salah satu pendukung penting dalam keberhasilan proyek perubahan “SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat, Akurat dan Terpadu)” di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola data secara akurat dan sistematis guna mendukung proses monitoring dan evaluasi proyek.

Peserta pelatihan terdiri dari Tim Monitoring dan Evaluasi Proyek, staf IT, serta anggota Tim Kerja yang bertanggung jawab atas pengolahan data dan pelaporan hasil proyek. Dengan durasi selama tiga hari, pelatihan ini menerapkan metode praktik langsung, studi kasus, analisis data menggunakan perangkat lunak statistik, dan diskusi kelompok agar peserta dapat memahami serta mengaplikasikan teknik pengolahan data secara efektif.

Materi yang diberikan mencakup dasar-dasar statistik deskriptif dan inferensial, teknik pengumpulan data yang valid dan reliabel, serta metode penelitian kuantitatif dan kualitatif yang relevan untuk evaluasi proyek perubahan. Selain itu, peserta dilatih untuk mengolah dan menganalisis data menggunakan software statistik seperti SPSS, Excel, atau perangkat lunak open source, serta bagaimana menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk menyusun laporan yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta mampu melakukan pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis dan akurat, meningkatkan kapasitas analisis data untuk evaluasi proyek secara objektif, serta menghasilkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dapat menjadi dasar kebijakan dan tindak lanjut proyek.

Pelatihan difasilitasi oleh praktisi statistik, peneliti, atau akademisi yang memiliki keahlian dalam metode penelitian dan analisis data. Evaluasi efektivitas pelatihan dilakukan melalui pre-test dan post-test, tugas analisis data, serta presentasi hasil evaluasi oleh peserta sebagai bentuk pengukuran pemahaman dan kemampuan aplikatif.

Dengan adanya pelatihan Statistik dan Metode Penelitian ini, BPKAD Ogan Komering Ulu Timur berharap mampu memperkuat pengelolaan data dan

informasi sebagai fondasi penting dalam mendukung keberhasilan percepatan pencairan dana dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

E. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Rencana pengembangan kompetensi ini merupakan bagian integral dari rancangan proyek perubahan SimPel SPaDu yang bertujuan untuk mempercepat, menyederhanakan, serta meningkatkan akurasi dalam penerbitan SP2D. Tabel yang disusun mencerminkan strategi sistematis untuk meningkatkan kapasitas seluruh pihak terdampak, mulai dari BPKAD sebagai leading sector, 54 OPD (Bendahara Pengeluaran), perbankan mitra, hingga stakeholder eksternal.

Setiap aspek pengembangan diarahkan untuk menjawab tantangan yang selama ini dihadapi, seperti kurangnya koordinasi lintas instansi, keterlambatan proses administrasi, serta resistensi terhadap penerapan sistem digital baru. Oleh karena itu, kegiatan yang direncanakan tidak hanya bersifat teknis, seperti pelatihan penggunaan aplikasi dan penyusunan SOP, tetapi juga strategis, melalui forum koordinasi lintas pihak, workshop kolaborasi digital, serta sosialisasi manfaat inovasi untuk membangun penerimaan bersama.

Dengan rancangan yang berjenjang dan terjadwal, diharapkan transformasi menuju pelayanan SP2D digital dapat berlangsung secara bertahap, terukur, dan memberikan ruang adaptasi yang memadai bagi semua

Langkah - langkah yang dapat diambil dalam rencana pengembangan kompetensi ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10 Program Pengembangan Kompetensi

No	Pihak Terdampak	Kompetensi yang Ditingkatkan	Metode / Kegiatan	Waktu
1	BPKAD, OPD (Bendahara Pengeluaran), Bank, Mitra Kerja	Komunikasi & koordinasi lintas instansi	Kick-off meeting lintas instansi, pembentukan tim strategi SP2D	Minggu ke-2 & ke-4
2	BPKAD	Pemahaman & pengoperasian aplikasi	Pelatihan teknis, uji coba sistem SimPel SPaDu	Minggu ke-6 & ke-8
3	BPKAD & OPD (Bendahara Pengeluaran)	Kecepatan & akurasi penerbitan SP2D	Penyusunan SOP, simulasi penerbitan ≤ 2 hari, uji kelayakan input data	Minggu ke-9 s.d. ke-16

4	BPKAD & OPD (Bendahara Pengeluaran)	Budaya kerja digital & kolaboratif	Workshop kolaborasi digital, implementasi kanal komunikasi resmi	Minggu ke-17 & ke-20
5	Seluruh Pegawai & Mitra Kerja	Penerimaan perubahan (mengurangi resistensi)	Sosialisasi manfaat inovasi, survei persepsi & kepuasan	Minggu ke-21 & ke-24

Melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi yang terencana ini, diharapkan tercapai peningkatan nyata pada aspek komunikasi organisasi, kecepatan dan akurasi layanan, serta penerapan budaya kerja digital yang kolaboratif. Dukungan dan partisipasi seluruh pihak akan menjadi kunci keberhasilan implementasi SimPel SPaDu, sehingga tujuan percepatan pelayanan SP2D yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

F. PENILAIAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN DIRI

1. Penilaian Potensi

Berdasarkan hasil assessment diri pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025, nilai rata-rata sikap perilaku peserta adalah 8.90 dengan kualifikasi Baik. Nilai ini menggambarkan profil kepemimpinan yang solid, dengan kekuatan utama terletak pada aspek Integritas yang mencapai rata-rata 9.13 dengan kualifikasi Istimewa. Hal ini menunjukkan bahwa peserta memiliki tingkat tanggung jawab, komitmen, kedisiplinan, kejujuran, konsistensi, serta kemampuan dalam mengambil keputusan dilematis yang sangat baik dan konsisten ditunjukkan dalam setiap aktivitas kepemimpinan.

Aspek Kerjasama memperoleh rata-rata nilai 8.78 dengan kualifikasi Baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa kemampuan peserta dalam membangun kerjasama internal maupun eksternal, komunikasi, fleksibilitas, serta komitmen dalam tim sudah baik, namun masih dapat ditingkatkan terutama dalam memperkuat jejaring kolaborasi lintas instansi dan pengelolaan hubungan eksternal.

Selanjutnya, aspek Mengelola Perubahan juga berada pada rata-rata 8.78 dengan kualifikasi Baik. Nilai ini mencerminkan bahwa peserta memiliki orientasi pelayanan, kemampuan beradaptasi, inisiatif, serta orientasi pada hasil yang baik. Meskipun demikian, peningkatan kompetensi tetap diperlukan agar mampu mengelola perubahan secara lebih efektif, terutama di era transformasi digital dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Tabel 2.11 Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR PKN TK. II ANGGARAN XXI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025					
Nama	: Agustian Pahrimale, S.H., M.H.	Nama Mentor	: Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M.		
NIP	: 19730815 199903 1 008	NIP	: -		
Jabatan	: Kepala Badan	Jabatan	: Bupati		
Instansi	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Instansi	: Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur		
Program	: Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025				

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9,2	9,3	9,27	Istimewa
	Komitmen	9	9,1	9,07	Istimewa
	Kedisiplinan	9,1	9,2	9,17	Istimewa
	Kejujuran	9,1	9,2	9,17	Istimewa
	Konsistensi	9,2	9,3	9,27	Istimewa
	Pengambilan Keputusan	9,2	9,3	9,27	Istimewa
	Rata-Rata	9,13	9,23	9,20	Istimewa
Kerjasama	Kerjasama Internal	8,8	8,9	8,87	Baik
	Kerjasama Eksternal	8,7	8,9	8,84	Baik
	Komunikasi	8,8	8,9	8,87	Baik
	Flexibilitas	8,8	8,9	8,87	Baik
	Komitmen dalam Tim	8,8	8,9	8,87	Baik
	Rata-Rata	8,78	8,90	8,86	Baik
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8,7	8,9	8,84	Baik
	Adaptabilitas	8,8	8,9	8,87	Baik
	Pengembangan orang lain	8,8	8,9	8,87	Baik
	Orientasi pada hasil	8,8	8,9	8,87	Baik
	Inisiatif	8,8	8,9	8,87	Baik
	Rata-Rata	8,78	8,90	8,86	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,90	9,01	8,98	Baik

Keterangan Kualifikasi
 9,99-10 Istimewa
 7-8,99 Baik
 5-6,99 Cukup
 3-4,99 Kurang
 1-2,99 Sangat Kurang

Secara keseluruhan, hasil assessment diri ini menggambarkan bahwa peserta memiliki integritas yang sangat kuat sebagai fondasi kepemimpinan, serta kompetensi kerjasama dan kemampuan mengelola perubahan yang baik dan masih berpotensi untuk ditingkatkan. Temuan ini menjadi dasar penting dalam mendukung implementasi proyek perubahan SimPel SPaDu, yang menekankan pada percepatan layanan, transparansi, serta penguatan koordinasi lintas pihak.

2. Pengembangan Potensi Diri

Rencana pengembangan ini disusun sebagai upaya untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan dan mendukung keberhasilan implementasi proyek perubahan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam membangun kerjasama eksternal serta orientasi pelayanan publik yang lebih prima. Melalui kegiatan pelatihan, pembentukan forum koordinasi, penyusunan SOP, dan survei kepuasan, diharapkan tercipta budaya kerja yang kolaboratif, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

Adapun rincian rencana pengembangan diri tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Pengembangan Potensi Diri

No	Aspek Pengembangan	Kegiatan	Target Waktu	Indikator Keberhasilan
1	Kerjasama Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti pelatihan kolaborasi lintas instansi Membangun forum koordinasi eksternal rutin 	6 bulan	Tingkat partisipasi stakeholder eksternal meningkat $\geq 90\%$ dan terbentuk minimal 1 kerja sama baru

		<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin MoU/kerja sama strategis dengan mitra 		
2	Orientasi Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pelatihan pelayanan publik prima • Menyusun SOP layanan berbasis kebutuhan pengguna • Melaksanakan survei kepuasan layanan secara berkala 	6–12 bulan	Nilai kepuasan pengguna layanan $\geq 90\%$ dan SOP pelayanan baru terimplementasi

Melalui rencana pengembangan potensi diri ini, diharapkan peningkatan kompetensi pada aspek kerjasama eksternal dan orientasi pelayanan dapat memperkuat keberhasilan rancangan proyek perubahan SimPel SPaDu. Penguatan kolaborasi lintas pihak serta fokus pada kualitas layanan publik akan menjadi landasan penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih cepat, akurat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan stakeholder.

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. CAPAIAN HASIL PERUBAHAN TERHADAP RENCANA PERUBAHAN

1. Keterkaitan Capaian dengan Asta Cita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Capaian hasil proyek perubahan SimPel SPaDu sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya:

- 1) **Asta Cita ke-4:** Pemerintahan Efektif, Bersih, dan Melayani, melalui penerapan sistem layanan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada percepatan pelayanan publik berbasis digital. Inovasi ini mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan, memperkuat akuntabilitas fiskal, dan meningkatkan efisiensi birokrasi daerah.
- 2) **Asta Cita ke-6:** Transformasi Digital dan Ekonomi Berbasis Inovasi, karena SimPel SPaDu mengedepankan digitalisasi proses bisnis keuangan daerah, sekaligus menumbuhkan budaya kerja baru yang berbasis data, kolaboratif, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi.
- 3) **Asta Cita ke-8:** Pemerintahan Daerah yang Kuat dan Sinergis, melalui kolaborasi antara BPKAD, OPD, dan mitra eksternal seperti perbankan daerah serta Dinas Kominfo. Sinergi ini mencerminkan model tata kelola pemerintahan daerah yang harmonis, transparan, dan berorientasi pada hasil.

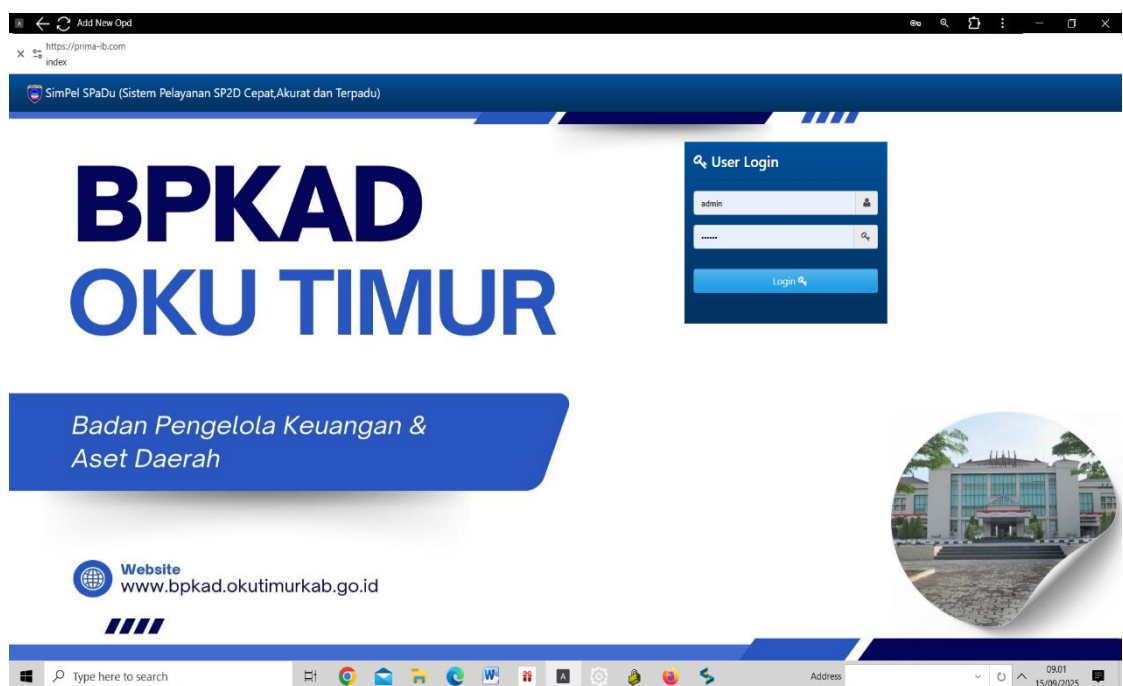
Selain mendukung Asta Cita, proyek perubahan ini juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), antara lain:

- 1) **Tujuan 16 (Peace, Justice and Strong Institutions):** memperkuat institusi publik yang transparan, akuntabel, dan efektif melalui digitalisasi sistem SP2D dan keterbukaan informasi publik.
- 2) **Tujuan 9 (Industry, Innovation and Infrastructure):** mengembangkan infrastruktur digital dan inovasi pelayanan publik di bidang keuangan daerah.
- 3) **Tujuan 8 (Decent Work and Economic Growth):** meningkatkan efisiensi realisasi anggaran daerah dan memperlancar perputaran ekonomi melalui percepatan pencairan dana publik.

- 4) **Tujuan 17 (Partnerships for the Goals):** memperkuat kemitraan lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat pengguna layanan publik untuk mencapai tata kelola yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pelaksanaan proyek perubahan SimPel SPaDu bukan hanya memenuhi target reformasi birokrasi internal, tetapi juga menjadi bagian integral dari agenda nasional dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan inklusif sesuai dengan semangat **Asta Cita dan SDGs 2030**.

2. Gambaran Singkat Aplikasi SimPel SPaDu



Gambar 3.1 Tampilan Halaman Depan

Aplikasi SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat, Akurat dan Terpadu) adalah inovasi digital yang dikembangkan oleh BPKAD OKU Timur untuk meningkatkan efektivitas layanan keuangan daerah, khususnya pada proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

a) Keunggulan SimPel SPaDu

1) Bisa diakses dimana saja

Keunggulan utama dari SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat, Akurat, dan Terpadu) adalah **kemampuannya diakses secara fleksibel dari**

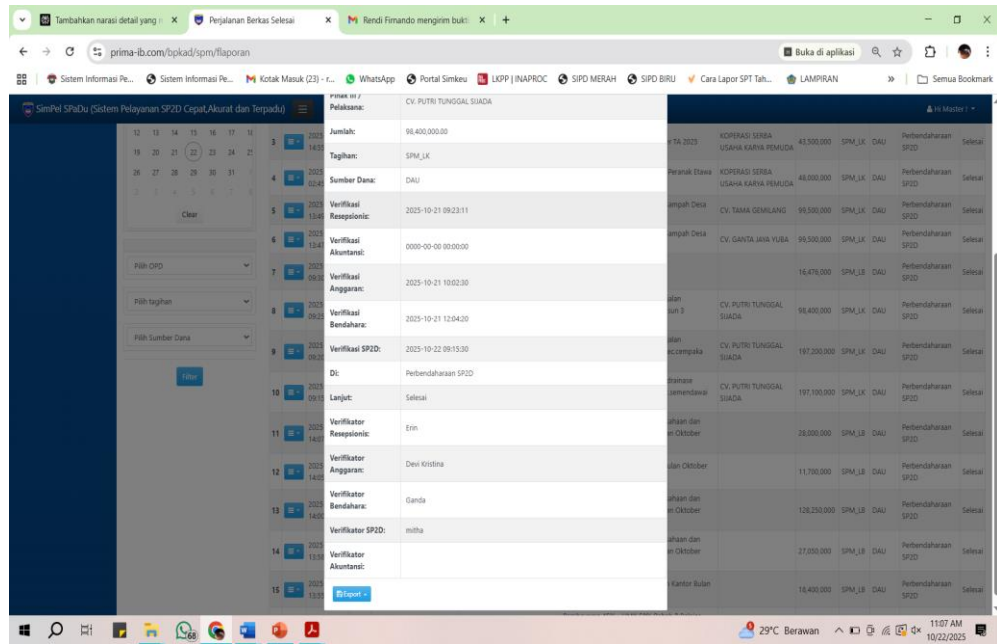
mana saja tanpa batasan waktu. Hal ini memungkinkan para pengguna di OPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk melakukan proses pemantauan dokumen SP2D secara online kapan saja sesuai kebutuhan. Akses yang tidak terbatas oleh lokasi dan waktu ini memberikan kemudahan serta mempercepat pelayanan administrasi keuangan yang selama ini memerlukan prosedur manual dan tatap muka. Dengan SimPel SPaDu, efisiensi dan transparansi tata kelola dokumen keuangan semakin meningkat secara signifikan.

2) **Pemangkasan birokrasi**

Implementasi SimPel SPaDu menghapus prosedural berulang yang sering terjadi karena pengolahan dokumen secara manual. Hal ini mengurangi kebutuhan intervensi berlapis antara OPD, resepsionis, anggaran, dan perbendaharaan. Data yang tersentralisasi mengurangi peluang kesalahan dan mempercepat respons layanan publik.

3) **Durasi proses yang tercatat**

Semua tahapan pengajuan, penerimaan berkas oleh resepsionis, validasi anggaran, hingga verifikasi oleh perbendaharaan dicatat secara otomatis dalam log sistem dengan waktu maksimal sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan (Verifikasi dan Validasi Dokumen maksimal 1 (satu) hari kerja, Persetujuan SP2D maksimal 1 (satu) hari kerja (paralel), Penerbitan dan Distribusi SP2D maksimal 0.5 (setengah) hari kerja dan Pencairan Dana oleh Bank maksimal 0.5 (setengah) hari kerja).



Gambar 3.2 Tampilan Durasi Proses

Sebagai contoh, berdasarkan hasil pencatatan waktu dalam aplikasi SimPel SPaDu, dapat diketahui alur waktu proses penerbitan SP2D pada tanggal 21–22 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- Resepsionis dilakukan pada pukul 09:23:11 WIB, kemudian dilanjutkan ke tahap Bidang Anggaran pada pukul 10:02:30 WIB, sehingga memerlukan waktu sekitar 39 menit.

Waktu ini menunjukkan kecepatan pelayanan awal dalam proses penerimaan dan pengecekan kelengkapan berkas oleh petugas resepsionis sebelum diteruskan ke bidang teknis.

- Selanjutnya, dari Bidang Anggaran ke Bidang Perbendaharan (Verifikasi Bendahara) berlangsung mulai pukul 10:02:30 WIB hingga 12:04:20 WIB, dengan durasi sekitar 121 menit (2 jam 1 menit).

Tahapan ini mencerminkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan telaah terhadap ketersediaan anggaran, kesesuaian akun belanja, dan keabsahan dokumen SPM.

- Proses berikutnya, dari Bidang Perbendaharan (Verifikasi Bendahara) menuju Bidang Perbendaharan (Verifikasi SP2D), terjadi pada 21 Oktober 2025 pukul 12:04:20 WIB dan selesai pada 22 Oktober 2025

pukul 09:15:30 WIB, dengan rentang waktu sekitar 1.271 menit atau 21 jam 11 menit.

Waktu ini mencakup tahapan finalisasi, validasi data, serta proses penandatanganan SP2D oleh pejabat yang berwenang.

- Secara keseluruhan, total waktu yang dibutuhkan sejak tahap Resepsionis hingga SP2D diterbitkan adalah sekitar 1.431 menit atau 23 jam 51 menit.

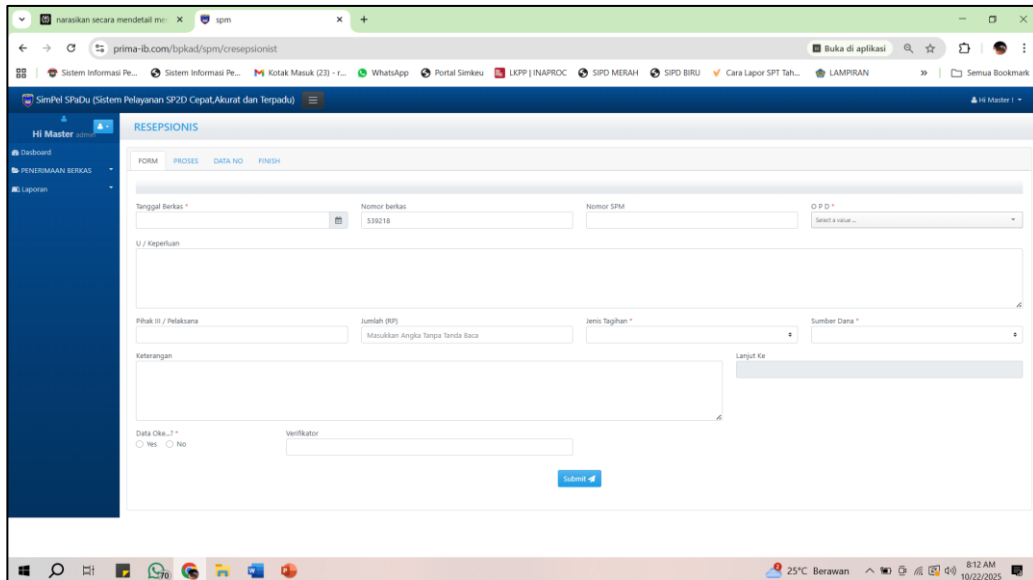
Durasi ini menunjukkan bahwa dengan penerapan sistem SimPel SPaDu, seluruh proses penerbitan SP2D dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 24 jam. Hal ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses manual sebelumnya yang dapat memakan waktu 2–5 hari kerja, karena masih dilakukan bergantung pada koordinasi antar bidang secara langsung.

Dengan demikian, penerapan SimPel SPaDu telah memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi waktu kerja, transparansi proses, dan percepatan pelayanan keuangan daerah, sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi dan prinsip pelayanan publik yang efektif, efisien, serta akuntabel. Hal ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap lama perjalanan berkas SP2D, sehingga evaluasi kinerja unit dan OPD terkait dapat dilakukan secara akurat berdasarkan data historis.

b) Fungsi tiap bagian BPKAD dalam Simple SPADU meliputi:

1) Resepsionis

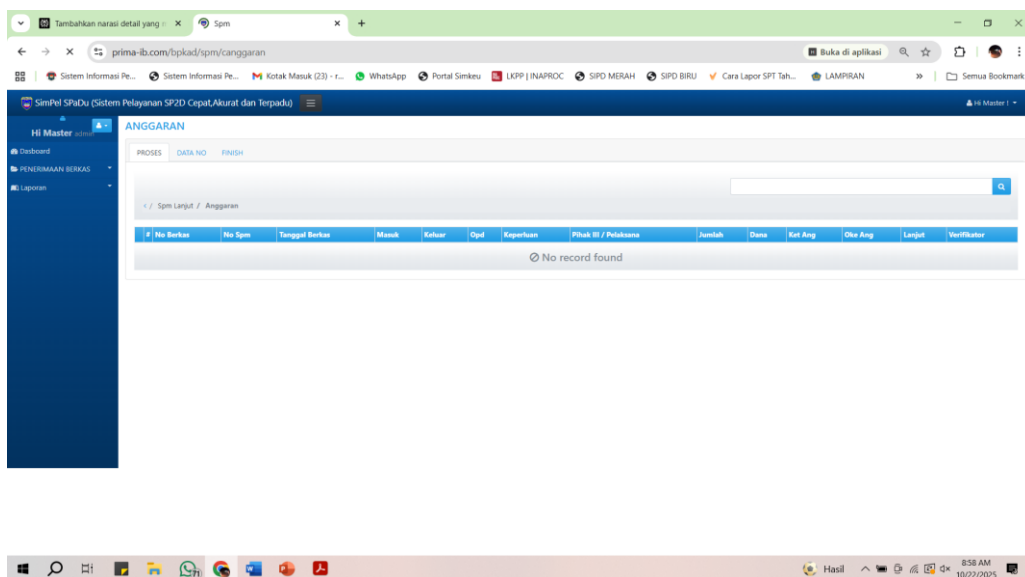
Berperan sebagai pengelola awal dokumen pengajuan SP2D yang masuk. Resepsionis bertugas menerima, mencatat, dan melakukan penelitian kelengkapan berkas awal dan input data berkas pengajuan seperti tanggal, nomor berkas, OPD pengaju, keperluan, pihak pelaksana, jumlah dana, jenis tagihan, serta keterangan lainnya sebelum meneruskan ke bagian selanjutnya. Dengan SimPel SPaDu, proses ini dilakukan secara terstruktur dan tercatat digital, meminimalisir kehilangan berkas serta mempercepat proses penerimaan dokumen.



Gambar 3.3 Tampilan Akun Resepsionis

2) Anggaran

Bidang anggaran berperan mengontrol dan mengatur alokasi anggaran sesuai dengan dokumen pengajuan. Di sini dilakukan tahap validasi alokasi dana terhadap pagu anggaran yang tersedia, kode rekening, pemberian catatan dan persetujuan lanjutan. Penggunaan SimPel SPaDu memungkinkan monitoring status pengajuan anggaran secara real-time, sehingga pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini.



Gambar 3.4 Tampilan Akun Anggaran

3) Perbendaharaan

Bertanggung jawab melakukan verifikasi akhir termasuk perhitungan pajak-pajak yang berlaku dan pencairan dana berdasarkan dokumen yang telah lengkap dan disetujui oleh bagian sebelumnya. Perbendaharaan memastikan bahwa pencairan dana sesuai dengan prosedur dan mengelola proses penerbitan SP2D. SimPel SPaDu membantu perbendaharaan untuk memantau status dokumen hingga tahap pencairan dengan transparansi penuh dan pencatatan digital yang rapi.

#	No Berkas	No Spm	Tanggal Berkas	Masiuk	Keluar	Opsi	Keperluan	Pelaksanaan	Jumlah	Tagihan	Dana	Keterangan	Lanjut
1	4442	0137/L5/2.11.01/P2/10/2025	2025-10-21 13:49:00	2025-10-21 14:32:22	0000-00-00 00:00:00	Dinas Lingkungan Hidup	Pembayaran Pembangunan Bank Sampah Desa Tasang Rajo	CV. TAMA GEMILANG	99.500.000,00	SPM_LK	DAU	Perbendaharaan Verifikasi	
2	4441	0136/L5/2.11.01/P2/10/2025	2025-10-21 13:47:00	2025-10-21 14:32:34	0000-00-00 00:00:00	Dinas Lingkungan Hidup	Pembayaran Pembangunan Bank Sampah Desa Kumplu Rajo	CV. GANTA JAYA YUBA	99.500.000,00	SPM_LK	DAU	Perbendaharaan Verifikasi	
3	4435	0132/L5/2.19.02/P2/10/2025	2025-10-21 13:38:00	2025-10-21 14:30:26	0000-00-00 00:00:00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Pembayaran Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Bulan Oktober 2025		16.120.000,00	SPM_LB	DAU	Perbendaharaan Verifikasi	
4	4436	0154/L5/2.19.02/P2/10/2025	2025-10-21 13:34:00	2025-10-21 14:30:39	0000-00-00 00:00:00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Oktober 2025		15.000.000,00	SPM_LB	DAU	Perbendaharaan Verifikasi	
5	4432	0301/L5/3.27.01/P2/10/2025	2025-10-21 13:28:00	2025-10-21 14:30:26	0000-00-00 00:00:00	Dinas Pertanian	Pembayaran Penatausahaan BMD Bulan Oktober 2025		2.300.000,00	SPM_LB	DAU	Perbendaharaan Verifikasi	
6	4433	0299/L5/3.27.01/P2/10/2025	2025-10-21 13:27:00	2025-10-21 14:31:08	0000-00-00 00:00:00	Dinas Pertanian	Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Oktober 2025		124.100.000,00	SPM_LB	DAU	Perbendaharaan Verifikasi	
7	4434	0300/L5/3.27.01/P2/10/2025	2025-10-21 13:23:00	2025-10-21 14:31:20	0000-00-00 00:00:00	Dinas Pertanian	Pembayaran Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Bulan Oktober 2025		34.510.000,00	SPM_LB	DAU	Perbendaharaan Verifikasi	
8	4431	0298/L5/3.27.01/P2/10/2025	2025-10-21 13:20:00	2025-10-21 14:31:31	0000-00-00 00:00:00	Dinas Pertanian	Pembayaran Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) Bulan September 2025		26.600.000,00	SPM_LB	DAK	Perbendaharaan Verifikasi	
9	4429	0153/L5/2.19.02/P2/10/2025	2025-10-21 13:15:00	2025-10-21 14:31:42	0000-00-00 00:00:00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Pembayaran Penatausahaan BMD Bulan Oktober 2025		1.700.000,00	SPM_LB	DAU	Perbendaharaan Verifikasi	

Gambar 3.5 Tampilan Akun Perbendaharaan Verifikasi

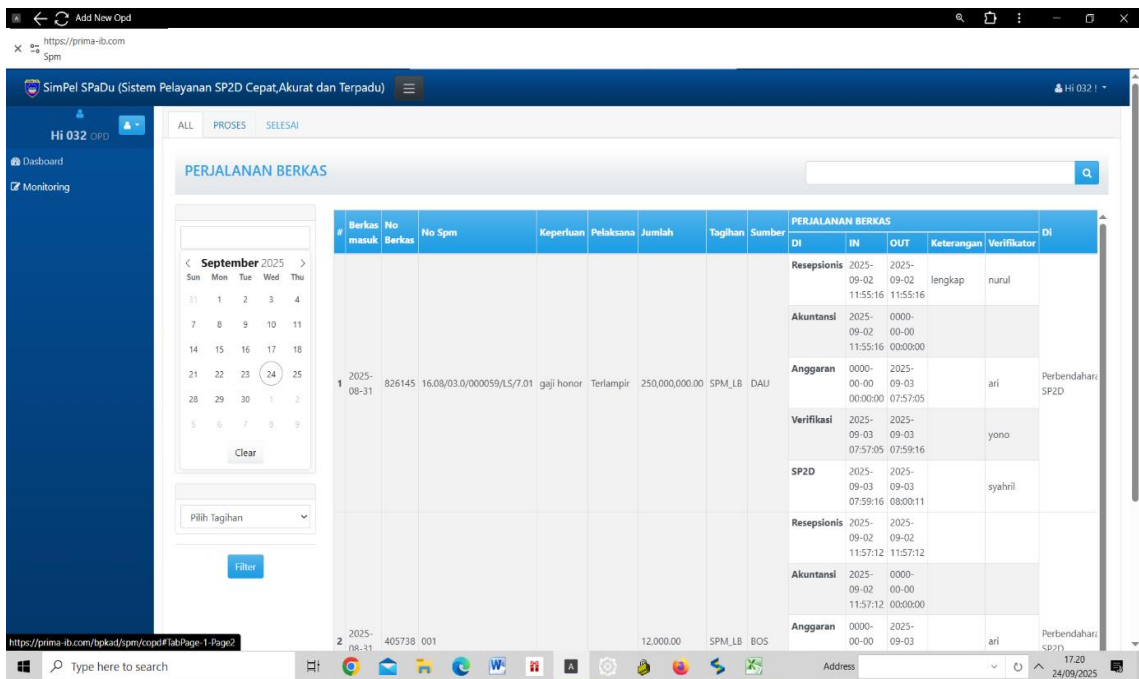
#	No Berkas	No Spm	Tanggal Berkas	Masiuk	Keluar	Opsi	Keperluan	Pelaksanaan	Jumlah	Tagihan	Sumber	Keterangan	Lanjut	Verifikasi
1	4446	0117/L5/2.17.02/P2/10/2025	2025-10-21 13:55:00	2025-10-21 16:23:18		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan Motor 2025	KOPERASI SERBA USAHA KARWA PEMUDA	48.000.000,00	SPM_LK	BK/BK		Perbendaharaan SP2D	
2	4445	0118/L5/2.17.02/P2/10/2025	2025-10-21 14:55:00	2025-10-21 16:23:31		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pembayaran LS penyediaan mesin cup sealer TA 2025	KOPERASI SERBA USAHA KARWA PEMUDA	30.400.000,00	SPM_LK	DAU		Perbendaharaan SP2D	
3	4444	0120/L5/2.17.02/P2/10/2025	2025-10-21 14:55:00	2025-10-21 16:23:42		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pembayaran LS penyediaan blender TA 2025	KOPERASI SERBA USAHA KARWA PEMUDA	43.500.000,00	SPM_LK	DAU		Perbendaharaan SP2D	
4	4443	0119/L5/2.17.02/P2/10/2025	2025-10-21 02:45:00	2025-10-21 16:24:00		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pembayaran Penyediaan Kambing Peranak Etawa TA 2025	KOPERASI SERBA USAHA KARWA PEMUDA	48.000.000,00	SPM_LK	DAU		Perbendaharaan SP2D	
5	4440	0329/L5/4.01.01/P2/10/2025	2025-10-21 13:39:00	2025-10-21 16:24:15		Sekretariat Daerah	Pembayaran LMK 30% Belanja Modal Bangunan Konblok Ruminan	CV. SEEM GROUP	118.350.000,00	SPM_LK	DAU		Perbendaharaan SP2D	
6	4437	0454/L5/1.4.01/P2/10/2025	2025-10-21 13:32:00	2025-10-21 16:24:33		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Oktober 2025		40.700.000,00	SPM_LB	DAU		Perbendaharaan SP2D	
7	4438	0453/L5/1.04.01/P2/10/2025	2025-10-21 13:31:00	2025-10-21 16:24:47		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pembayaran Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Bulan Oktober 2025		30.510.000,00	SPM_LB	DAU		Perbendaharaan SP2D	
8	4439	0452/L5/1.04.01/P2/10/2025	2025-10-21 13:29:00	2025-10-21 16:25:00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pembayaran Penatausahaan BMD Bulan Oktober 2025		1.300.000,00	SPM_LB	DAU		Perbendaharaan SP2D	
9	4430	0111/L5/3.30.01/P2/10/2025	2025-10-21 13:15:00	2025-10-21 14:30:14		Dinas Perdagangan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		6.300.000,00	SPM_LB	DAU		Perbendaharaan SP2D	

Gambar 3.6 Tampilan Akun Perbendaharaan SP2D

Dengan sistem yang terintegrasi di Simple SPaDu, tiap bidang di BPKAD dapat saling berkoordinasi secara efektif dan efisien meski tidak berada di lokasi yang sama. Ini merupakan inovasi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengelolaan keuangan daerah yang lebih cepat, akurat dan terpadu.

c) Fungsi pada OPD (Bendahara Pengeluaran)

Bendahara Pengeluaran OPD memegang akun yang telah difasilitasi dan diserahkan pada saat pelatihan singkat kepada OPD. Akun OPD digunakan untuk memantau berkas secara real-time dari seluruh tahap proses. Fungsi utama bendahara adalah mengajukan berkas SP2D, melengkapi dokumen pendukung dan memantau kemajuan berkas hingga keluarnya SP2D. Dengan akses ini, bendahara dapat melihat posisi setiap berkas dalam alur proses (penerimaan, proses, finish).



Gambar 3.7 Tampilan Akun OPD

3. Pelaksanaan Tahapan Jangka Pendek

Pelaksanaan proyek perubahan melalui inovasi Strategi Pelayanan SP2D Yang Cepat, Akurat, Terpadu untuk Menunjang Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Keuangan Daerah (SimPel SPaDu) telah menunjukkan capaian hasil yang sesuai dengan rencana perubahan. Implementasi sistem ini berhasil mewujudkan percepatan

proses penerbitan SP2D yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama, kini dapat diproses secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Beberapa capaian utama yang dapat diukur antara lain:

1) Percepatan Waktu Penerbitan SP2D

Rata-rata penerbitan SP2D yang sebelumnya berkisar 2–5 hari kerja, kini dapat diproses maksimal 2 hari kerja. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target efisiensi waktu sebagaimana direncanakan pada tahap awal proyek.

2) Integrasi Layanan Digital

Sistem yang semula hanya berfungsi sebagai pencatatan internal berhasil ditransformasikan menjadi platform digital terpadu yang dapat diakses oleh BPKAD, OPD (bendahara pengeluaran), mitra kerja dan pihak perbankan. Fitur tracking status SP2D secara real-time menjadi salah satu capaian utama dalam menjawab keluhan pengguna layanan.

3) Keterpaduan Proses Bisnis

Alur birokrasi yang sebelumnya panjang dan berulang berhasil disederhanakan melalui mekanisme SP2D One Flow yang meniadakan tahapan berulang serta memanfaatkan proses paralel. Dengan demikian, hambatan pada proses manual dapat ditekan secara signifikan.

4) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Tersedianya dashboard monitoring memungkinkan OPD mengetahui status pengajuan tanpa harus melakukan konfirmasi manual. Hal ini memperkuat prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas keuangan daerah.

5) Penguatan Kapasitas SDM

Pegawai BPKAD dan bendahara pengeluaran OPD telah mendapatkan pelatihan teknis penggunaan aplikasi. Keberhasilan transfer pengetahuan ini memastikan bahwa sistem dapat dioperasikan secara berkelanjutan dan tidak tergantung pada individu tertentu.

6) Kelembagaan dan Kepastian Hukum

Penerapan inovasi SimPel SPaDu ditopang dengan penerbitan SK Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penerbitan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang menjamin keberlanjutan sistem dalam tata kelola resmi BPKAD.

Pelaksanaan Tahapan kegiatan jangka pendek proyek perubahan SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat dan Terpadu) dilaksanakan dalam rentang waktu 2 bulan pertama (September s.d Oktober 2025). Fase ini menjadi pondasi utama karena menentukan arah keberhasilan pada tahap menengah dan panjang. Setiap kegiatan disusun secara sistematis, dengan capaian yang dapat diukur serta langsung berkontribusi pada pencapaian target percepatan penerbitan SP2D.

1) Minggu Pertama – Inisiasi Program dan Pembentukan Tim (Terlaksana 100%)

Tabel 3.1 Inisiasi Program dan Pembentukan Tim

Minggu	Tahapan Strategis	Kegiatan Utama	Sub Kegiatan	Output yang Diharapkan	Pelaksana	Keterangan
A. Jangka Pendek (2 Bulan)						
1	Inisiasi Program & Pembentukan Tim	1. Sosialisasi awal proyek perubahan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan konsep proyek Presentasi ke pimpinan daerah Penyampaian tujuan & manfaat 	Nota persetujuan awal & dukungan pimpinan	Kepala BPKAD	Terlaksana
		2. Pembentukan Tim Pelaksana Proyek	<ul style="list-style-type: none"> Penunjukan tim inti Pembagian peran & tanggung jawab Penyusunan SK Tim 	SK Tim Pelaksana Proyek	Kepala BPKAD	Terlaksana
		3. Penyusunan rencana kerja	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun TOR kegiatan Menetapkan jadwal 2 bulan Menentukan indikator keberhasilan 	Rencana kerja proyek perubahan	Tim Perumus	Terlaksana

Berikut ini disampaikan uraian pelaksanaan tahapan jangka pendek pertama yang sudah dilaksanakan:

a) Sosialisasi awal proyek perubahan

Kegiatan utama ini diawali dengan sosialisasi awal proyek perubahan kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya pimpinan daerah yang memegang peran strategis dalam mendukung program. Dalam proses ini, dilakukan penyusunan konsep proyek yang komprehensif, menjelaskan visi, tujuan, dan manfaat percepatan layanan SP2D, sehingga menciptakan pemahaman dan

keselarasan persepsi antar pihak terkait. Selain itu, presentasi resmi disampaikan ke pimpinan daerah untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan penuh. Output yang dihasilkan berupa Nota Persetujuan Awal dan dukungan pimpinan yang menjadi landasan strategis pelaksanaan proyek selanjutnya.



Gambar 3.8 Eviden Sosialisasi awal proyek perubahan

Untuk data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link

b) Pembentukan Tim Pelaksana Proyek

Kedua, dilakukan pembentukan Tim Pelaksana Proyek yang terdiri dari penunjukan tim inti dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Proses ini mengarah pada penerbitan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana, yang secara formal menetapkan struktur organisasi proyek, memastikan koordinasi dan sinergi optimal dalam pelaksanaan program. Pembentukan tim ini menjadi fondasi operasional yang memastikan bahwa setiap aktivitas proyek memiliki penanggung jawab dan mekanisme pelaporan yang terstruktur.



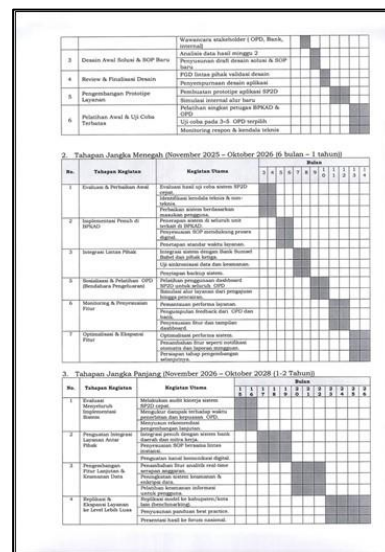
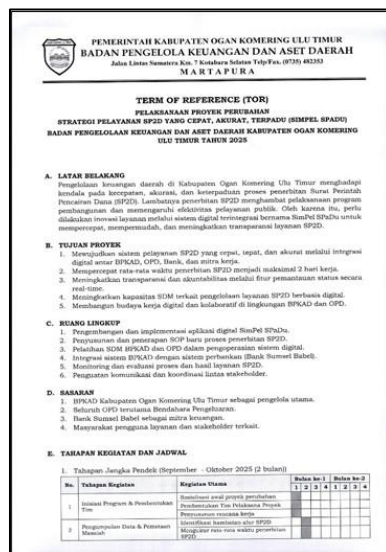
Gambar 3.9 Eviden Pembentukan Tim Pelaksana Proyek

Untuk data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link

c) Penyusunan rencana kerja

Selanjutnya dilakukan penyusunan rencana kerja, Dalam kegiatan ini, tim perumus menyusun rencana kerja proyek perubahan secara rinci sebagai panduan pelaksanaan jangka pendek. Rencana ini memuat Terms of Reference (TOR) yang mendefinisikan tahapan kegiatan, sumber daya yang digunakan, jadwal waktu pelaksanaan selama dua bulan, serta indikator keberhasilan yang terukur dan realistis. Rencana kerja yang terstruktur ini berfungsi sebagai peta jalan untuk mengarahkan semua aktivitas sehingga tujuan percepatan penerbitan SP2D dapat dicapai sesuai target waktu dan kualitas layanan.

Output utama dari penyusunan rencana kerja adalah dokumen formal rencana kegiatan yang menjadi acuan bagi seluruh tim dalam mengelola tugas harian dan koordinasi lintas unit kerja. Dengan adanya rencana kerja ini, potensi risiko pelaksanaan dapat diminimalisir melalui perencanaan yang matang dan pengawasan yang sistematis.



Gambar 3.10 Eviden Penyusunan rencana kerja

Untuk data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link

Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan jangka pendek ini menghasilkan fondasi institusional dan operasional yang kuat, membangun sinergi antar pemangku kepentingan, serta menyusun panduan teknis dan manajerial bagi pelaksanaan inovasi pelayanan SP2D. Output yang dihasilkan berupa nota persetujuan, SK tim pelaksana, dan rencana kerja yang terperinci, menjadi landasan bagi percepatan proses SP2D yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan komitmen pimpinan dan kesiapan sumber daya manusia serta sistem sebagai prasyarat keberhasilan menuju transformasi digital layanan keuangan daerah.

2) Minggu Kedua – Pengumpulan Data dan Pemetaan Masalah (Terlaksana 100%)

Tabel 3.2 Pengumpulan Data dan Pemetaan Masalah

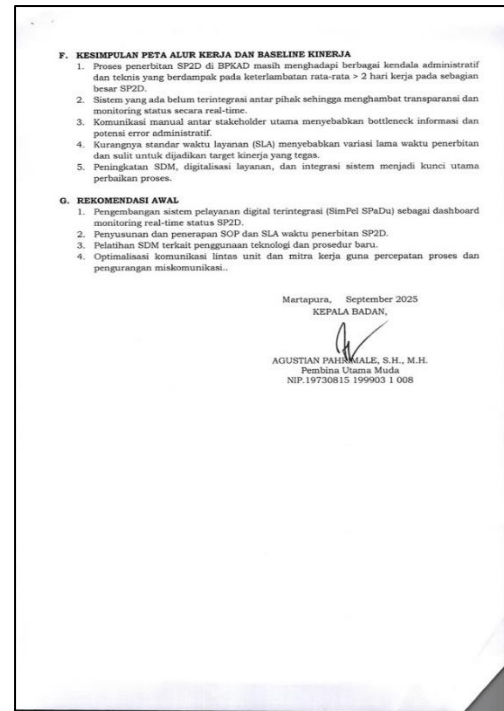
Minggu	Tahapan Strategis	Kegiatan Utama	Sub Kegiatan	Output yang Diharapkan	Pelaksana	Keterangan
A. Jangka Pendek (2 Bulan)						
2	Pengumpulan Data &	1. Identifikasi hambatan alur SP2D	• Observasi proses berjalan	Dokumen peta alur kerja & baseline	Tim Analisis	Terlaksana

	Pemetaan Masalah		<ul style="list-style-type: none"> • Catat kendala administrasi & teknis 	kinerja SP2D		
		2. Mengukur rata-rata waktu penerbitan SP2D	<ul style="list-style-type: none"> • Rekap data penerbitan 1 tahun terakhir • Hitung rata-rata waktu proses 	Data baseline kinerja SP2D	Tim Evaluasi	Terlaksana
		3. Wawancara stakeholder (OPD, Bank, internal)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan instrumen wawancara • Pelaksanaan wawancara • Analisis hasil wawancara 	Laporan hasil wawancara stakeholder	Tim Surveyor	Terlaksana

Berikut ini disampaikan uraian pelaksanaan tahapan jangka pendek kedua yang sudah dilaksanakan:

a) Identifikasi hambatan alur SP2D

Dalam kegiatan utama Pengumpulan Data dan Pemetaan Masalah, terdapat dua sub kegiatan primer yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Pertama, tim melakukan identifikasi hambatan pada alur proses SP2D. Langkah ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses operasional di lapangan serta pencatatan secara detail setiap kendala teknis dan administratif yang dihadapi, mulai dari pengajuan dokumen oleh OPD, proses verifikasi di BPKAD, hingga pencairan dana di bank mitra. Observasi ini menghasilkan gambaran konkret tentang titik-titik kritis yang menyebabkan lambatnya penerbitan SP2D. Output dari sub kegiatan ini adalah dokumen peta alur kerja dan baseline kinerja SP2D yang menggambarkan kondisi eksisting secara jelas dan dapat dijadikan referensi untuk evaluasi lebih lanjut.



Gambar 3.11 Eviden Identifikasi hambatan alur SP2D

Untuk data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link

b) Mengukur rata-rata waktu penerbitan SP2D

Kedua, tim melakukan pengukuran rata-rata waktu penerbitan SP2D dengan menelaah data historis selama satu tahun terakhir. Pengumpulan data kuantitatif ini mencakup rekapan waktu proses di setiap tahapan penerbitan SP2D, mulai dari pengajuan sampai pencairan dana di rekening penerima. Data ini dianalisis untuk mengidentifikasi standar waktu dan variabilitas proses saat ini, sekaligus menjadi gambaran baseline kinerja yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan percepatan di masa mendatang. Output yang dihasilkan berupa data baseline kinerja SP2D yang lengkap dan valid, sekaligus laporan hitung rata-rata waktu proses penerbitan sebagai indikator awal efisiensi layanan.



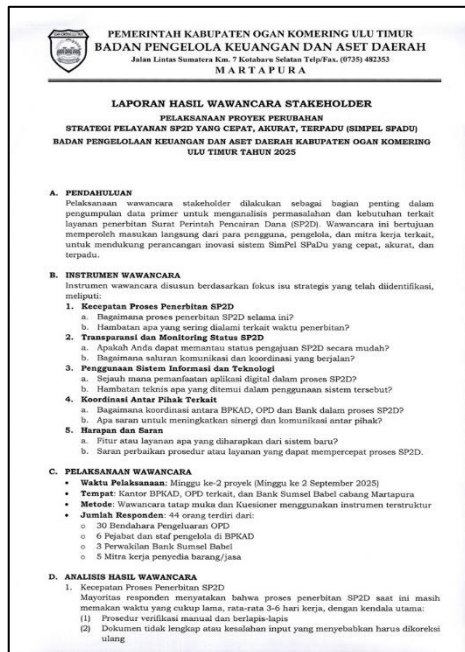
Gambar 3.12 Eviden Mengukur rata-rata waktu penerbitan SP2D

Untuk data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link

c) Wawancara stakeholder (OPD, Bank, internal)

Selanjutnya, tim pelaksana juga melakukan wawancara dengan para stakeholder utama, yaitu OPD (Bendahara Pengeluaran), pihak bank, serta pegawai internal BPKAD yang terkait langsung dengan proses SP2D. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan pengisian kuesioner/survei kepuasan dan hambatan dalam proses penerbitan SP2D pada BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Wawancara ini bertujuan menggali persepsi, pengalaman, serta masukan atas kendala dan harapan perbaikan proses pelayanan SP2D. Instrumen wawancara disusun secara sistematis untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam. Hasil wawancara direkap dan dianalisis secara objektif untuk mendukung pemetaan masalah secara komprehensif. Output akhir dari rangkaian aktivitas wawancara ini adalah laporan hasil wawancara stakeholder yang menjadi bahan utama dalam penyusunan solusi inovatif.



Gambar 3.13 Eviden Wawancara stakeholder (OPD, Bank, internal)

Untuk data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link

Secara keseluruhan, tahapan Pengumpulan Data dan Pemetaan Masalah berhasil menghasilkan data dan informasi yang akurat serta peta komprehensif mengenai hambatan dalam penerbitan SP2D. Dokumen peta alur kerja, data baseline kinerja, dan laporan wawancara stakeholder ini menjadi landasan kuat dalam pengembangan solusi SimPel SPaDu. Proses ini menjamin bahwa langkah perbaikan dan inovasi didasarkan pada fakta dan kebutuhan nyata, sehingga potensi keberhasilan percepatan pelayanan SP2D semakin tinggi. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan tim analis, evaluasi, dan surveyor yang terkoordinasi secara efektif untuk memastikan keakuratan dan keterpaduan data.

3) Minggu Ketiga – Desain Awal Solusi dan Penyusunan SOP Baru (Terlaksana 100%)

Tabel 3.3 Desain Awal Solusi dan Penyusunan SOP Baru

Minggu	Tahapan Strategis	Kegiatan Utama	Sub Kegiatan	Output yang Diharapkan	Pelaksana	Keterangan
A. Jangka Pendek (2 Bulan)						
3	Desain Awal Solusi & SOP Baru	1. Analisis data hasil minggu 2	<ul style="list-style-type: none"> Mengolah hasil wawancara & observasi Identifikasi bottleneck utama Menyusun alternatif solusi 	Dokumen analisis masalah & rekomendasi awal	Tim Analisis	Terlaksana
		2. Penyusunan draft desain solusi & SOP baru	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan alur kerja baru Draft fitur aplikasi sederhana Draft SOP percepatan SP2D 	Draft awal desain sistem & SOP	Tim Perumus	Terlaksana

Berikut ini disampaikan uraian pelaksanaan tahapan jangka pendek kedua yang sudah dilaksanakan:

a) Analisis data hasil minggu 2

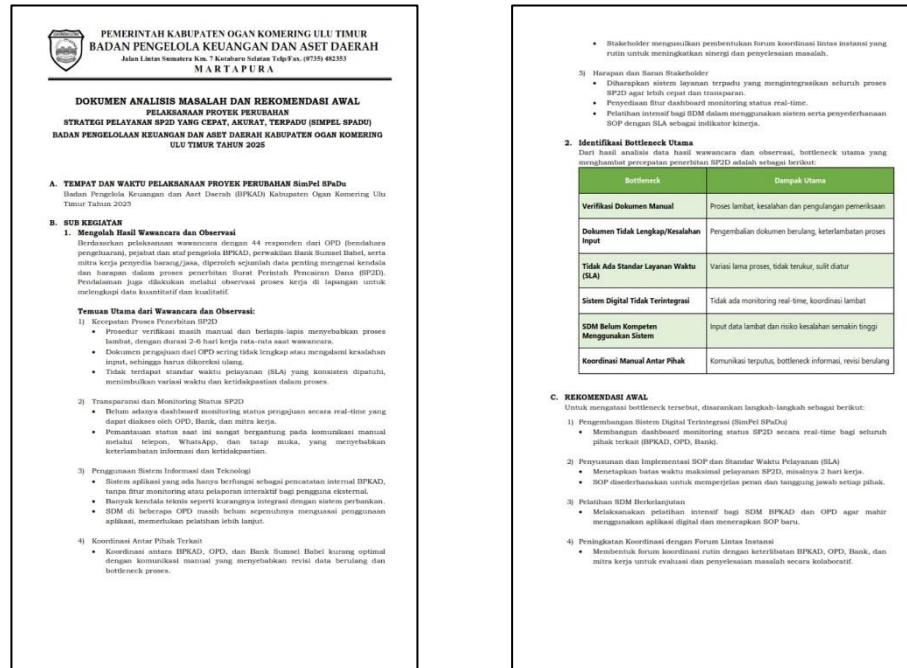
Sub kegiatan pertama adalah melakukan analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan pada minggu kedua. Data yang dianalisis mencakup:

- Data kuantitatif berupa rata-rata lama penerbitan SP2D, volume SP2D per OPD, dan jumlah pengajuan yang dikembalikan akibat dokumen tidak lengkap.
- Data kualitatif berupa hasil wawancara dengan bendahara OPD, pejabat BPKAD, serta pihak perbankan mengenai kendala dan harapan mereka.
- Peta alur kerja eksisting yang menunjukkan aliran dokumen dari OPD hingga bank.

Proses analisis dilakukan dengan pendekatan problem tree analysis untuk menemukan akar masalah keterlambatan penerbitan SP2D. Dari hasil analisis, teridentifikasi empat isu utama, yaitu: verifikasi manual yang memakan waktu,

ketiadaan standar waktu layanan (SLA), koordinasi lambat dengan bank, serta dokumen pengajuan OPD yang sering tidak lengkap.

Output yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah dokumen hasil analisis masalah dan rekomendasi awal arah perbaikan. Dokumen ini menjadi landasan strategis dalam merumuskan desain solusi dan SOP baru.



Gambar 3.14 Eviden Analisis data hasil minggu 2

Untuk data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link

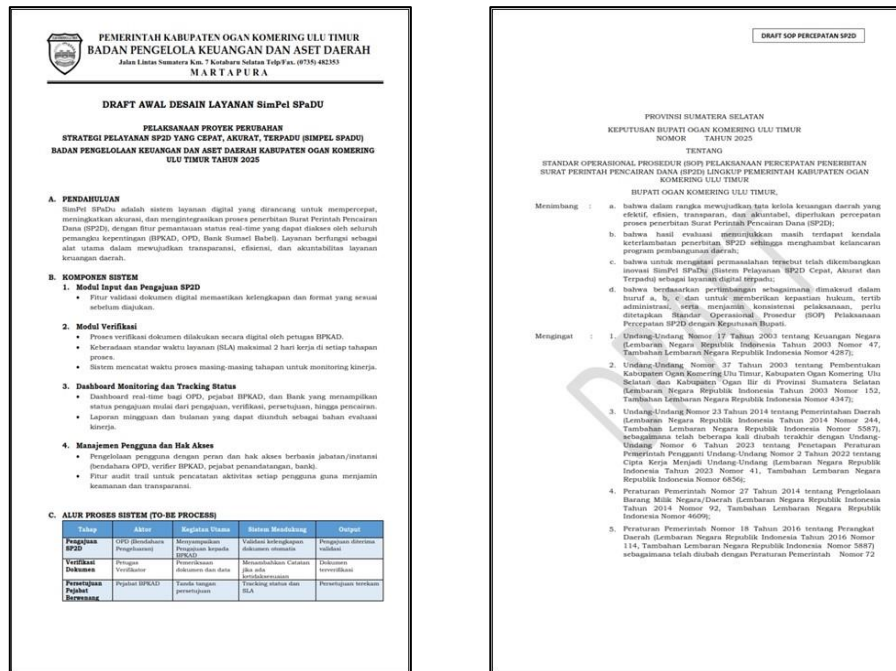
b) Penyusunan draft desain solusi & SOP baru

Sub kegiatan kedua adalah merancang draft awal solusi digital SimPel SPaDu dan menyusun SOP percepatan penerbitan SP2D. Dalam kegiatan ini, tim melakukan lokakarya internal untuk mengonversi hasil analisis data menjadi rancangan sistem dan prosedur kerja baru. Draft desain sistem mencakup rancangan arsitektur aplikasi, alur bisnis baru (to-be process), serta penentuan fitur utama, yaitu: tracking real-time, dashboard monitoring untuk pimpinan dan validasi dokumen digital.

Bersamaan dengan itu, tim menyusun draft SOP percepatan penerbitan SP2D, yang menetapkan standar waktu maksimal dua hari kerja sejak pengajuan hingga

pencairan. Draft SOP ini juga mengatur peran dan tanggung jawab setiap aktor (bendahara OPD, verifikator BPKAD, pejabat penandatanganan, serta pihak bank) dengan SLA yang jelas di tiap tahap proses.

Output dari sub kegiatan ini adalah dokumen draft desain sistem SimPel SPaDu (blueprint aplikasi dan flowchart proses baru), draft SOP percepatan SP2D, serta naskah usulan solusi perbaikan proses bisnis yang akan dibahas lebih lanjut dalam forum FGD minggu keempat.



Gambar 3.15 Eviden Penyusunan draft desain solusi & SOP baru

Untuk data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link

4) Minggu Keempat – Review dan Finalisasi Desain (Terlaksana 100%)

Tabel 3.4 Review dan Finalisasi Desain

Minggu	Tahapan Strategis	Kegiatan Utama	Sub Kegiatan	Output yang Diharapkan	Pelaksana	Keterangan
A. Jangka Pendek (2 Bulan)						
4	Review & Finalisasi Desain	1. FGD lintas pihak validasi desain	<ul style="list-style-type: none"> Undangan FGD Diskusi & masukan Dokumentasi hasil 	Dokumen SOP final & blueprint layanan	Tim Perumus, OPD, Bank	Terlaksana

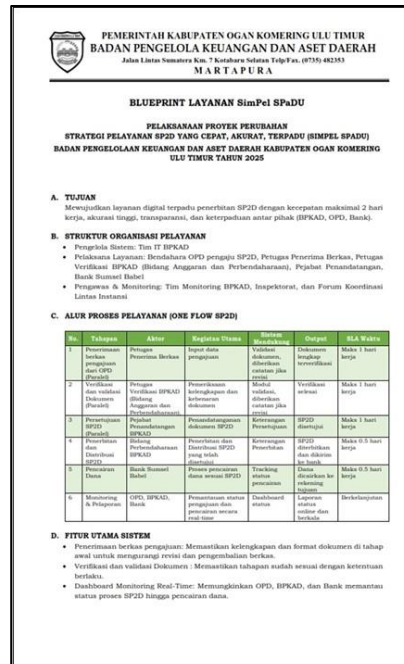
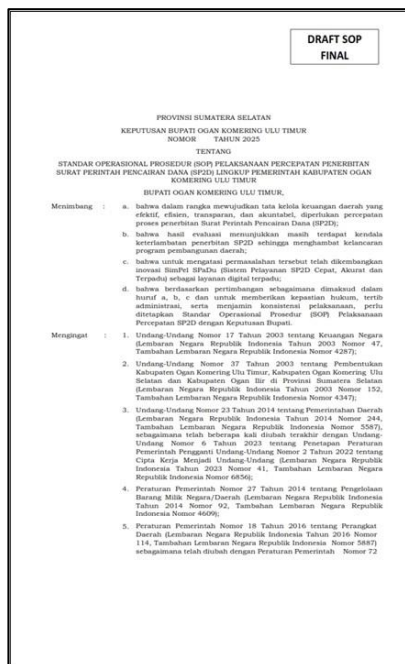
		2. Penyempurnaan desain aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> Revisi draft fitur Konsultasi teknis dengan pengembang Finalisasi desain fitur 	Desain aplikasi final siap dibuat prototipe	Tim IT BPKAD	Terlaksana
--	--	----------------------------------	--	---	--------------	------------

Berikut ini disampaikan uraian pelaksanaan tahapan jangka pendek keempat yang sudah dilaksanakan:

a) FGD lintas pihak validasi desain

Tim pelaksana menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan perwakilan BPKAD, OPD pengguna anggaran, dan mitra perbankan. Draft desain sistem dan draft SOP percepatan SP2D dipaparkan secara rinci untuk mendapatkan masukan teknis dan operasional. Diskusi berjalan partisipatif, dengan fokus pada kejelasan alur kerja, SLA dua hari kerja, dan kesesuaian fitur aplikasi dengan kebutuhan lapangan.

Output yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah dokumen SOP final & blueprint layanan.



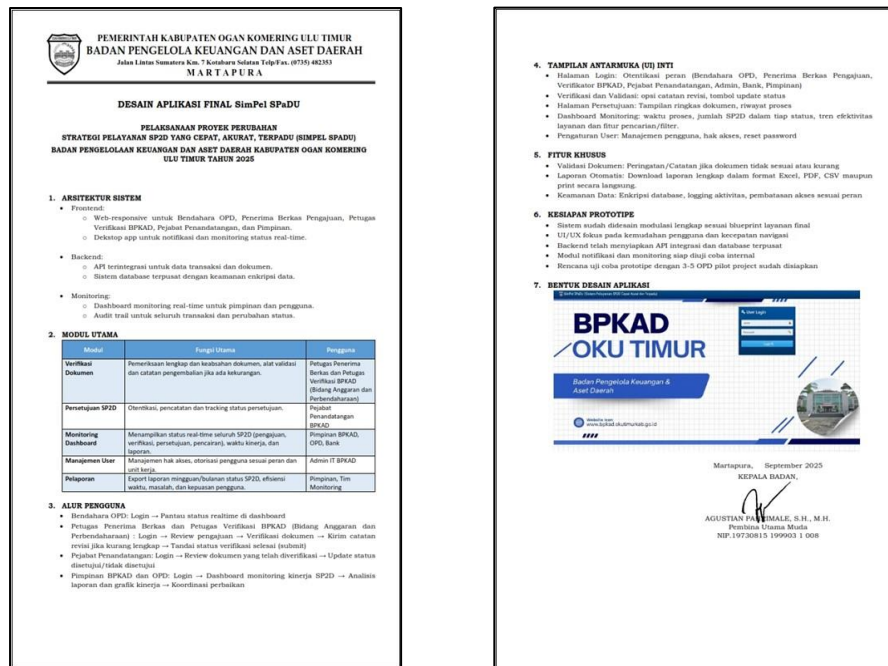
Gambar 3.16 Eviden FGD lintas pihak validasi desain

Untuk data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link

b) Penyempurnaan desain aplikasi

Berdasarkan masukan FGD, tim teknis melakukan penyempurnaan blueprint aplikasi agar lebih operasional dan ramah pengguna. Perubahan dilakukan pada alur proses (disederhanakan menjadi SP2D One Flow), penajaman fitur inti (tracking real-time, dashboard monitoring), dan standar integrasi dengan bank. Antarmuka aplikasi juga diperbaiki agar mudah dioperasikan oleh bendahara OPD.

Output yang dihasilkan dari sub kegiatan ini Desain aplikasi final siap dibuat prototipe.



Gambar 3.17 Eviden Penyempurnaan desain aplikasi

Untuk data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link

Hasil minggu keempat menjadi landasan legitimasi dan teknis proyek perubahan. FGD memberikan validasi formal bahwa rancangan solusi diterima stakeholder, sementara penyempurnaan desain aplikasi menghasilkan dokumen teknis final yang siap diimplementasikan. Dengan keluaran ini, SimPel SPaDu memiliki pijakan kuat untuk masuk ke tahap pengembangan prototipe pada minggu berikutnya

5) Minggu Kelima–Keenam – Pengembangan Prototipe Layanan (Terlaksana 100%)

Tabel 3.5 Pengembangan Prototipe Layanan

Minggu	Tahapan Strategis	Kegiatan Utama	Sub Kegiatan	Output yang Diharapkan	Pelaksanaan	Keterangan
A. Jangka Pendek (2 Bulan)						
5–6	Pengembangan Prototipe Layanan	1. Pembuatan prototipe aplikasi SP2D	<ul style="list-style-type: none"> Desain database & dashboard Integrasi tracking SP2D 	Prototipe layanan SP2D	Tim IT BPKAD	Terlaksana
		2. Simulasi internal alur baru	<ul style="list-style-type: none"> Uji simulasi internal Identifikasi error teknis Penyempurnaan modul pelaporan 	Laporan simulasi internal & daftar perbaikan	Tim IT & Monitoring	Terlaksana

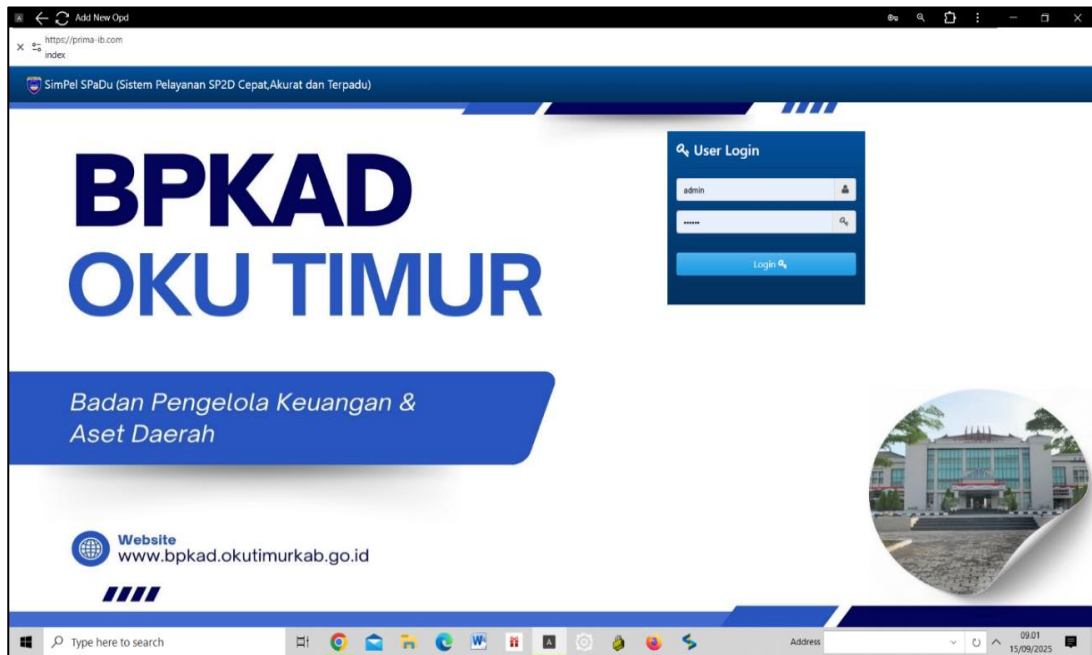
Berikut ini disampaikan uraian pelaksanaan tahapan jangka pendek kelima yang sudah dilaksanakan:

a) Pembuatan prototipe aplikasi SP2D

Tim IT BPKAD mulai mengimplementasikan blueprint yang telah disempurnakan ke dalam bentuk aplikasi digital. Modul inti yang dikembangkan meliputi:

- Tracking real-time status pengajuan SP2D.
- Dashboard monitoring untuk pimpinan sebagai alat kendali kinerja.
- Modul verifikasi digital untuk memastikan dokumen lengkap sebelum diproses.

Proses pengembangan dilakukan secara bertahap dengan pengujian internal di setiap modul untuk memastikan konsistensi dengan desain. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Prototipe layanan SP2D.



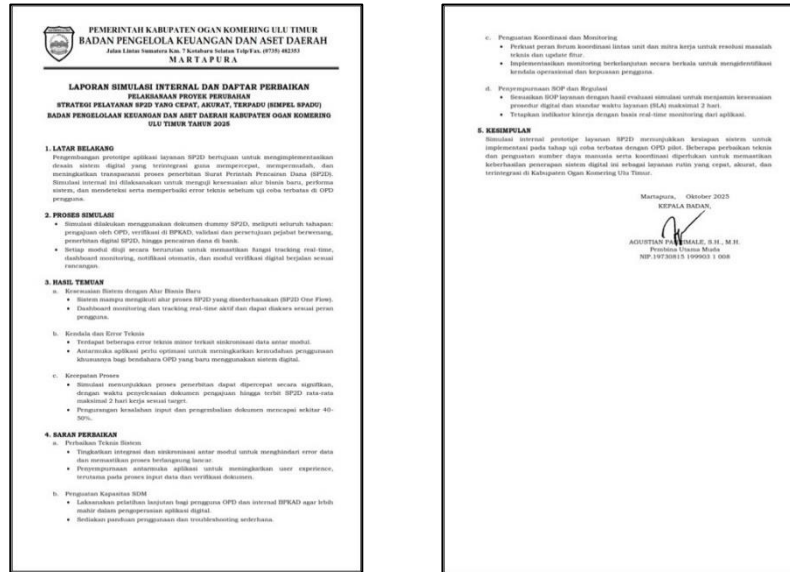
Gambar 3.18 Eviden Pembuatan prototipe aplikasi SP2D

Untuk data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link

b) Simulasi internal alur baru

Setelah prototipe selesai dibangun, tim melaksanakan uji coba internal (alpha test) dengan menggunakan dokumen dummy SP2D. Simulasi dilakukan dari tahap pengajuan, verifikasi, persetujuan, hingga penerbitan SP2D digital. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian sistem dengan alur kerja baru dan menemukan potensi bug teknis.

Selama uji coba, tim juga mengevaluasi kecepatan proses. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Laporan simulasi internal & daftar perbaikan



Gambar 3.19 Eviden Simulasi internal alur baru

Untuk data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link

Minggu kelima menjadi titik awal perwujudan sistem digital dari proyek perubahan. Prototipe aplikasi SimPel SPaDu yang dihasilkan menandai pergeseran dari fase konseptual menuju fase implementatif. Uji coba internal memastikan bahwa sistem tidak hanya berfungsi secara teoritis, tetapi juga dapat dioperasikan sesuai alur bisnis baru. Dengan adanya laporan alpha test dan daftar perbaikan, BPKAD memiliki dasar kuat untuk menyempurnakan prototipe sebelum masuk ke tahap pelatihan dan uji coba terbatas pada minggu keenam.

6) Minggu Ketujuh–Kedelapan – Pelatihan Awal dan Uji Coba Terbatas (Terlaksana 100%)

Tabel 3.6 Pelatihan Awal dan Uji Coba Terbatas

Minggu	Tahapan Strategis	Kegiatan Utama	Sub Kegiatan	Output yang Diharapkan	Pelaksana	Keterangan
A. Jangka Pendek (2 Bulan)						
7–8	Pelatihan Awal & Uji Coba Terbatas	1. Pelatihan singkat petugas BPKAD & OPD	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan modul pelatihan Pelaksanaan pelatihan 	Laporan pelatihan awal	Tim Trainer BPKAD	Terlaksana

			<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelatihan 			
		2. Uji coba pada 3–5 OPD terpilih	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan OPD pilot project • Implementasi sistem terbatas • Evaluasi hasil uji coba 	Laporan uji coba awal & perbaikan fitur	Tim Uji Coba	Terlaksana
		3. Monitoring respon & kendala teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Checklist monitoring • Pendampingan teknis • Penyusunan laporan hasil monitoring 	Laporan monitoring implementasi awal	Tim Monitoring & IT Support	Terlaksana

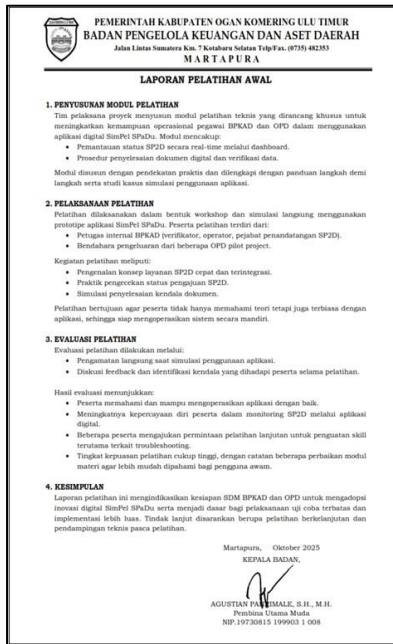
Berikut ini disampaikan uraian pelaksanaan tahapan jangka pendek keenam yang sudah dilaksanakan:

a) Pelatihan singkat petugas BPKAD & OPD

BPKAD menyelenggarakan pelatihan teknis untuk pegawai internal (verifikator, operator, dan pejabat penandatanganan SP2D) serta bendahara pengeluaran dari beberapa OPD percontohan. Pelatihan difokuskan pada:

- Cara menginput berkas pengajuan ke dalam sistem
- Pemantauan status SP2D secara real-time.
- Prosedur penyelesaian dokumen digital.

Pelatihan ini dilaksanakan dalam bentuk simulasi langsung menggunakan aplikasi prototipe, sehingga peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga terbiasa melakukan praktik pengoperasian. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Laporan pelatihan awal.



Gambar 3.20 Eviden Pelatihan singkat petugas BPKAD & OPD

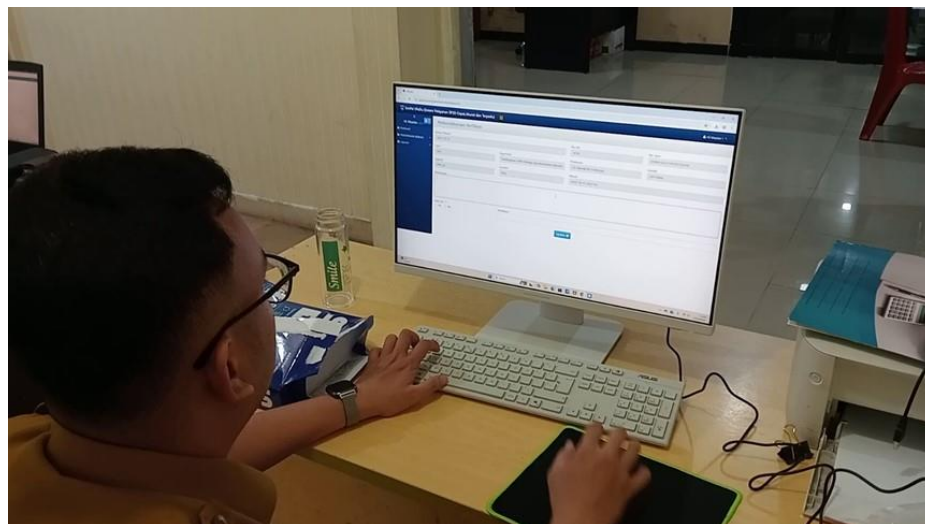
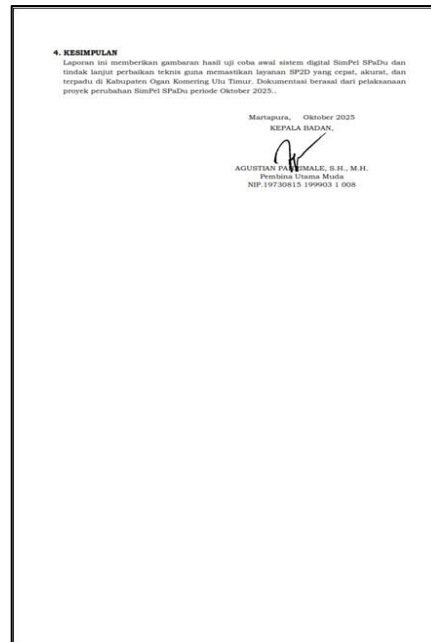
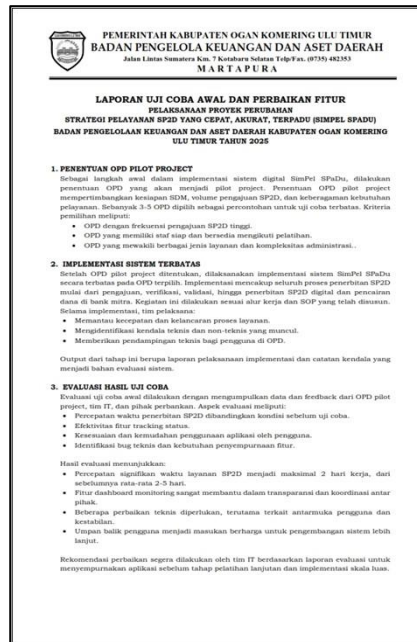
Untuk data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link [https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link)

b) Uji coba pada 3–5 OPD terpilih

Setelah pelatihan, dilakukan uji coba terbatas terhadap beberapa SP2D riil yang diajukan oleh OPD percontohan. Proses ini melibatkan seluruh tahapan: pengajuan

oleh OPD, verifikasi oleh BPKAD, persetujuan pejabat berwenang, hingga penerbitan SP2D digital dan pencairan di bank.

Selama pelaksanaan uji coba, tim pelaksana melakukan monitoring ketat untuk mencatat kecepatan proses, efektivitas fitur tracking dan kendala teknis yang muncul. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Laporan uji coba awal & perbaikan fitur.



Gambar 3.21 Eviden Uji coba pada 3–5 OPD terpilih

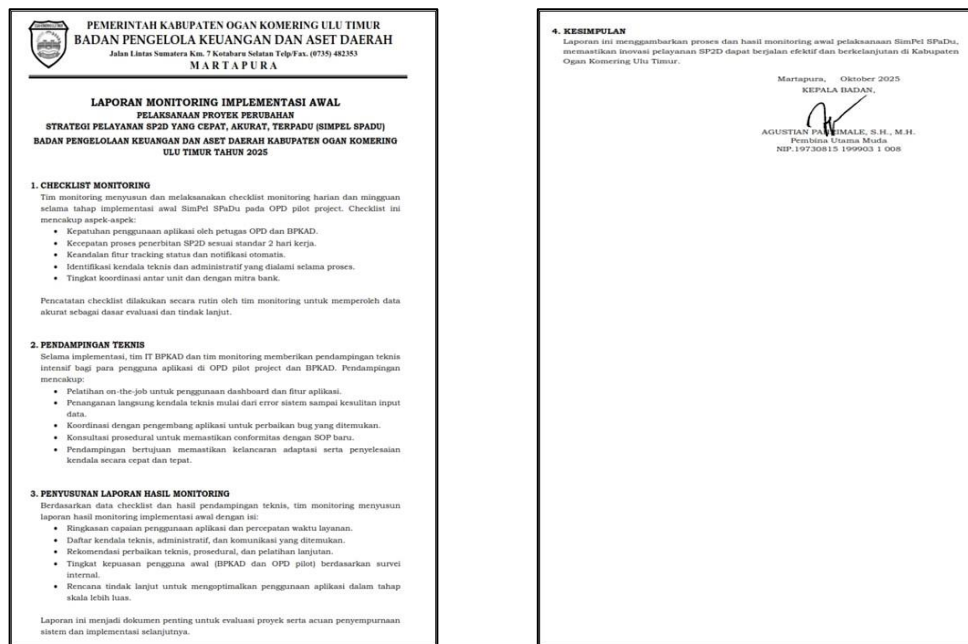
Untuk data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link

c) Monitoring respon & kendala teknis

Sebagai bagian akhir kegiatan keenam, tim menyusun laporan evaluasi awal yang merangkum hasil pelatihan dan pilot project. Evaluasi menyoroti:

- Peningkatan kecepatan penerbitan SP2D.
- Efisiensi proses kerja karena berkurangnya dokumen yang dikembalikan.
- Tingkat kepuasan pengguna awal (BPKAD dan OPD percontohan).

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Laporan monitoring implementasi awal.



Gambar 3.22 Eviden Monitoring respon & kendala teknis

Untuk data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link

Tahapan keenam membuktikan bahwa SimPel SPaDu mampu berjalan dalam konteks riil. Hasil uji coba terbatas menunjukkan adanya percepatan signifikan

penerbitan SP2D, dari rata-rata 2–5 hari menjadi maksimal 2 hari kerja. Lebih dari itu, feedback pengguna menjadi masukan berharga untuk menyempurnakan sistem sebelum diterapkan dalam skala lebih luas. Dengan demikian, tahapan keenam menandai peralihan dari fase prototipe ke fase implementasi terbatas yang terukur dan berbasis bukti.

B. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

Pelaksanaan proyek perubahan Strategi Pelayanan SP2D Yang Cepat, Akurat, Terpadu untuk Menunjang Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Keuangan Daerah (SimPel SPaDu) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah memberikan capaian nyata terhadap manfaat perubahan sebagaimana dirumuskan dalam rencana proyek. Capaian tersebut tidak hanya memperbaiki tata kelola administrasi keuangan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi fiskal, peningkatan kepercayaan publik, serta penguatan stabilitas ekonomi daerah.

1. Nilai Ekonomis

1) Optimalisasi Serapan Anggaran

Pelaksanaan proyek perubahan SimPel SPaDu berhasil mempercepat rata-rata waktu penerbitan SP2D dari sebelumnya 2–5 hari kerja menjadi maksimal 2 hari kerja. Percepatan ini mendorong realisasi anggaran berjalan lebih lancar sesuai tahapan dan target waktu pelaksanaan kegiatan, serta menekan risiko terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Berdasarkan hasil monitoring selama penerapan layanan SimPel Spadu rentang waktu 2 minggu serapan anggaran daerah meningkat lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dari total 113 (seratus tiga belas) berkas pengajuan yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada 75 (tujuh puluh lima) berkas yang berhasil diselesaikan dalam waktu maksimal 2 hari kerja dengan total nilai realisasi **Rp. 9.259.940.289** (*Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*). Sedangkan sisa berkas sebanyak 38 berkas masih dalam proses dikarenakan baru diusulkan oleh OPD.

2) Efisiensi Biaya Administrasi

Implementasi sistem digital SimPel SPaDu membawa dampak signifikan terhadap efisiensi biaya operasional, baik di lingkungan BPKAD maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Efisiensi terjadi pada pengurangan biaya transportasi dan waktu kerja ASN yang kini dapat dialihkan untuk kegiatan produktif lainnya. Hasil implementasi selama dua minggu dengan total 113 (seratus tiga belas) dokumen pengajuan SP2D menunjukkan capaian efisiensi yang terukur.

- **Efisiensi waktu kerja ASN**

Sebelum inovasi, setiap dokumen SP2D membutuhkan waktu kerja ASN sekitar 1 jam dengan estimasi nilai waktu Rp. 30.000 per dokumen. Melalui penerapan SimPel SPaDu, waktu kerja berhasil dipangkas hingga 50%, karena proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan langsung dalam sistem tanpa pergerakan fisik berkas. Dari 113 dokumen pengajuan selama dua minggu, efisiensi waktu kerja ASN tercatat sebesar Rp. 15.000 × 113 dokumen = Rp1.695.000 (*Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Capaian ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga meningkatkan produktivitas ASN. Waktu yang sebelumnya tersita untuk pekerjaan administratif kini dapat dialihkan untuk kegiatan strategis seperti analisis keuangan, pemantauan kas daerah, dan peningkatan kualitas layanan publik.

- **Efisiensi komunikasi dan koordinasi (termasuk transportasi).**

Aspek efisiensi terbesar muncul dari penghapusan kebutuhan komunikasi dan koordinasi manual. Sebelum inovasi, setiap OPD rata-rata melakukan dua kali perjalanan koordinasi ke BPKAD untuk satu dokumen SP2D, dengan biaya transportasi mencapai Rp200.000 per dokumen serta biaya komunikasi administratif Rp5.000 per dokumen. Untuk 113 dokumen pengajuan selama dua minggu, total biaya yang dikeluarkan OPD dan BPKAD mencapai: Rp. 205.000 × 113 dokumen = Rp. 23.165.000 (*Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Setelah penerapan SimPel SPaDu, seluruh komunikasi dan koordinasi dilakukan secara digital melalui dashboard online dan sistem notifikasi otomatis, tanpa lagi memerlukan perjalanan atau surat-menyurat fisik.

Akibatnya, seluruh biaya komunikasi dan transportasi dapat dihemat hingga 100%, dengan total efisiensi mencapai Rp. 23.160.000 dalam dua minggu.

Jika digabungkan, kedua komponen efisiensi tersebut menghasilkan penghematan total sebesar Rp. 24.860.000 hanya dalam dua minggu implementasi. Dengan potensi penggunaan sistem sepanjang tahun, capaian efisiensi ini dapat mencapai Rp. 24.860.000 × 26 periode (1 tahun) = ± **Rp. 646.360.000** (*Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) per tahun.

Angka ini menggambarkan nilai efisiensi yang luar biasa besar bagi pemerintah daerah, sekaligus menjadi bukti konkret bahwa digitalisasi pelayanan SP2D mampu memberikan dampak ekonomi nyata.

3) Dampak Multiplikasi Ekonomi (Multiplier Effect)

Percepatan penerbitan SP2D berdampak langsung terhadap percepatan penyaluran dana pembangunan ke masyarakat. Dengan lebih cepatnya proses pencairan dana, aktivitas ekonomi lokal ikut terdorong melalui percepatan belanja barang/jasa dan belanja modal pemerintah.

Sebagai contoh, percepatan realisasi belanja pegawai, barang dan jasa serta modal senilai **Rp. 9.259.940.289** (*Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) mampu memicu peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor konstruksi, perdagangan, dan jasa.

Capaian ini tidak hanya mempercepat roda ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperluas dampak kesejahteraan masyarakat.

4) Peningkatan Kepercayaan Stakeholder

Pelaksanaan SimPel SPaDu turut meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah. Seluruh OPD kini dapat memantau status SP2D secara real-time melalui dashboard digital, sehingga tidak lagi bergantung pada laporan manual. Penyedia barang dan jasa merasakan kepastian pembayaran tepat waktu, sementara pihak perbankan memperoleh proses transaksi keuangan yang lebih cepat dan terdokumentasi secara sistematis.

Berdasarkan hasil survei internal BPKAD, tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap percepatan penerbitan SP2D mencapai lebih dari 83.93%, menandakan keberhasilan proyek ini dalam mewujudkan sistem keuangan daerah yang cepat, transparan, dan terpercaya.

5) *Kontribusi terhadap Stabilitas Fiskal dan Investasi*

Capaian berikutnya terlihat pada peningkatan stabilitas fiskal daerah serta terbentuknya iklim usaha yang lebih kondusif. Dengan percepatan realisasi belanja pemerintah, arus kas daerah menjadi lebih terprediksi dan efisien, sehingga memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha dan investor lokal.

Kepastian pembayaran dan transparansi layanan meningkatkan kredibilitas fiskal pemerintah daerah, mendorong kepercayaan dunia usaha untuk berinvestasi, serta menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. SimPel SPaDu dengan demikian berfungsi tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat kepercayaan terhadap tata kelola keuangan daerah.

2. Penerima Manfaat

1) Penerima Manfaat Internal

- **BPKAD Kabupaten OKU Timur**
Mendapat peningkatan produktivitas kerja dan efisiensi waktu, karena proses verifikasi, validasi, dan penerbitan SP2D kini dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi. Selain itu, kualitas data keuangan menjadi lebih akurat dan mudah dipantau untuk keperluan audit dan pelaporan keuangan daerah.
- **Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**
Memperoleh kepastian waktu pencairan dana kegiatan, kemudahan memantau status SP2D, dan peningkatan koordinasi dengan BPKAD. Dengan akses langsung terhadap dashboard layanan, OPD dapat menyesuaikan jadwal kegiatan dengan lebih efektif.
- **Pemerintah Daerah**
Mendapat manfaat berupa peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Proses yang lebih cepat dan akurat

memperkuat pencapaian target kinerja daerah serta mendukung reformasi birokrasi berbasis digital.

2) Penerima Manfaat Eksternal

- **Mitra Perbankan (Bank Sumsel Babel)**
Mendapat keuntungan dari sistem transaksi keuangan yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi dengan data keuangan daerah, sehingga mempercepat proses pencairan dan pengesahan transaksi keuangan pemerintah.
- **Penyedia Barang/Jasa dan Pelaku Usaha Lokal**
Memperoleh kepastian pembayaran lebih cepat, yang berdampak langsung pada kelancaran arus kas dan keberlanjutan operasional usaha. Proses pembayaran yang efisien juga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan pemerintah daerah.
- **Masyarakat Umum**
Mendapat manfaat tidak langsung dari percepatan realisasi program pembangunan dan layanan publik. Dana pembangunan yang cair lebih cepat mempercepat pelaksanaan proyek fisik dan sosial, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat perputaran ekonomi lokal.

C. PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN STRATEGIS

Peran kepemimpinan strategis dalam pelaksanaan proyek perubahan merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan inovasi pelayanan publik, khususnya dalam proyek Strategi Pelayanan SP2D yang Cepat, Akurat, dan Terpadu di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kepemimpinan strategis tidak hanya berperan sebagai pengarah dan pengendali, tetapi juga sebagai sumber inspirasi yang menggerakkan seluruh tim dan pemangku kepentingan untuk berkomitmen menjalankan perubahan dengan fokus pada hasil yang terukur dan keberlanjutan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai pentingnya dan implementasi kepemimpinan strategis dalam konteks ini:

1. **Manajemen Risiko, Pemanfaatan Peluang, dan Optimalisasi Sumber Daya Terbatas**

Kepemimpinan strategis berperan aktif dalam mengelola risiko, memanfaatkan peluang, serta mengoptimalkan sumber daya yang terbatas agar proyek perubahan tetap berjalan efektif dan efisien.

- **Manajemen Risiko Proaktif:** Pemimpin dengan cermat mengantisipasi berbagai hambatan sejak awal, mulai dari potensi keterlambatan verifikasi dokumen, resistensi perubahan dari staf, hingga keterbatasan infrastruktur digital. Setiap risiko dikartografikan secara detail melalui risk register dan ditangani dengan langkah mitigasi konkret seperti pendirian helpdesk internal, peningkatan literasi digital pegawai, serta koordinasi cepat antar unit untuk memastikan kelancaran proses tanpa hambatan berarti.
- **Pemanfaatan Peluang Strategis:** Momentum reformasi birokrasi dan dukungan penuh dari Bupati dijadikan landasan kuat untuk mempercepat legalisasi proyek serta membuka ruang kolaborasi luas dengan perbankan dan OPD terkait. Sinergi strategis ini bukan hanya mempercepat proses keuangan daerah berbasis digital, tetapi juga mengangkat citra pelayanan publik menuju era modernisasi yang progresif dan terpercaya.
- **Optimalisasi Sumber Daya Terbatas:** Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan SDM, kepemimpinan menunjukkan kecakapan luar biasa dalam memaksimalkan potensi internal melalui redistribusi tugas yang tepat sasaran, pemanfaatan teknologi low-cost namun berdampak tinggi seperti aplikasi digital internal SimPel SPaDu, serta pelibatan staf berbakat lintas bidang. Pendekatan kreatif ini memastikan seluruh aktivitas tetap berjalan efisien dan efektif tanpa mengorbankan kualitas maupun target kinerja yang telah ditetapkan.

2. **Kepemimpinan Visioner dan Komitmen Tinggi**

Kepemimpinan strategis dimulai dari visi yang jelas yaitu percepatan layanan SP2D secara akurat dan terpadu sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan transformasi digital. Kepala BPKAD sebagai Project Leader bersama Bupati sebagai sponsor memberikan komitmen penuh dengan mengesahkan nota persetujuan awal dan membentuk tim pelaksana. Komitmen ini menjadi

pendorong utama agar seluruh pemangku kepentingan fokus pada target percepatan waktu maksimal 2 hari kerja serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Struktur Organisasi dan Pengelolaan Tim yang Terarah

Kepemimpinan strategis tampak pada pembentukan struktur organisasi yang jelas dan pembagian peran rinci dalam tim pelaksana. Ada pembentukan Steering Committee yang mengarahkan kebijakan, serta Tim Kerja teknis yang menjalankan operasional harian dengan supervisi mentor dan coach. Kejelasan struktur ini memastikan koordinasi lintas unit efektif, mengurangi tumpang tindih tugas, dan memudahkan monitoring kemajuan proyek.

4. Pengelolaan Sumber Daya Optimal dan Pemberdayaan SDM

Pemimpin mengoptimalkan sumber daya organisasi, termasuk SDM yang diberi pelatihan teknis aplikasi digital SimPel SPaDu, pelatihan komunikasi organisasi, manajemen pemerintahan, serta pelatihan statistik untuk monitoring dan evaluasi berbasis data. Pendekatan coaching dan pengembangan kompetensi ini meningkatkan kapabilitas pegawai, mengurangi hambatan teknis, dan memperkuat budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif.

5. Strategi Komunikasi dan Manajemen Stakeholder Terfokus

Kepemimpinan strategis dalam mengelola stakeholder dilakukan dengan pendekatan segmentasi berdasarkan pengaruh dan kepentingan (promotor, laten, defender, apathetic). Strategi komunikasi intensif dilakukan dengan rapat mingguan, forum koordinasi resmi, penyampaian data dan informasi transparan, serta sosialisasi melalui media resmi sehingga tercipta dukungan kuat dari pihak internal dan eksternal. Pendekatan ini menekan resistensi, memperkuat legitimasi proyek, dan membangun sinergi multihelix antara pemerintah, bank, OPD, dan masyarakat.

6. Monitoring, Evaluasi Ketat, dan Pembelajaran Berkelanjutan

Kepemimpinan aktif melakukan pengawasan melalui indikator kinerja terukur, evaluasi rutin, dan penyempurnaan berbasis feedback. Penerapan dashboard monitoring real-time dan integrasi dengan perbankan menjadikan pelaporan akurat dan transparan. Pembelajaran dari evaluasi memperbaiki SOP, aplikasi, dan

proses bisnis SP2D secara iteratif sehingga proyek terus berkembang sesuai dinamika nyata di lapangan.

7. Kebijakan dan Regulasi Sebagai Landasan Kepemimpinan

Kepemimpinan memastikan keberlanjutan inovasi melalui dukungan regulasi seperti SK Bupati yang menetapkan SOP Penerbitan SP2D. Ini menjamin legalitas dan pengintegrasian proyek ke dalam renstra BPKAD serta tata kelola resmi daerah, memperkuat posisi proyek sebagai prioritas strategis pemerintahan.

8. Penciptaan Budaya Kerja Digital dan Kolaboratif

Pemimpin menanamkan budaya pelayanan cepat, akurat, dan transparan melalui pelatihan komunikasi dan manajemen perubahan. Fasilitasi forum koordinasi dan kolaborasi digital memperkuat ikatan antar unit kerja dan mitra sehingga proyek berjalan sinergis dengan komitmen tinggi dari seluruh tim.

9. Kepemimpinan Inovatif dan Proaktif Menghadapi Hambatan

Pemimpin proyek mampu mengidentifikasi hambatan utama seperti verifikasi manual dan koordinasi lambat dengan bank serta mengambil langkah inovatif dengan pengembangan aplikasi digital yang menyederhanakan alur kerja SP2D (One Flow) dan integrasi digital. Sikap proaktif ini mendorong percepatan layanan dan mengurangi risiko kegagalan.

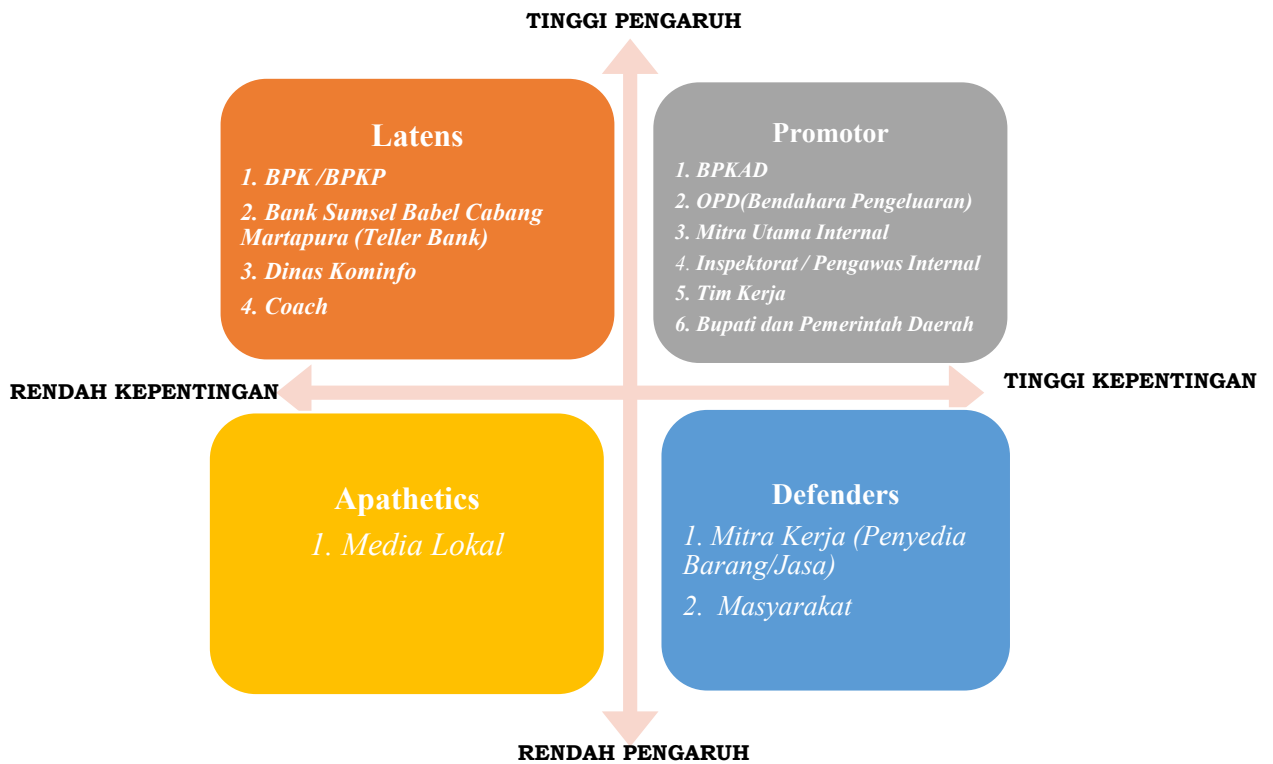
10. Pengelolaan Risiko dan Respons Cepat terhadap Kendala

Kepemimpinan strategis memfokuskan perhatian pada manajemen risiko proses penerbitan SP2D. Mekanisme percepatan pengambilan keputusan diimplementasikan, seperti klarifikasi dokumen yang cepat tanpa mengembalikan berkas, serta monitoring ketat atas potensi kendala teknis dan administratif. Hal ini mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan responsibilitas antar unit terkait.

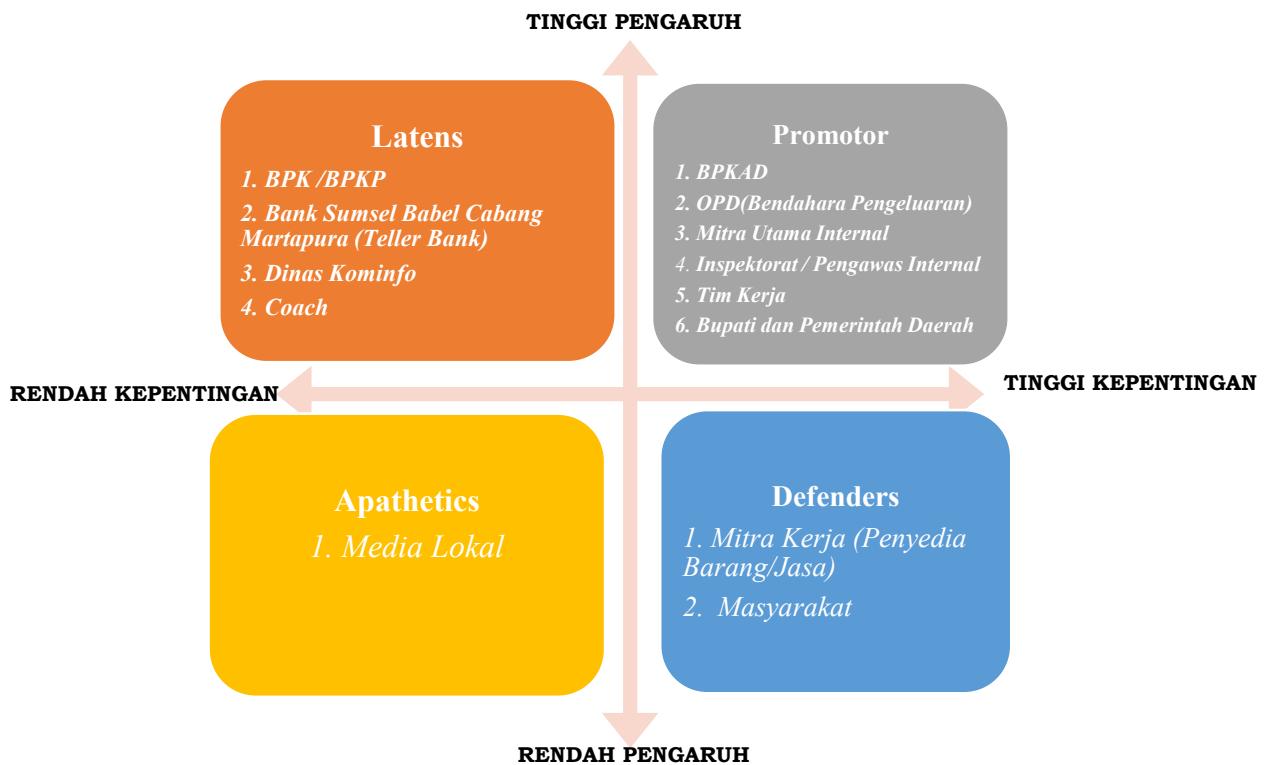
D. PELAKSANAAN STRATEGI MARKETING DAN DISEMINASI

1. Implementasi Analisis Stakeholder

Pada pelaksanaan proyek perubahan ini telah dilakukan identifikasi terhadap instansi/individu yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap hasil akhir aksi perubahan. Dalam pelaksanaannya *tidak terdapat perubahan stakeholder* baik pada kuadaran Latens, Promotor, Apathetics, dan Defenders seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3.23 Peta Stakeholder Awal (Saat Rancangan)



Gambar 3.24 Peta Stakeholder pada Pelaksanaan Proyek Perubahan

Pelaksanaan implementasi proyek perubahan *SimPel SPaDu* menunjukkan bahwa keberhasilan sistem sangat ditentukan oleh pengelolaan stakeholder. Pemetaan awal terhadap peran, kepentingan, dan pengaruh stakeholder telah diterjemahkan dalam bentuk strategi komunikasi yang aplikatif:

- 1) Promotor (BPKAD, OPD (Bendahara Pengeluaran), Mitra Utama Internal, Tim Kerja Bupati dan Pemerintah Daerah)

Stakeholder inti ini dikelola secara intensif dengan mekanisme *rapat koordinasi mingguan, monitoring progress berbasis data, dan sosialisasi kebijakan* pada forum resmi. Implementasi strategi ini terbukti efektif: proses pengajuan SP2D berkurang signifikan dari rata-rata 2-5 hari menjadi maksimal 2 hari.

- 2) Laten (Dinas Kominfo, BPK/BPKP, Bank Sumsel Babel, Coach) Komunikasi difokuskan pada manfaat strategis proyek. Hasil implementasi menunjukkan adanya dukungan teknis dari Dinas Kominfo berupa integrasi server, serta kolaborasi dengan Bank penyalur untuk mempermudah validasi pencairan dana.

- 3) Defender (Mitra Kerja, Masyarakat)

Stakeholder ini diposisikan sebagai penerima manfaat. Informasi perkembangan disebarkan melalui publikasi resmi BPKAD dan *media sosial pemerintah daerah*. Dampaknya, persepsi masyarakat terhadap transparansi meningkat, tercermin dari minimnya keluhan terkait keterlambatan SP2D.

- 4) Apathetic (Media Lokal)

Dilibatkan secara terbatas melalui publikasi sederhana. Hal ini mencegah terjadinya pemberitaan negatif yang dapat menurunkan kepercayaan publik.

Hasil implementasi analisis stakeholder ini memperlihatkan bahwa komunikasi yang terarah bukan hanya membangun dukungan, tetapi juga memperkuat legitimasi proyek perubahan di mata publik.

2. Implementasi Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi

Tahap implementasi menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya organisasi tidak hanya sekadar teori, melainkan menjadi faktor kunci percepatan layanan SP2D:

- 1) SDM (Sumber Daya Manusia)

Pegawai BPKAD dan bendahara OPD telah mengikuti *coaching clinic* dan pelatihan teknis penggunaan sistem. Dampaknya terlihat nyata, yaitu penurunan tingkat kesalahan administrasi dokumen SP2D hingga 80% dibandingkan sebelum implementasi.

2) Teknologi dan Sistem Informasi

Sistem SimPel SPaDu berhasil diujicobakan di lima OPD pilot project menunjukkan efisiensi waktu validasi dokumen lebih dari 80%.

3) Anggaran dan Sarana Prasarana

Optimalisasi alokasi anggaran difokuskan pada pengembangan sistem TI dan fasilitas server. Dengan ini, BPKAD tidak lagi mengandalkan mekanisme manual, sehingga biaya operasional administrasi menurun.

4) Jaringan Kerja Sama Antar Unit

Koordinasi lintas unit dilakukan secara sistematis. Kolaborasi dengan Bank penyalur mempercepat pencairan dana, sementara pengawasan Inspektorat memastikan kepatuhan prosedural.

Implementasi pemanfaatan sumber daya ini membuktikan bahwa keberhasilan inovasi tidak hanya ditopang teknologi, melainkan juga oleh *pembagian peran yang jelas, kapasitas SDM yang ditingkatkan, dan kolaborasi lintas lembaga*.

3. Implementasi Strategi Marketing (Marketing Mix 4P+1C)

Strategi marketing diterapkan untuk memastikan *SimPel SPaDu* diterima luas dan dipahami oleh seluruh stakeholder. Pada tahapan Implementasi Strategi Marketing secara konsisten melaksanakan strategi marketing yang dirancang pada proyek perubahan.

Proses diseminasi proyek perubahan merupakan salah satu komponen kunci dalam strategi marketing sektor publik dalam penyebarluasan ide atau gagasan dari proyek perubahan. Pelaksanaan diseminasi yang menjadi implementasi proyek perubahan ditujukan kepada stakeholder agar terjadi penyebaran informasi secara masif sehingga terbentuk persepsi yang sama dalam rangka menghasilkan outcomes proyek perubahan yang diinginkan. Diseminasi dilakukan secara kontinue baik

secara formal maupun dengan pertemuan langsung secara informal. Implementasi nyata setiap elemen marketing mix adalah:

1) Product (Produk)

Sistem *SimPel SPaDu* mulai dioperasionalkan pada tahap uji coba. Produk ini tidak hanya aplikasi digital, tetapi juga SOP baru yang lebih ringkas.

Outcome: OPD dapat melacak status SP2D secara real-time tanpa perlu konfirmasi manual ke BPKAD.

2) Price (Biaya)

Implementasi tidak menambah beban finansial bagi OPD. Justru, efisiensi tercapai dengan berkurangnya biaya komunikasi manual (telepon, kunjungan fisik).

Outcome: penghematan biaya operasional OPD.

3) Place (Distribusi)

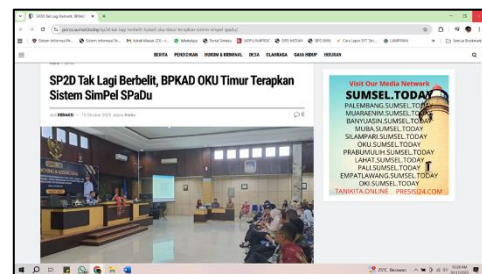
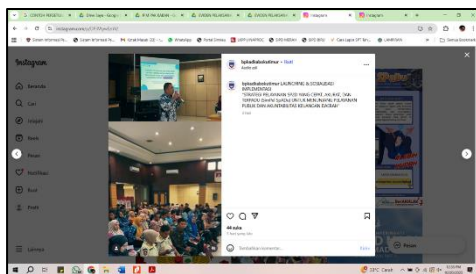
Sistem diakses melalui server BPKAD dan terhubung dengan OPD. Informasi distribusi diperkuat dengan penggunaan kanal resmi (website, email, grup koordinasi).

Outcome: akses informasi lebih merata dan cepat.

4) Promotion (Promosi/Komunikasi)

Promosi dilakukan melalui workshop, FGD, dan media internal pemerintah daerah (Instagram BPKAD OKU Timur @bpkadkabokutimur) serta melalui media online. Materi komunikasi dibuat ringkas dalam bentuk brosur dan infografis digital.

Outcome: meningkatnya tingkat adopsi sistem oleh OPD pilot project hingga 83.93%.



Gambar 3.25 Eviden Promosi

Untuk data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link

5) Customer (Stakeholder)

OPD sebagai pengguna utama diberi pendampingan langsung. Selain itu, masyarakat sebagai penerima manfaat dapat mengakses informasi pencairan dana melalui laporan kinerja yang dipublikasikan secara terbuka.

Outcome: tumbuhnya kepercayaan publik karena proses pencairan dana dianggap lebih transparan.

Proses diseminasi proyek perubahan merupakan salah satu komponen kunci dalam strategi marketing sektor publik dalam penyebarluasan ide atau gagasan dari proyek perubahan. Pelaksanaan diseminasi yang menjadi implementasi proyek perubahan ditujukan kepada stakeholder agar terjadi penyebaran informasi secara

masif sehingga terbentuk persepsi yang sama dalam rangka menghasilkan outcomes proyek perubahan yang diinginkan.

Implementasi strategi marketing ini membuktikan bahwa *SimPel SPaDu* tidak hanya menjadi inovasi teknis, tetapi juga berhasil dipasarkan sebagai produk layanan publik yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kepuasan stakeholder.

E. KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

Keberlanjutan proyek perubahan SimPel SPaDu dilaksanakan melalui tahapan jangka menengah dan jangka panjang yang dirancang untuk menjamin konsistensi, perluasan manfaat, serta penguatan institusionalisasi inovasi. Implementasi dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip adaptif, kolaboratif, dan akuntabel.

Komitmen keberlanjutan proyek perubahan ini menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi pelayanan penerbitan SP2D tidak hanya berhasil pada implementasi awal, tetapi juga mampu memberi dampak terukur secara konsisten dalam jangka menengah maupun panjang.

Pada periode jangka menengah, fokus keberlanjutan diarahkan pada penguatan kapabilitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan yang mendalam, optimalisasi pemanfaatan sistem digital untuk otomatisasi lebih luas, serta integrasi penuh antara sistem pengelolaan keuangan daerah dengan mitra perbankan. Selain itu, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data real-time serta pelaporan transparan ke publik menjadi fondasi untuk menjaga kepercayaan stakeholder dan mengidentifikasi peluang perbaikan berkelanjutan.

Tabel 3.7 Keberlanjutan Tahapan Jangka Menengah

Minggu	Tahapan Strategis	Kegiatan Utama	Output yang Diharapkan	Waktu	Pelaksana
B. Jangka Menengah (6 Bulan – 1 Tahun)					
1–8	Evaluasi & Perbaikan Awal	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi hasil uji coba sistem SP2D cepat. Identifikasi kendala teknis & non-teknis. Perbaikan sistem berdasarkan 	Sistem SP2D cepat diperbaiki sesuai feedback pengguna dan lebih stabil.	November s.d Desember 2025	BPKAD (Bidang Perbendaharaan & Bidang Akuntansi), Tim IT, Vendor Aplikasi

		masukan pengguna.			
9–16	Implementasi Penuh di BPKAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem di seluruh unit terkait di BPKAD. 2. Penyesuaian SOP mendukung proses digital. 3. Penetapan standar waktu layanan. 	SOP baru yang mendukung layanan SP2D cepat diterapkan penuh di internal BPKAD.	Januari s.d Februari 2026	BPKAD, Bagian Organisasi, Tim IT
17–24	Integrasi Lintas Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi sistem dengan Bank Sumsel Babel dan pihak ketiga. 2. Uji sinkronisasi data dan keamanan. 3. Penyiapan backup sistem. 	Sistem terintegrasi dengan pihak eksternal dan berjalan aman, sinkron, serta andal.	Maret s.d April 2026	BPKAD, Bank Sumsel Babel, Pihak Ketiga (Vendor IT), Dinas Kominfo
25–32	Sosialisasi & Pelatihan OPD (Bendahara Pengeluaran)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan penggunaan dashboard SP2D untuk seluruh OPD 2. Simulasi alur layanan dari pengajuan hingga pencairan. 	Seluruh OPD mampu mengakses dan memantau SP2D secara mandiri melalui dashboard.	Mei s.d Juni 2026	BPKAD, Seluruh OPD, Bagian Organisasi, Dinas Kominfo
33–40	Monitoring & Penyesuaian Fitur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan performa layanan. 2. Pengumpulan feedback dari OPD dan bank. 3. Penyesuaian fitur dan tampilan dashboard. 	Dashboard SP2D memiliki tampilan dan fitur yang lebih user-friendly dan responsif.	Juli s.d Agustus 2026	BPKAD, Bank Sumsel Babel, OPD Percontohan, Tim IT
41–52	Optimalisasi & Ekspansi Fitur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi performa sistem. 2. Penambahan fitur seperti notifikasi otomatis dan laporan mingguan. 3. Persiapan tahap pengembangan selanjutnya. 	Layanan SP2D cepat, akurat, dan terpadu dengan fitur tambahan yang mempercepat pengambilan keputusan.	September s.d Oktober 2026	BPKAD, Dinas Kominfo, Vendor Aplikasi, Tim IT

Memasuki jangka panjang, keberlanjutan proyek terwujud melalui pengembangan fitur-fitur lanjut berbasis analitik dan keamanan data yang semakin canggih, sehingga layanan tidak hanya cepat tetapi juga aman dan andal. Selain itu, menjadikan sistem dan praktik kerja yang telah terbangun sebagai bagian dari tata kelola resmi BPKAD dan Pemerintah Kabupaten memastikan operasional yang sistematis dan regulatif. Selanjutnya, upaya replikasi dan ekspansi model pelayanan ini ke kabupaten atau kota lain menjadi strategi untuk berbagi manfaat, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai pelopor inovasi layanan keuangan daerah yang modern dan transparan. Komitmen ini menegaskan keseriusan pimpinan dan seluruh tim dalam menjadikan inovasi bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan sebuah transformasi permanen dalam tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi hasil.

Tabel 3.8 Keberlanjutan Tahapan Jangka Panjang

Minggu	Tahapan Strategis	Kegiatan Utama	Output yang Diharapkan	Waktu	Pelaksana
C. Jangka Panjang (1 - 2 Tahun)					
53–60	Evaluasi Menyeluruh Implementasi Sistem	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan audit kinerja sistem SP2D cepat. Mengukur dampak terhadap waktu penerbitan dan kepuasan OPD. Menyusun rekomendasi pengembangan lanjutan. 	Laporan evaluasi lengkap dan rekomendasi pengembangan.	November 2026 dst.	BPKAD, Inspektorat Daerah, OPD terkait, Bank Sumsel Babel, Tim IT
61–72	Penguatan Integrasi Layanan Antar Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Integrasi penuh dengan sistem bank daerah dan mitra kerja. Penyesuaian SOP bersama lintas instansi. Penguatan kanal komunikasi digital. 	Sistem terintegrasi antar pihak secara penuh.		BPKAD, Bank Sumsel Babel, Dinas Kominfo, Seluruh OPD, Vendor IT
73–84	Pengembangan Fitur Lanjutan & Keamanan Data	<ol style="list-style-type: none"> Penambahan fitur analitik real-time serapan anggaran. Peningkatan sistem keamanan & enkripsi data. Pelatihan keamanan 	Fitur lanjutan aktif dan keamanan data terjamin.		BPKAD, Dinas Kominfo, Tim IT, Vendor Aplikasi, Seluruh OPD

		informasi untuk pengguna.			
85-96	Replikasi & Ekspansi Layanan ke Level Lebih Luas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replikasi model ke kabupaten/kota lain (benchmarking). 2. Penyusunan panduan best practice. 3. Presentasi hasil ke forum nasional. 	Model SP2D cepat menjadi best practice nasional.		BPKAD, Pemprov Sumsel, Kementerian Dalam Negeri, LAN RI, Kabupaten/Kota lain

Dukungan dan jaminan keberlanjutan proyek perubahan ini diwujudkan melalui penandatanganan komitmen melanjutkan proyek perubahan oleh *Project Leader* dan Bupati Ogan Komering Ulu Timur selaku mentor, sebagai bentuk komitmen untuk memastikan keberlanjutan implementasi proyek hingga mencapai hasil yang optimal.



Gambar 3.26 Pernyataan Komitmen Keberlanjutan

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yaitu BPKAD Kab. OKU Timur telah menyiapkan anggaran sebesar **Rp 100.000.000,00** (*seratus juta rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Anggaran ini dialokasikan dalam kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik, khususnya pada komponen **Belanja Sewa Server**.

Penyediaan dana tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten OKU Timur dalam mendukung keberlanjutan Proyek Perubahan SimPle SPaDu, yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan integrasi layanan publik berbasis digital di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan dukungan anggaran ini, diharapkan operasional sistem dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)											
Lokasi	: Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Martapura, Kotabaru Selatan											
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember											
Keterangan	:											

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12 Bulan	Bulan	5.000.000,00	-	60.000.000,00	12 Bulan	Bulan	5.000.000,00	-	60.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00	
	[*] Belanja Sewa Server Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00	
	[-] Belanja Sewa Server					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00	
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Server	1 Semester	Semester	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Semester	Semester	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						172.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					172.000.000,00	0,00

Gambar 3.27 Dukungan Anggaran

Adapun data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link

F. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR : PELAKSANAAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI (BANKOM) SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Implementasi proyek perubahan ini membutuhkan dukungan dan support dari para stakeholder baik internal maupun eksternal. Pengembangan kompetensi stakeholder dalam proyek perubahan ini tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Hasil Pemberdayaan Organisasi Pembelajar

No	Pihak Terdampak	Kompetensi yang Ditingkatkan	Metode / Kegiatan	Hasil Pengembangan Kompetensi	Target Waktu	Pelaksanaan
1	BPKAD, OPD (Bendahara Pengeluaran), Bank, Mitra Kerja	Komunikasi & koordinasi lintas instansi	Kick-off meeting lintas instansi, pembentukan tim strategi SP2D	Terjalannya sinergi dan kolaborasi efektif antar instansi sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan pemecahan masalah terkait proses SP2D.	Minggu ke-2 & ke-4	04 September 2025 18 September 2025
2	BPKAD	Pemahaman & pengoperasian aplikasi	Pelatihan teknis, uji coba sistem SimPel SPaDu	Peningkatan kemampuan teknis pegawai dalam menggunakan sistem aplikasi, yang mempermudah monitoring real-time dan validasi otomatis proses SP2D.	Minggu ke-6 & ke-8	28 September 2025 16 Oktober 2025
3	BPKAD & OPD (Bendahara Pengeluaran)	Kecepatan & akurasi penerbitan SP2D	Penyusunan SOP, simulasi penerbitan ≤ 2 hari, uji kelayakan input data	Terbentuk budaya kerja terstandarisasi dengan SOP baru, menjadikan proses penerbitan SP2D lebih cepat (maksimal 2 hari) dan akurat, mengurangi kesalahan input data.	Minggu ke-9 s.d. ke-16	8 September 2025 18 September 2025
4	BPKAD & OPD (Bendahara Pengeluaran)	Budaya kerja digital & kolaboratif	Workshop kolaborasi digital, implementasi kanal komunikasi resmi	Terbentuk budaya kerja adaptif dengan kerja sama digital yang efektif, peningkatan motivasi pegawai dalam menggunakan teknologi, serta komunikasi resmi antar unit kerja.	Minggu ke-17 & ke-20	01 dan 16 Oktober 2025
5	Seluruh Pegawai & Mitra Kerja	Penerimaan perubahan (mengurangi resistensi)	Sosialisasi manfaat inovasi, survei persepsi & kepuasan	Peningkatan pemahaman dan penerimaan inovasi melalui sosialisasi manfaat dan survei persepsi, yang mengurangi resistensi dan meningkatkan komitmen atas perubahan.		16 Oktober 2025

1. Komunikasi & koordinasi lintas instansi

Sebagai bentuk pengembangan kompetensi dalam mendukung keberhasilan implementasi proyek perubahan SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat dan Terpadu) di BPKAD Kabupaten OKU Timur, telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi yang melibatkan berbagai pihak terdampak, antara lain BPKAD, Organisasi Perangkat Daerah (Bendahara Pengeluaran), pihak Bank, serta mitra kerja terkait.

Kegiatan dilaksanakan dalam dua tahap melalui Kick-off Meeting lintas instansi dan pembentukan Tim Strategi SP2D. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Minggu ke-2 bulan September, tepatnya tanggal 4 September 2025, dan dilanjutkan dengan pertemuan kedua pada Minggu ke-4 bulan September, yaitu tanggal 18 September 2025.



Gambar 3.28 Eviden Komunikasi & koordinasi lintas instansi

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi komunikasi dan koordinasi lintas instansi dalam proses pengelolaan dan percepatan penerbitan SP2D. Melalui kegiatan ini, para peserta memperoleh pemahaman bersama tentang mekanisme kerja terintegrasi yang akan diterapkan dalam sistem SimPel SPaDu, sekaligus menyamakan persepsi dalam penyusunan alur kerja dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terjalannya sinergi dan kolaborasi yang efektif antar instansi, baik internal BPKAD maupun dengan instansi eksternal seperti Bank dan mitra kerja. Dengan meningkatnya komunikasi dan koordinasi lintas

lembaga, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, dan hambatan-hambatan dalam penerbitan SP2D dapat diidentifikasi serta diselesaikan secara bersama-sama.

Dengan demikian, kegiatan peningkatan kompetensi ini menjadi ***bukti nyata komitmen seluruh pihak dalam memperkuat kapasitas organisasi dan mempercepat transformasi layanan keuangan daerah menuju tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan responsif.***

2. Pemahaman & pengoperasian aplikasi

Sebagai bagian dari tahapan implementasi proyek perubahan SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat dan Terpadu), BPKAD Kabupaten OKU Timur melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi teknis yang difokuskan pada pemahaman dan pengoperasian aplikasi sistem SimPel SPaDu.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pelatihan teknis dan uji coba sistem, yang berlangsung pada Minggu ke-6 dan ke-8, tepatnya pada tanggal 28 September 2025 dan 16 Oktober 2025. Peserta kegiatan adalah pejabat dan staf teknis BPKAD yang secara langsung terlibat dalam proses pengelolaan dan penerbitan SP2D.

Pelatihan teknis difokuskan pada penguasaan fitur-fitur utama dalam aplikasi, meliputi input data dokumen, validasi otomatis, serta proses monitoring real-time. Selanjutnya, pada tahap uji coba sistem, dilakukan simulasi penggunaan SimPel SPaDu dalam kondisi kerja nyata, sehingga peserta dapat memahami alur kerja digital secara utuh mulai dari pengajuan dokumen hingga penerbitan SP2D.

Melalui kegiatan ini, ***terjadi peningkatan signifikan dalam kemampuan teknis pegawai BPKAD dalam menggunakan sistem aplikasi.*** Pegawai menjadi lebih terampil dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses layanan, meminimalisasi kesalahan input, dan memastikan validasi data berjalan secara otomatis.



Gambar 3.29 Eviden Pemahaman & pengoperasian aplikasi

Hasil pengembangan kompetensi ini berdampak langsung terhadap peningkatan efisiensi dan akurasi layanan SP2D di BPKAD Kabupaten OKU Timur, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya pelayanan keuangan daerah yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan semangat inovasi SimPel SPaDu.

3. Kecepatan & akurasi penerbitan SP2D

Dalam rangka memperkuat implementasi inovasi SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat dan Terpadu), BPKAD Kabupaten OKU Timur bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi yang difokuskan pada peningkatan kecepatan dan akurasi penerbitan SP2D.

Kegiatan ini yang seharusnya dilaksanakan secara bertahap mulai dari Minggu ke-9 sampai dengan Minggu ke-16, namun dilakukan lebih awal guna mendukung pelaksanaan kegiatan dengan pelaksanaan utama pada tanggal 8 September 2025 hingga 18 September 2025. Kegiatan mencakup tiga agenda utama, yaitu penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru, simulasi proses penerbitan SP2D maksimal dalam waktu dua hari, serta uji kelayakan dan validasi input data ke dalam sistem SimPel SPaDu.

Melalui proses penyusunan SOP, tim BPKAD dan OPD berhasil menyepakati langkah-langkah kerja yang lebih efisien, terukur, dan mudah diimplementasikan oleh seluruh pihak terkait. Kegiatan simulasi kemudian dilakukan untuk menguji efektivitas SOP tersebut dalam mempercepat proses penerbitan SP2D tanpa mengurangi ketelitian dan akurasi data. Selanjutnya, tahap uji kelayakan input data memastikan

bahwa sistem dapat memvalidasi data secara otomatis dan meminimalkan potensi kesalahan manual.



Gambar 3.30 Eviden Kecepatan & akurasi penerbitan SP2D

Dari kegiatan ini, *diperoleh hasil nyata berupa terbentuknya budaya kerja baru yang terstandarisasi dan berbasis pada prosedur operasional yang jelas*. Proses penerbitan SP2D kini dapat diselesaikan dalam waktu maksimal dua hari kerja, dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi serta berkurangnya kesalahan input data secara signifikan.

4. Budaya kerja digital & kolaboratif

Sebagai bagian dari penguatan transformasi digital dalam proyek perubahan SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat dan Terpadu), BPKAD Kabupaten OKU Timur bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi yang berfokus pada pembentukan budaya kerja digital dan kolaboratif.

Kegiatan ini pada awalnya dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada Minggu ke-17 dan ke-20, namun dilaksanakan lebih awal pada tanggal 01 dan 16 Oktober 2025. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Workshop Kolaborasi Digital dan implementasi kanal komunikasi resmi antar unit kerja.

Workshop Kolaborasi Digital bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh peserta mengenai pentingnya kolaborasi berbasis teknologi dalam mendukung efektivitas kerja dan pelayanan publik. Dalam kegiatan ini, peserta dilatih untuk memanfaatkan berbagai platform komunikasi dan kolaborasi digital secara optimal,

seperti penggunaan grup koordinasi resmi, sistem notifikasi daring, dan berbagi dokumen secara real-time melalui kanal digital yang telah disepakati bersama.

Selain itu, implementasi kanal komunikasi resmi antar unit kerja difokuskan pada pembentukan saluran komunikasi yang terstruktur, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Kanal ini menjadi media koordinasi utama antara BPKAD dan OPD dalam penyampaian dokumen, klarifikasi data, serta pelaporan progres penerbitan SP2D.



Gambar 3.31 Eviden Budaya kerja digital & kolaboratif

Hasil dari kegiatan ini *menunjukkan terbentuknya budaya kerja adaptif yang berbasis digital dan kolaboratif di lingkungan BPKAD dan OPD*. Pegawai menjadi lebih termotivasi untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung kinerja, serta tercipta komunikasi lintas unit yang lebih cepat, efisien, dan terarah.

Dengan demikian, kegiatan peningkatan kompetensi ini tidak hanya memperkuat kemampuan teknis, tetapi juga membangun semangat transformasi budaya kerja digital yang selaras dengan tujuan inovasi SimPel SPaDu, yakni mewujudkan pelayanan SP2D yang cepat, terintegrasi, dan modern.

5. Penerimaan perubahan (mengurangi resistensi)

Sebagai langkah penting dalam memastikan keberhasilan implementasi inovasi SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat dan Terpadu), BPKAD Kabupaten OKU Timur melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi yang berfokus pada penerimaan perubahan dan pengurangan resistensi terhadap inovasi.

Kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai BPKAD serta mitra kerja eksternal, dengan pelaksanaan utama pada tanggal 16 Oktober 2025. Bentuk kegiatan yang

dilakukan meliputi sosialisasi manfaat inovasi SimPel SPaDu serta survei persepsi dan kepuasan pegawai dan mitra kerja terhadap penerapan sistem baru tersebut.

Sosialisasi manfaat inovasi dilakukan secara interaktif untuk memperkenalkan tujuan, keunggulan, dan dampak positif penerapan SimPel SPaDu terhadap percepatan pelayanan SP2D, peningkatan transparansi, dan kemudahan koordinasi antarinstansi. Dalam sesi ini, peserta diberikan ruang untuk berdiskusi, menyampaikan masukan, serta mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin timbul selama masa transisi menuju sistem digital terpadu.

Selanjutnya, survei persepsi dan kepuasan dilaksanakan guna mengukur tingkat penerimaan dan kesiapan pegawai serta mitra kerja terhadap perubahan. Hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman, dukungan, dan komitmen terhadap inovasi SimPel SPaDu, sekaligus menurunkan tingkat resistensi yang semula muncul akibat perubahan pola kerja konvensional menjadi digital.



Gambar 3.32 Eviden Penerimaan perubahan (mengurangi resistensi)

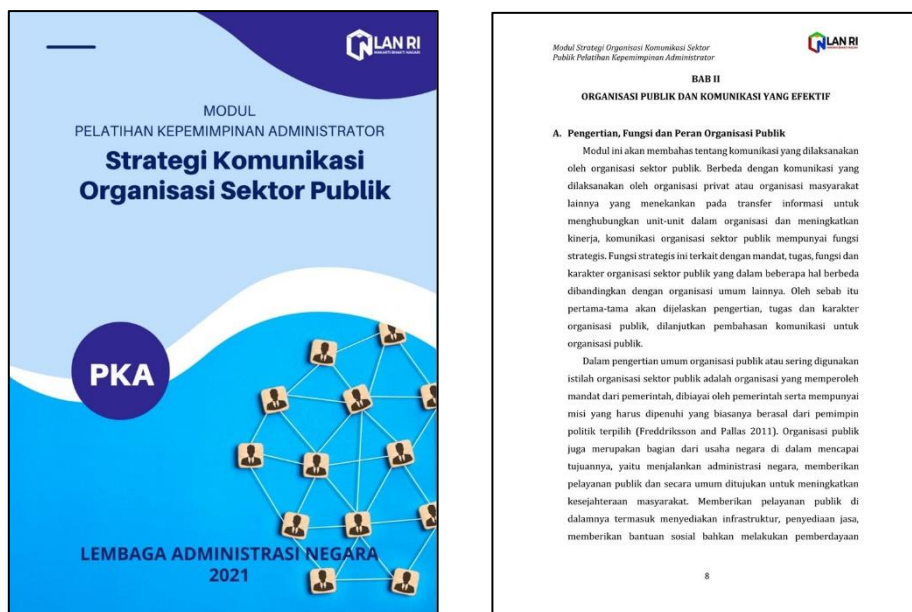
Dengan demikian, kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa strategi komunikasi dan pendekatan partisipatif mampu membangun kesadaran dan dukungan luas dari seluruh pihak terkait. Terjadi peningkatan penerimaan terhadap perubahan, terbentuk semangat kolaboratif, serta komitmen bersama untuk mewujudkan keberhasilan implementasi SimPel SPaDu sebagai inovasi pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Timur.

G. KETERKAITAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN PROYEK PERUBAHAN

Dalam rangka memastikan keberhasilan implementasi proyek perubahan “*SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat, Akurat, dan Terpadu)*” di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, diperlukan memanfaatkan mata pelatihan yang tersedia dalam Learning Management System (LMS) Lembaga Administrasi Negara yang bersifat spesifik, aplikatif, dan langsung terkait kebutuhan proyek, yaitu: Pelatihan Komunikasi Organisasi, Pelatihan Manajemen Pemerintahan, dan Pelatihan Statistik & Metode Penelitian.

Ketiga pelatihan ini bukan hanya bersifat pendukung, melainkan menjadi instrumen strategis dalam membentuk kompetensi teknis dan manajerial yang dibutuhkan untuk mempercepat penerbitan SP2D.

1. Komunikasi Organisasi



Gambar 3.33 Eviden Sumber Pelatihan Komunikasi Organisasi

Pelatihan Komunikasi Organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kebutuhan peningkatan koordinasi lintas bidang dalam proyek perubahan SimPel SPaDu. Sebelum inovasi ini dikembangkan, proses penerbitan SP2D di BPKAD sering kali mengalami keterlambatan akibat lemahnya komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, seperti Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, OPD pengusul SPM, serta pihak perbankan yang berperan dalam proses pencairan dana. Komunikasi yang tidak terstruktur

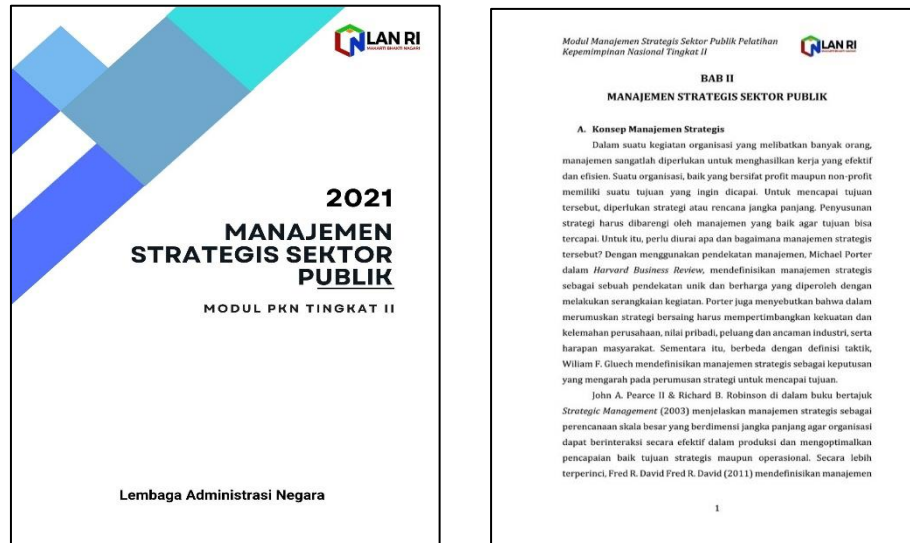
dan masih bersifat manual menimbulkan duplikasi informasi, miskomunikasi, dan keterlambatan konfirmasi status berkas.

Dalam konteks ini, pelatihan Komunikasi Organisasi menjadi fondasi penting untuk memperbaiki pola interaksi antar unit kerja. Kompetensi yang diperoleh dari pelatihan ini diaplikasikan dalam pembentukan protokol komunikasi standar proyek SimPel SPaDu, yang mengatur tata cara penyampaian informasi, klarifikasi dokumen, dan pelaporan kendala secara cepat dan efektif. Dengan penerapan prinsip komunikasi dua arah (*two-way communication*), setiap hambatan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan tanpa menunggu instruksi hierarkis yang berbelit.

Selain itu, hasil pelatihan juga diterapkan dalam strategi *change management* proyek perubahan. Komunikasi efektif digunakan sebagai instrumen dalam membangun kesadaran dan dukungan seluruh pegawai terhadap inovasi SimPel SPaDu. Melalui pendekatan komunikasi internal yang terencana, resistensi terhadap perubahan dapat ditekan, dan tingkat partisipasi pegawai meningkat signifikan. Dengan demikian, keterampilan komunikasi organisasi yang diperoleh melalui pelatihan ini berperan langsung dalam menjaga soliditas tim, meningkatkan kecepatan koordinasi, serta menciptakan iklim kerja yang terbuka dan kolaboratif.

Dalam perspektif strategis, pelatihan ini menjadi kunci keberhasilan perubahan budaya organisasi di BPKAD dari pola birokrasi konvensional menjadi birokrasi kolaboratif yang berbasis komunikasi digital dan transparansi informasi. Keberhasilan mempercepat waktu penerbitan SP2D menjadi maksimal dua hari kerja tidak lepas dari keberhasilan implementasi pola komunikasi yang efektif dan efisien yang berakar dari hasil pelatihan ini.

2. Manajemen Pemerintahan



Gambar 3.34 Eviden Sumber Pelatihan Manajemen Pemerintahan

Pelatihan Manajemen Pemerintahan memberikan kontribusi fundamental terhadap penguatan aspek tata kelola (governance) dan kepemimpinan dalam pelaksanaan proyek perubahan SimPel SPaDu. Proyek ini tidak hanya berorientasi pada penyederhanaan proses teknis penerbitan SP2D, tetapi juga menuntut kemampuan manajerial yang kuat dalam mengelola perubahan organisasi, mengambil keputusan strategis, dan mengintegrasikan berbagai sumber daya lintas bidang dan lintas instansi.

Hasil dari pelatihan Manajemen Pemerintahan diaplikasikan langsung dalam pembentukan struktur tim pelaksana proyek perubahan yang berbasis prinsip manajemen modern, yakni *planning, organizing, actuating, and controlling* (POAC). Para peserta pelatihan, yang juga merupakan bagian dari tim proyek, menerapkan prinsip ini dalam penyusunan rencana kerja, pembagian tugas, penetapan indikator kinerja, serta monitoring capaian implementasi.

Lebih jauh, pelatihan ini memperkuat kapasitas kepemimpinan adaptif dalam menghadapi resistensi internal serta dinamika perubahan sistem kerja di BPKAD. Kemampuan manajerial yang dikembangkan melalui pelatihan ini juga tercermin dalam keberhasilan menciptakan mekanisme klarifikasi cepat, yang menjadi inovasi turunan dari SimPel SPaDu. Mekanisme tersebut memastikan bahwa setiap berkas yang masih memerlukan perbaikan tidak perlu

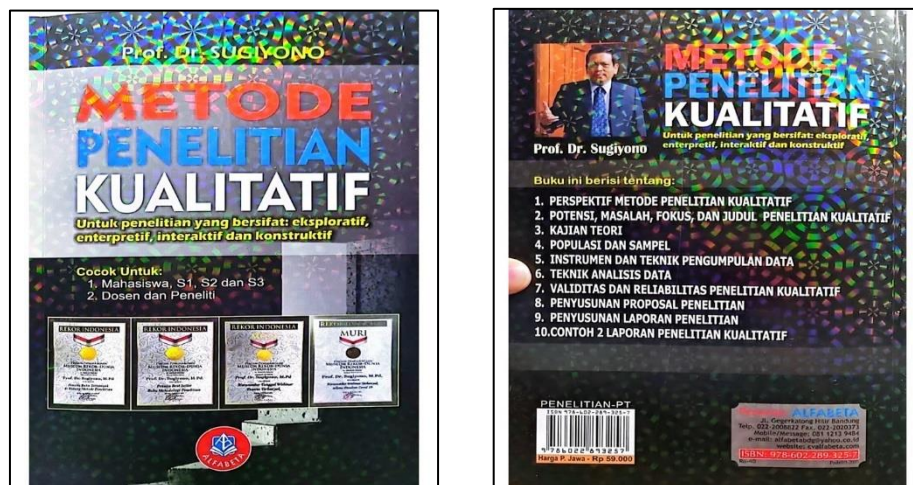
dikembalikan ke tahap awal, tetapi dapat diklarifikasi secara digital melalui sistem yang terintegrasi.

Pelatihan ini juga membekali peserta dengan wawasan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah dan prinsip good governance, sehingga seluruh kebijakan proyek tetap berada dalam koridor hukum dan akuntabilitas publik. Melalui pemahaman terhadap regulasi seperti PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, tim proyek dapat memastikan setiap inovasi memiliki dasar legal yang kuat.

Keterkaitan pelatihan ini terhadap proyek perubahan juga terlihat dalam kemampuan tim untuk mengelola stakeholder eksternal. Dengan pendekatan manajemen pemerintahan kolaboratif, tim proyek mampu menjalin kemitraan yang sinergis dengan Bank Sumsel Babel, Dinas Kominfo, serta seluruh OPD pengguna layanan keuangan daerah. Kolaborasi lintas sektor ini merupakan bentuk penerapan langsung teori manajemen pemerintahan berbasis jejaring (network governance) yang menjadi salah satu materi inti dalam pelatihan.

Dengan demikian, pelatihan Manajemen Pemerintahan menjadi tulang punggung keberhasilan proyek SimPel SPaDu, karena memperkuat struktur organisasi proyek, meningkatkan kualitas kepemimpinan birokrasi, serta memastikan proses perubahan berjalan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

3. Statistik dan Metode Penelitian



Gambar 3.35 Eviden Sumber Pelatihan Statistik dan Metode Penelitian

Pelatihan Statistik dan Metode Penelitian berperan penting dalam mendukung aspek evidence-based policy pada pelaksanaan proyek perubahan SimPel SPaDu. Pelatihan ini mengarahkan peserta untuk berpikir analitis, objektif, dan berbasis data dalam setiap pengambilan keputusan terkait manajemen keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan proyek, kemampuan statistik yang diperoleh dari pelatihan ini digunakan untuk melakukan analisis baseline kinerja penerbitan SP2D. Data historis selama lima tahun terakhir (2020–2024) dianalisis untuk mengukur rata-rata waktu penerbitan, volume transaksi, dan tingkat kesalahan administrasi. Hasil analisis tersebut menjadi dasar penyusunan indikator kinerja utama (IKU) proyek SimPel SPaDu, yang kemudian digunakan untuk memantau efektivitas dan efisiensi setelah inovasi diterapkan.

Lebih lanjut, pelatihan ini menghasilkan peningkatan kemampuan tim dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data keuangan secara sistematis. Melalui metode statistik deskriptif dan inferensial, tim proyek dapat mengevaluasi dampak inovasi terhadap peningkatan kecepatan layanan, kepuasan pengguna, serta akurasi data keuangan. Kemampuan ini menjadi dasar bagi penyusunan dashboard monitoring SP2D berbasis data real-time, yang menjadi salah satu komponen utama inovasi SimPel SPaDu.

Dalam konteks manajemen kinerja, pelatihan ini juga berperan dalam pengembangan sistem evaluasi proyek berbasis data kuantitatif dan kualitatif. Setiap tahap pelaksanaan proyek dievaluasi berdasarkan indikator yang terukur, seperti waktu proses, tingkat akurasi dokumen, dan volume SP2D yang diterbitkan. Hal ini menjadikan proses monitoring lebih objektif dan memungkinkan manajemen mengambil keputusan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Keterkaitan pelatihan ini terhadap proyek perubahan terlihat jelas dalam penerapan prinsip data-driven governance. Dengan penguasaan metode penelitian dan statistik, tim proyek tidak hanya mengandalkan intuisi atau kebiasaan birokratik, tetapi menggunakan bukti empiris sebagai dasar kebijakan dan inovasi. Akibatnya, proses penerbitan SP2D menjadi lebih efisien, akurat,

dan akuntabel, serta hasil inovasi dapat diukur secara ilmiah untuk dijadikan best practice dalam replikasi ke daerah lain.

4. Integrasi Keterkaitan Ketiga Pelatihan terhadap Keberhasilan Proyek Perubahan

Ketiga pelatihan tersebut saling melengkapi dan terintegrasi secara fungsional dalam mendukung keberhasilan proyek perubahan SimPel SPaDu. Pelatihan Komunikasi Organisasi memperkuat dimensi koordinasi dan membangun kultur kolaboratif; Pelatihan Manajemen Pemerintahan meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola proyek; sementara Pelatihan Statistik dan Metode Penelitian memberikan dasar analitis dan ilmiah bagi pengambilan keputusan berbasis bukti.

Sinergi ketiga pelatihan ini menciptakan siklus manajemen inovasi yang utuh: komunikasi yang efektif memastikan koordinasi berjalan lancar, manajemen pemerintahan yang baik menjamin pelaksanaan berjalan efisien, dan analisis statistik memastikan hasil dapat diukur secara objektif. Integrasi ketiganya menghasilkan percepatan penerbitan SP2D, peningkatan akurasi data keuangan, serta terciptanya sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Secara substantif, keterkaitan pelatihan-pelatihan tersebut membuktikan bahwa keberhasilan proyek perubahan SimPel SPaDu bukan hanya hasil dari penerapan teknologi digital, melainkan hasil dari transformasi sumber daya manusia birokrasi yang berpengetahuan, berkompeten, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, pelaksanaan ketiga pelatihan pendukung ini telah memperkuat kapasitas kelembagaan BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mewujudkan visi “Pelayanan Keuangan Daerah yang Cepat, Akurat, dan Terpadu” secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, ketiga pelatihan ini telah memberikan dampak langsung terhadap percepatan penerbitan SP2D, sekaligus meningkatkan kapasitas SDM BPKAD dalam komunikasi, manajemen pemerintahan, dan analisis data. Hal ini menjadikan “*SimPel SPaDu*” tidak hanya sebuah inovasi sistem, tetapi juga didukung oleh kompetensi aparatur yang lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan.

**FORM PERSETUJUAN COACH PADA PEMILIHAN MATA PELATIHAN PILIHAN DALAM MENDUKUNG AKTUALISASI
KEPEMIMPINAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXI TAHUN 2025**

Nama Peserta : Agustian Pahrimala, S.H., M.H.
 NIP : 19730815 199903 1 008
 NDH : 8
 Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 Nama Coach : Dr. Ir. Bambang Budhianto
 NIP : 19610526 198503 1 002

No	Judul Proyek/Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Proyek/Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
1	2	3	4	5	6
1	Strategi Pelayanan SP2D yang Cepat, Akurat, Terpadu untuk Menunjang Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Komunikasi Organisasi	Sosialisasi/Bimtek/FGD/Asistensi/Rapat Koordinasi/FGD	Meningkatkan kemampuan komunikasi dan koordinasi antar bidang di BPKAD serta antara BPKAD dan OPD pengusul, sehingga proses verifikasi dan klarifikasi dokumen SP2D dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan bebas miskomunikasi. Hasil pelatihan ini mendukung terbentuknya budaya kerja kolaboratif, komunikasi dua arah, dan penyampaian informasi yang transparan dalam implementasi SimPel SPaDu.	<ul style="list-style-type: none"> LMS Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2019). Organizational Behavior. Pearson. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Panduan Implementasi Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB.
2		Manajemen Pemerintahan	Sosialisasi/Bimtek/FGD/Asistensi/Rapat Koordinasi/FGD	Memperkuat kapasitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan proyek SimPel SPaDu, termasuk pengorganisasian tim, penetapan indikator kinerja, dan pengambilan keputusan cepat	<ul style="list-style-type: none"> LMS Osborne, D. & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government. Addison-Wesley.

				berbasis prinsip good governance dan akuntabilitas publik. Pelatihan ini menghasilkan peningkatan kemampuan manajerial ASN serta penerapan mekanisme “Klarifikasi Cepat” dalam proses penerbitan SP2D.	<ul style="list-style-type: none"> • PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. • Permendagri No. 77 Tahun 2020. • LAN RI (2023). Pedoman Kepemimpinan Adaptif dalam Birokrasi Digital.
3		Statistik dan Metode Penelitian	Sosialisasi/Bimtek/FGD/Asistensi/Rapat Koordinasi/FGD	Mendukung kemampuan analisis data dan evaluasi berbasis bukti (evidence-based policy making) dalam proyek SimPel SPaDu. Hasil pelatihan digunakan untuk menyusun indikator kinerja, menganalisis efektivitas inovasi, serta membangun dashboard monitoring SP2D berbasis data real-time yang meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan keuangan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • LMS • Creswell, J.W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications. • Sugiyono (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. • Data SP2D BPKAD OKU Timur (2020–2024).

Palembang, Oktober 2025
Coach,

Dr. Ir. Bambang Budhianto
NIP. 19610526 198503 1 002

H. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

1. Nilai Sikap Perilaku Saat Penyusunan RPP

Hasil penilaian diri terkait dengan kompetensi manajerial yang telah dilakukan oleh project leader dan mentor pada saat menggagas proyek perubahan dan menyusun rancangan proyek perubahan yaitu pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu integritas, kerja sama dan mengelola perubahan didapatkan nilai rata-rata sebesar 8,90 yang masuk pada kriteria baik,

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR PKN TK. II ANGKATAN XXI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025					
Nama	: Agustian Pahrimala, S.H., M.H.	Nama Mentor	: Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M.		
NIP	: 19730815 199903 1 008	NIP	: -		
Jabatan	: Kepala Badan	Jabatan	: Bupati		
Instansi	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Instansi	: Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur		
Program	: Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025				
Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9.2	9.3	9.27	Istimewa
	Komitmen	9	9.1	9.07	Istimewa
	Kedisiplinan	9.1	9.2	9.17	Istimewa
	Kejujuran	9.1	9.2	9.17	Istimewa
	Konsistensi	9.2	9.3	9.27	Istimewa
	Pengambilan Keputusan	9.2	9.3	9.27	Istimewa
	Rata-Rata	9.13	9.23	9.20	Istimewa
Kerjasama	Kerjasama Internal	8.8	8.9	8.87	Baik
	Kerjasama Eksternal	8.7	8.9	8.84	Baik
	Komunikasi	8.8	8.9	8.87	Baik
	Fleksibilitas	8.8	8.9	8.87	Baik
	Komitmen dalam Tim	8.8	8.9	8.87	Baik
	Rata-Rata	8.78	8.90	8.86	Baik
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8.7	8.9	8.84	Baik
	Adaptabilitas	8.8	8.9	8.87	Baik
	Pengembangan orang lain	8.8	8.9	8.87	Baik
	Orientasi pada hasil	8.8	8.9	8.87	Baik
	Inisiatif	8.8	8.9	8.87	Baik
Rata-Rata	8.78	8.90	8.86	Baik	
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.90	9.01	8.98	Baik
Keterangan Kualifikasi					
9.99-10 Istimewa					
7-8.99 Baik					
5-6.99 Cukup					
3-4.99 Kurang					
1-2.99 Sangat Kurang					

Gambar 3.36 Rekap Nilai Sikap Perilaku Saat Penyusunan RPP

Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Project Leader pada saat menggagas proyek perubahan dan menyusun rancangan proyek perubahan, nilai pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu integritas 9.13, kerja sama 8,78 dan mengelola perubahan 8,78 sehingga diperoleh rata-rata 8.90. Sedangkan penilaian potensi diri project leader yang diberikan oleh mentor, untuk aspek integritas 9.23, kerja sama 8.90 dan mengelola perubahan 8.90, sehingga diperoleh nilai rata-rata 9.01. Dari hasil penilaian project leader dan mentor di atas terdapat gap/perbedaan. Sehingga untuk menutup gap/perbedaan tersebut telah dilakukan Pengembangan Potensi Diri.

2. Nilai Sikap Perilaku Setelah Pengembangan Potensi diri

Setelah melaksanakan Pengembangan Potensi Diri dan Implementasi Proyek Perubahan, didapat hasil penilaian mandiri dilakukan oleh *Project Leader* pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu integritas 9.13, kerjasama 8.84 dan mengelola perubahan 8.84 sehingga diperoleh rata-rata 8,94. Sedangkan penilaian potensi diri project leader yang diberikan oleh mentor, untuk aspek integritas 9.23, kerja sama 8.90 dan mengelola perubahan 8.90, sehingga diperoleh nilai rata-rata 9.01. Sehingga Hasil penilaian diri terkait dengan kompetensi manajerial yang telah dilakukan oleh project leader dan mentor pada pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu integritas, kerjasama dan mengelola perubahan didapatkan nilai rata-rata sebesar 8,99 yang masuk pada kriteria baik sebagaimana tersaji dalam gambar sebagai berikut.

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR PKN TK. II ANGGARAN XXI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Nama	: Agustian Pahrimala, S.H., M.H.	Nama Mentor	: Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M.
NIP	: 19730815 199903 1 008	NIP	: -
Jabatan	: Kepala Badan	Jabatan	: Bupati
Instansi	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Instansi	: Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Program	: Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025		

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9.2	9.3	9.27	Istimewa
	Komitmen	9	9.1	9.07	Istimewa
	Kedisiplinan	9.1	9.2	9.17	Istimewa
	Kejujuran	9.1	9.2	9.17	Istimewa
	Konsistensi	9.2	9.3	9.27	Istimewa
	Pengambilan Keputusan	9.2	9.3	9.27	Istimewa
	Rata-Rata	9.13	9.23	9.20	Istimewa
Kerjasama	Kerjasama Internal	8.8	8.9	8.87	Baik
	Kerjasama Eksternal	9	8.9	8.93	Baik
	Komunikasi	8.8	8.9	8.87	Baik
	Fleksibilitas	8.8	8.9	8.87	Baik
	Komitmen dalam Tim	8.8	8.9	8.87	Baik
	Rata-Rata	8.84	8.90	8.88	Baik
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	9	8.9	8.93	Baik
	Adaptabilitas	8.8	8.9	8.87	Baik
	Pengembangan orang lain	8.8	8.9	8.87	Baik
	Orientasi pada hasil	8.8	8.9	8.87	Baik
	Inisiatif	8.8	8.9	8.87	Baik
Rata-Rata	8.84	8.90	8.88	Baik	
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.94	9.01	8.99	Baik

Keterangan Kualifikasi


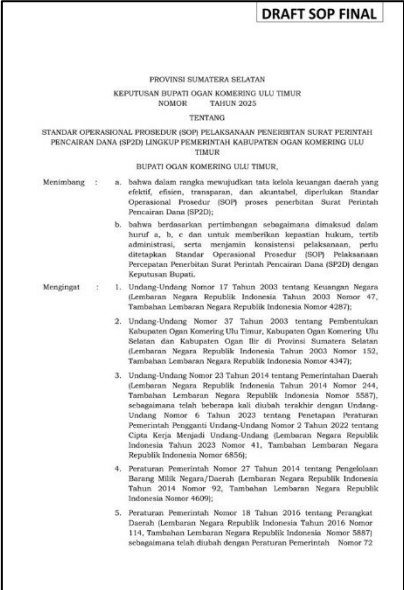
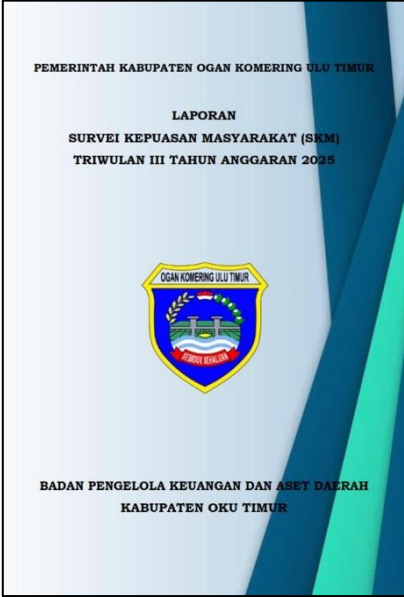
9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Gambar 3.37 Rekap Nilai Sikap Perilaku Setelah Pengembangan Potensi Diri

Pengembangan Potensi Diri yang dilakukan selama pelaksanaan proyek perubahan diuraikan kedalam tabel berikut :

Tabel 3.10 Hasil Pengembangan Potensi Diri

No.	Aspek	Strategi Pengembangan Potensi Diri	Waktu Pelaksanaan	Bukti
1	Kerjasama Eksternal	Mengikuti pelatihan kolaborasi lintas instansi	September 2025	
		Membangun forum koordinasi eksternal rutin Menjalin	September s.d Oktober 2025	
		MoU/kerja sama strategis dengan mitra	Oktober 2025	

2	Orientasi Pelayanan	Mengikuti pelatihan pelayanan publik prima	September 2025	
		Menyusun SOP layanan berbasis kebutuhan pengguna	Oktober 2025	
		Melaksanakan survei kepuasan layanan secara berkala	September s.d Oktober 2025	

Adapun data dukung lengkap dapat dilihat dan diunduh melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link

3. Perbandingan Nilai Sikap Perilaku Sebelum dan Sesudah Pengembangan Potensi Diri

Berdasarkan hasil penilaian terhadap sikap perilaku Project Leader sebelum dan sesudah melaksanakan *Pengembangan Potensi Diri* serta implementasi proyek perubahan, dapat diketahui adanya peningkatan yang menggambarkan perkembangan kompetensi manajerial secara positif.

Sebelum pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri, nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian Project Leader dan Mentor berada pada angka 8,90, dengan rincian aspek integritas, kerja sama, dan mengelola perubahan berada dalam kategori baik. Setelah dilakukan Pengembangan Potensi Diri, nilai rata-rata meningkat menjadi 8,99, yang tetap berada pada kategori baik namun menunjukkan adanya peningkatan kualitas sikap dan perilaku kerja.

Jika dilihat secara lebih rinci:

- **Nilai integritas** tetap konsisten tinggi pada angka 9,13 (Project Leader) dan 9,23 (Mentor), menandakan stabilitas komitmen moral dan profesionalisme.
- **Nilai kerja sama** meningkat dari 8,78 menjadi 8,84 (Project Leader), menunjukkan peningkatan kemampuan kolaboratif dan komunikasi efektif dalam tim.
- **Nilai mengelola perubahan** juga meningkat dari 8,78 menjadi 8,84, menandakan kemampuan adaptif dan kepemimpinan dalam menghadapi dinamika proyek semakin baik.

Dengan demikian, terjadi kenaikan rata-rata sebesar 0,09 poin setelah pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri, yang menunjukkan bahwa proses pengembangan diri berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi manajerial Project Leader dalam aspek integritas, kerja sama, dan kemampuan mengelola perubahan.

BAB IV

PENUTUP

A. LEASON LEARNT

Pelaksanaan proyek perubahan SimPel SPaDu memberikan banyak pengalaman berharga yang tidak hanya memperkaya kapasitas tim pelaksana, tetapi juga membuka wawasan baru mengenai pentingnya kolaborasi, kepemimpinan, serta pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Setiap tahapan proses memberikan pelajaran yang dapat dijadikan dasar dalam penguatan inovasi di masa depan.

Dari pelaksanaan proyek perubahan SimPel SPaDu, terdapat sejumlah pembelajaran penting. *Pertama*, dukungan pimpinan daerah dan komitmen tim internal BPKAD merupakan faktor kunci dalam memastikan proyek berjalan sesuai rencana. *Kedua*, keterlibatan aktif stakeholder eksternal seperti OPD dan Bank Sumsel Babel mempercepat proses integrasi sistem dan memperkuat legitimasi inovasi. *Ketiga*, penerapan sistem digital tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga menuntut kesiapan sumber daya manusia serta perubahan pola kerja menuju budaya pelayanan cepat, akurat, dan transparan.

Selain itu, proyek ini mengajarkan bahwa umpan balik dari pengguna layanan merupakan instrumen penting dalam penyempurnaan inovasi. Keterbukaan terhadap masukan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan baik dari sisi sistem aplikasi maupun penyederhanaan proses bisnis.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi, dapat ditarik sejumlah kesimpulan yang mencerminkan capaian utama dari proyek perubahan SimPel SPaDu. Kesimpulan ini menegaskan bahwa inovasi yang dirancang tidak hanya berhasil mencapai target kinerja, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah.

Proyek perubahan SimPel SPaDu terbukti efektif dalam mewujudkan percepatan penerbitan SP2D, yang semula memerlukan waktu 2- 5 hari, kini dapat diselesaikan

maksimal 2 hari kerja. Inovasi ini menghasilkan manfaat nyata berupa peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan OPD pengguna layanan mencapai lebih dari 83.93%, menandakan keberhasilan implementasi sesuai indikator kinerja yang ditetapkan.

Lebih jauh, proyek ini memberikan kontribusi strategis bagi penguatan tata kelola keuangan daerah, peningkatan kualitas layanan publik, serta mendukung pencapaian reformasi birokrasi melalui transformasi digital.

Dengan capaian tersebut, SimPel SPaDu dapat dinyatakan sebagai inovasi yang berhasil, efektif, dan relevan dalam menjawab kebutuhan percepatan layanan SP2D. Lebih jauh, hasil ini menunjukkan kesiapan BPKAD Kabupaten OKU Timur dalam mendukung agenda nasional transformasi digital dan reformasi birokrasi.

C. REKOMENDASI

Keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan SimPel SPaDu (Sistem Pelayanan SP2D Cepat dan Terpadu) menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan keuangan daerah mampu memberikan dampak signifikan terhadap percepatan birokrasi, peningkatan efisiensi, dan penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan publik.

Namun demikian, untuk menjaga kesinambungan manfaat dan memperluas dampak positif inovasi ini, diperlukan langkah-langkah strategis dalam jangka menengah dan jangka panjang agar SimPel SPaDu tidak hanya menjadi program sesaat, melainkan menjadi bagian permanen dari sistem pemerintahan daerah yang modern dan berkelanjutan.

1. Tahapan Jangka Menengah (1–2 Tahun)

Pada tahap jangka menengah, fokus utama diarahkan pada institusionalisasi dan optimalisasi sistem agar SimPel SPaDu benar-benar menjadi bagian dari prosedur baku pengelolaan keuangan daerah.

Adapun rekomendasi strategis yang perlu dilakukan antara lain:

a) Penetapan Regulasi Daerah dan SOP Turunan.

Pemerintah daerah melalui Bupati perlu menetapkan SimPel SPaDu sebagai aplikasi resmi daerah melalui keputusan kepala daerah atau peraturan bupati.

Langkah ini bertujuan memberikan landasan hukum yang kuat agar inovasi tetap berjalan meskipun terjadi perubahan pejabat atau struktur organisasi.

b) Integrasi Sistem Antarbidang di BPKAD dan OPD.

Perlu dilakukan penyempurnaan dan integrasi dengan sistem lain seperti SIMDA Keuangan, SIPD, dan e-Budgeting, agar alur pengajuan, verifikasi, dan penerbitan SP2D berjalan otomatis tanpa redundansi data.

c) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN.

Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi ASN pengelola keuangan di setiap OPD agar mampu beradaptasi dengan sistem digital dan memahami prosedur layanan SP2D secara elektronik. Hal ini dapat dilakukan melalui coaching clinic, knowledge sharing, dan pelatihan internal BPKAD.

d) Pemantapan Infrastruktur Teknologi dan Dukungan Teknis.

Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan jaringan, server, dan keamanan data agar sistem berjalan optimal dan terpercaya. Diperlukan juga tim teknis tetap di BPKAD yang bertugas memelihara dan memperbarui aplikasi.

e) Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Sistem.

Dilakukan evaluasi berkala setiap semester untuk mengukur efisiensi waktu, biaya, dan kepuasan pengguna. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan fitur SimPel SPaDu agar semakin responsif terhadap kebutuhan OPD dan masyarakat.

2. Tahapan Jangka Panjang (Lebih dari 2 Tahun)

Pada tahap jangka panjang, arah pengembangan SimPel SPaDu ditujukan untuk memperluas manfaat, memperkuat daya dukung kebijakan fiskal daerah, serta menjadi model praktik baik bagi daerah lain. Beberapa rekomendasi strategis antara lain:

a) Integrasi ke dalam Sistem Pemerintahan Digital Daerah (SPBE).

SimPel SPaDu perlu menjadi bagian dari Government Service Platform dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten OKU Timur, sehingga proses pelayanan SP2D terkoneksi dengan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah secara menyeluruh.

b) Replikasi dan Kolaborasi Lintas Daerah.

Pemerintah Kabupaten OKU Timur dapat menjadikan SimPel SPaDu sebagai model inovasi keuangan daerah yang dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Sumatera Selatan. Kolaborasi dan pertukaran praktik baik akan memperkuat posisi daerah sebagai pelopor digitalisasi layanan keuangan publik.

c) Pengembangan Big Data Keuangan Daerah.

Data transaksi SP2D yang terekam melalui sistem dapat dimanfaatkan sebagai data warehouse untuk analisis fiskal daerah, perencanaan belanja, dan pengawasan kas secara lebih akurat dan prediktif.

d) Pembentukan Unit Pengelola Inovasi (Innovation Management Unit).

Untuk menjamin keberlanjutan, perlu dibentuk unit atau tim kerja inovasi di BPKAD yang bertugas mengelola, mengembangkan, dan memastikan keberlangsungan SimPel SPaDu serta inovasi pelayanan lainnya secara terintegrasi dan berkelanjutan.

e) Dukungan Anggaran Berkelanjutan.

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan pengembangan sistem dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKAD setiap tahun agar keberlanjutan operasional dan pengembangan fitur inovasi tetap terjamin.

3. Arah Strategis Keberlanjutan

Dengan pelaksanaan rekomendasi di atas, SimPel SPaDu diharapkan tidak hanya menjadi solusi terhadap percepatan penerbitan SP2D, tetapi juga menjadi pilar utama reformasi birokrasi digital keuangan daerah.

Melalui integrasi data, penguatan kapasitas SDM, dan dukungan regulasi yang kokoh, inovasi ini akan terus memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat.

Dalam jangka panjang, SimPel SPaDu akan memperkuat posisi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai daerah pelopor pengelolaan keuangan modern berbasis digital, yang menerapkan prinsip efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (value for money).

Dengan fondasi kelembagaan yang kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, dan komitmen pimpinan daerah yang berkelanjutan, SimPel SPaDu diyakini akan terus berkembang menjadi instrumen strategis yang menjaga ketertiban fiskal daerah, memperkuat transparansi publik, dan mewujudkan pelayanan keuangan daerah yang cepat, akurat, dan terpercaya.

Inovasi ini menjadi simbol nyata perubahan birokrasi menuju pemerintahan daerah yang berdaya saing, adaptif terhadap teknologi, dan berorientasi pada kemanfaatan publik yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2021). *Modul Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2022). *Modul Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II*. Jakarta: LAN RI.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2022). *Modul Manajemen Perubahan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.

Yukl, G. A. (2013). *Leadership in Organizations* (8th ed.). Boston: Pearson Education.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Kesiediaan Menjadi Mentor



**SURAT KESEDIAAN MENJADI MENTOR
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXI TAHUN 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M.
NIP : -
Jabatan : Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Instansi : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bersedia selaku **MENTOR** dengan tugas sebagaimana terlampir Surat Pernyataan ini, yang berlaku selama pelaksanaan **Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXI** Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Nama : Agustian Pahrimale, S.H., M.H.
NIP : 19730815 199903 1 008
Jabatan : Kepala Badan
Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2025

Mentor,

(Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M.)

Lampiran 2 Form Persetujuan Mentor



**FORM PERSETUJUAN MENTOR
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXI TAHUN 2025**

Nama Peserta : Agustian Pahrimale, S.H., M.H.
NIP : 19730815 199903 1 008
NDH : 8
Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Nama Mentor : Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M.
Jabatan : Bupati Ogan Komering Ulu Timur
No. HP Mentor : -

Gagasan Perubahan : STRATEGI PELAYANAN SP2D YANG CEPAT, AKURAT,
TERPADU UNTUK MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK
DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

Disetujui oleh:
Mentor,

Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M.

Lampiran 5 Pernyataan Komitmen Keberlanjutan Proyek Perubahan



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KOMITMEN KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Peserta Pelatihan

Nama : Agustian Pahrimale, S.H., M.H.
NIP : 19730815 199903 1 008
NDH : 8
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Instansi : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Adalah peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian

Nama : Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M.
Jabatan : Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Intansi : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Menyatakan bahwa Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025 merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil Pelatihan. Proyek Perubahan ini akan diimplementasikan di instansi kami dalam milestone jangka menengah dan jangka panjang.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan segala konsekuensinya

Ogan Komering Ulu Timur, Oktober 2025

Peserta,

Agustian Pahrimale, S.H., M.H.

Pejabat Pembina Kepegawaian,



Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M.

Lampiran 6 Form Persetujuan Coach Pada Pemilihan Mata Pelatihan Pilihan Dalam Mendukung Aktualisasi Kepemimpinan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025

Lampiran 7 Kartu Kendali Proses Coaching



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

COACH

KARTU KENDALI PROSES COACHING PKN TINGKAT II ANGKATAN XXI TAHUN 2025

Nama Peserta : Agustian Pahrimale, S.H., M.H.
 NIP : 19730815 199903 1 008
 NDH : 8
 Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 Nama Coach : Dr. Ir. Bambang Budhianto
 NIP : 19610526 198503 1 002

No	Tanggal	Topik Bimbingan	Media Komunikasi	Hasil Coaching	Tanda Tangan Coach
1	8 September 2025	Laporan Pelaksanaan Minggu ke-1 dan 2	Email	Untuk Dilanjutkan	
2	15 September 2025	Pembimbingan Implementasi Proyek Perubahan	Zoom Meeting	Pembahasan Pelaksanaan Tahapan Jangka Pendek Minggu ke 2	
	16 September 2025	Laporan Pelaksanaan Minggu ke-3 dan 4	Email	Untuk dilanjutkan	
3	24 September 2025	Pembimbingan Implementasi Proyek Perubahan	Zoom Meeting	Pembahasan Pelaksanaan Tahapan Jangka Pendek Minggu ke 3	
4	28 September 2025	Laporan Progres Pelaksanaan Proyek Perubahan	Email	Cek ulang perbandingan rencana kegiatan dan subkegiatan dengan yang sudah dilakukan agar Peningkatan Kompetensi SDM dilaksanakan	
5	4 Oktober 2025	Laporan Pelaksanaan Minggu ke-5 dan 6	Email	Untuk dilanjutkan	
6	13 Oktober 2025	Pembimbingan Implementasi Proyek Perubahan	Zoom Meeting	Pembahasan Pelaksanaan Tahapan- Tahapan Pelaksanaan Jangka Pendek, Penekanan Pemenuhan Eviden dan Pengembangan Potensi Diri serta Bankom Stakeholder	
7	17	Laporan Pelaksanaan	Email	Untuk dilanjutkan	

	Oktober 2025	Proyek Perubahan minggu ke-7 dan 8			
8	19 Oktober 2025	Laporan Progres Pelaksanaan Proyek perubahan	Email	Silahkan ditulis Draft Laporan Implementasi Proyek Perubahannya	
9	21 Oktober 2025	Pembimbingan Implementasi Proyek Perubahan	Zoom Meeting	Pembahasan Mengenai Penyusunan Laporan Pelaksanaan Proyek Perubahannya	
10	22 Oktober 2025	Laporan Implementasi Proper Proyek Perubahan	Email	<p>Draft Laporan Implementasi Proyek Perubahannya. Ada beberapa catatan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bab I belum dimasukkan keterkaitan proyek perubahan dengan ASTA CITA dan target SDGs. 2. Dalam Bab III Sub Bab C Kepemimpinan Strategis, apakah dapat dituliskan juga upaya mengelola risiko yang dilakukan, pemanfaatan peluang serta optimalisasi sumberdaya yang ada/terbatas sehingga proyek perubahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 3. Dalam Bab III Sub Bab D Implementasi Strategi Marketing dan Diseminasi. Untuk perubahan peta stakeholders dari saat rancangan dan setelah implementasi belum ada laporannya. 4. Dalam Bab III Sub Bab E Keberlanjutan Proyek Perubahan. Bila ada anggaran yang disiapkan, berikan buktinya. Kalau dimasukkan dalam SKP, apakah siap? 5. Dalam Bab III Sub Bab F Pemberdayaan Organisasi Pembelajar: Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM dalam Proyek Perubahan, kapan masing-masing kegiatan dilaksanakan dan apa buktinya. Kemudian adakah pembuktian setelah mengikuti pelatihan, kompetensi peserta meningkat? 6. Di Bab III Sub Bab I Hasil Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri, agar disebutkan perubahan angka penilaiannya, dan hasil penilaian gabungan yang kedua yang dimasukkan di badan tulisan sebagai bukti. Ini adalah hasil selama 2 bulan, jadi bukan rencana lagi. 7. Bab Penutup Sub Bab C. Rekomendas. Agar rekomendasi yang diberikan dikaitkan juga dengan keberlanjutan proyek perubahan di jangka menengah dan jangka panjang. 8. Lampiran belum dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan oleh LAN seperti lembar kendali mentor dan coach. Demikian catatan saya, Silahkan disempurnakan, juga untuk versi majalahnya. 	







Lampiran 8 Kartu Kendali Proses Mentoring



MENTOR

**KARTU KENDALI PROSES MENTORING
PKN TINGKAT II ANGKATAN XXI TAHUN 2025**

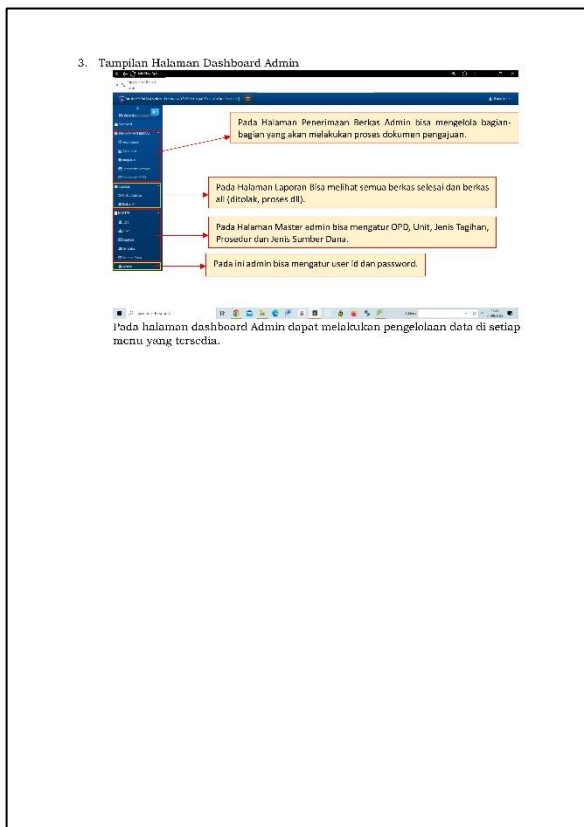
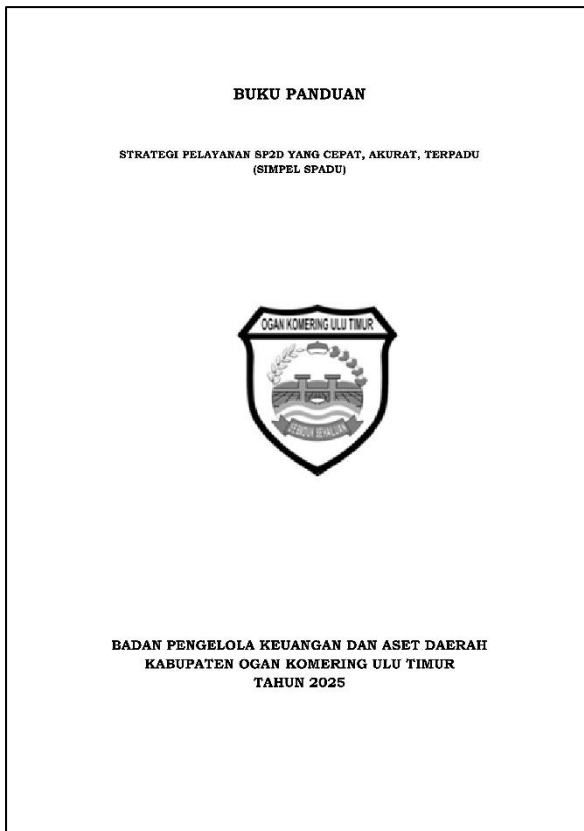
Nama Peserta : Agustian Pahrimale, S.H., M.H.
 NIP : 19730815 199903 1 008
 NDH : 8
 Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 Nama Mentor : Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M.

No	Tanggal	Topik Bimbingan	Media Komunikasi	Hasil Coaching	Tanda Tangan Mentor
1	1 September 2025	Inisiasi Program & Pembentukan Tim	Tatap Muka	Pelaksanaan dan Pemenuhan Eviden Tahapan Jangka Pendek ke-1	
2	8 September 2025	Pengumpulan Data & Pemetaan Masalah	Tatap Muka	Pelaksanaan dan Pemenuhan Eviden Tahapan Jangka Pendek ke-2	
3	15 September 2025	Desain Awal Solusi & SOP Baru	Tatap Muka	Pelaksanaan dan Pemenuhan Eviden Tahapan Jangka Pendek ke-3	
4	22 September 2025	Review & Finalisasi Desain	Tatap Muka	Pelaksanaan dan Pemenuhan Eviden Tahapan Jangka Pendek ke-4	
5	1 Oktober 2025	Pengembangan Prototipe Layanan	Tatap Muka	Pelaksanaan dan Pemenuhan Eviden Tahapan Jangka Pendek ke-5	
6	13 Oktober 2025	Pelatihan Awal & Uji Coba Terbatas	Tatap Muka	Pelaksanaan dan Pemenuhan Eviden Tahapan Jangka Pendek ke-6 dan Pembahasan Laporan Proyek Perubahan	

Lampiran 9 Dokumentasi Pelaksanaan



Lmpiran 10 Buku Panduan





AGUSTIAN PAHRIMALE, S.H., M.H.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

DATA DIRI

Tempat / Tanggal Lahir
Palembang, 15 Agustus 1973

Jenis Kelamin
Laki-Laki

Status
Menikah

Kewarganegaraan
Indonesia

KONTAK

 0813 6962 9193

 pahrimaleagustian@gmail.com

 Kotabaru Selatan, Martapura
Ogan Komering Ulu Timur

SOSIAL MEDIA

-

TENTANG SAYA

Saya adalah seorang profesional dengan pengalaman memimpin di bidang pengelolaan keuangan daerah, saat ini menjabat sebagai Kepala BPKAD Kabupaten OKU Timur. Dalam posisi ini, saya bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah. Saya memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya, mendorong inovasi dalam tata kelola keuangan, serta membangun kerja sama yang baik dengan berbagai instansi terkait demi mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

PENDIDIKAN

Sarjana Hukum	-
Magister Hukum	-

PENGALAMAN KERJA

KEMAMPUAN

**LAPORAN LENGKAP DAN BUKTI
DUKUNG BISA DIUNDUH DI
BAWAH INI :**

[https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1JbJYQoHVwnLG9bMb4BTe56ot4pUktSCn?usp=drive_link)



Let's Start!